

**SISTEM KEPEMIMPINAN DI DALAM
MASYARAKAT PEDESAAN
IRIAN JAYA**

Direktorat
Kebudayaan

12

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

**SISTEM KEPEMIMPINAN DI DALAM
MASYARAKAT PEDESAAN
IRIAN JAYA**

HADIAH
DARI
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN PEMBINAAN NILAI-NILAI BUDAYA
1990

P R A K A T A

Tujuan Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya (IPNB) adalah menggali nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila demi tercapainya ketahanan nasional di bidang sosial budaya. Untuk mencapai tujuan itu, diperlukan penyebarluasan buku-buku yang memuat berbagai macam aspek kebudayaan daerah. Pencetakan naskah yang berjudul Sistem Kepemimpinan Di Dalam Masyarakat Pedesaan Irian Jaya, adalah usaha untuk mencapai tujuan di atas.

Tersedianya buku tentang Sistem Kepemimpinan Di Dalam Masyarakat Pedesaan Irian Jaya, adalah berkat kerjasama yang baik antar berbagai pihak, baik instansional maupun perorangan, seperti: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Pemerintah Daerah Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Pimpinan dan staf Proyek IPNB baik Pusat maupun Daerah, dan para peneliti/penulis itu sendiri.

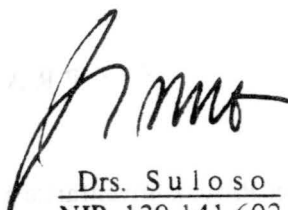
Kiranya perlu diketahui bahwa buku ini belum merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam. Akan tetapi, baru pada tahap pencatatan yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu mendatang. Oleh karena itu, kami selalu menerima kritik yang sifatnya membangun.

Akhirnya, kepada semua pihak yang memungkinkan terbitnya buku ini, kami ucapkan terimakasih yang tak terhingga.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat, bukan hanya bagi masyarakat umum, tetapi juga para pengambil kebijaksanaan dalam rangka membina dan mengembangkan kebudayaan.

Jakarta, Oktober 1990

Pemimpin Proyek Inventarisasi
dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya.



Drs. Suloso
NIP. 130 141 602

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Saya dengan senang hati menyambut terbitnya buku-buku hasil kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya, dalam rangka menggali dan mengungkapkan khasanah budaya luhur bangsa.

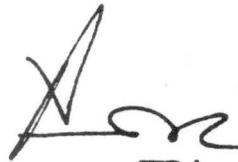
Walaupun usaha ini masih merupakan awal dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, namun dapat dipakai sebagai bahan bacaan serta bahan penelitian lebih lanjut.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dapat saling memahami kebudayaan-kebudayaan yang ada dan berkembang di tiap-tiap daerah. Dengan demikian akan dapat memperluas cakrawala budaya bangsa yang melandasi kesatuan dan persatuan bangsa.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan proyek ini.

Jakarta, Oktober 1990

Direktur Jenderal Kebudayaan,



Drs. GBPH. Poeger
NIP. 130 204 562

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkatNya, laporan ini kami dapat selesaikan dengan baik. Laporan Sistem Kepemimpinan di Dalam Masyarakat Pedesaan Irian Jaya Tahun 1983/1984, merupakan naskah kebudayaan dari Pdoyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Kami menyadari bahwa laporan ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam. Dan barangkali masih berbentuk — mengangkat permukaan —, dengan demikian merupakan informasi awal, bagi suatu penelitian lanjutan nanti.

Berhasilnya usaha ini, berkat bantuan dan kerja sama berbagai pihak. Etika pun mengajar kami untuk menyampaikan terima kasih kepada; Bappeda Tingkat I Irian Jaya, Rektor Universitas Cenderawasih, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura, Kepala Pemerintahan Wilayah Kecamatan Sentani, Kepala Kelurahan Sobonsolo di Sentani, Kepala Desa Itakiwa di Sentani, Ketua RW II Puai di Sentani, Kepala-Kepala Lingkungan di Yahim, Komba dan Yobeh dan pihak Ondoafi/Ondofolo di Sentani.

Akhirnya tak ada gading yang tak retak. Mudah-mudahan laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jayapura, 1 Agustus 1986

T e a m

DAFTAR ISI

	Halaman
P R A K A T A	iii
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
BAB I. P E N D A H U L U A N	1
1.1 Masalah	3
1.2 Tujuan	5
1.3 Ruang Lingkup	5
1.4 Pertanggungjawaban Ilmiah	8
BAB II. I D E N T I F I K A S I	14
2.1 Lokasi	14
2.2 Penduduk	19
2.3 Sejarah Pemerintahan Desa	25
2.4 Latar Belakang Sosial Budaya	30
BAB III. G A M B A R A N U M U M K E P E M I M P I N A N D A - L A M M A S Y A R A K A T P E D E S A A N	39

	3.1 Organisasi Pemerintahan Desa	40
	3.2 Sistem Kepemimpinan	49
BAB IV.	POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG SOSIAL	68
	4.1 Organisasi Dalam Kehidupan Sosial	68
	4.2 Sistem Kepemimpinan	78
	4.3 Fungsi Dan Pengaruh Kepemimpinan Bidang Sosial Dalam Masyarakat	84
BAB V.	POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG EKONOMI	86
	5.1 Organisasi Dalam Bidang Ekonomi	87
	5.2 Sistem Kepemimpinan	89
	5.3 Fungsi Dan Pengaruh Kepemimpinan Bidang Ekonomi Dalam Masyarakat	91
BAB VI.	POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG AGAMA	94
	6.1 Organisasi Dalam Bidang Agama	94
	6.2 Sistem Kepemimpinan	101
	6.3 Fungsi Dan Pengaruh Kepemimpinan Bidang Agama Dalam Masyarakat	111
BAB VII.	POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG PENDIDIKAN	113
	7.1 Organisasi Dalam Bidang Pendidikan	113
	7.2 Sistem Kepemimpinan	118
	7.3 Fungsi Dan Pengaruh Kepemimpinan Bidang Pendidikan Dalam Masyarakat	123
BAB VIII.	BEBERAPA ANALISA	126
	8.1 Pengaruh Kebudayaan Terhadap Sistem Kepemimpinan Di Pedesaan	127
	8.2 Sistem Kepemimpinan Pedesaan Sehubungan Dengan Sistem Administrasi Politik Nasional	129

8.3 Sistem Kepemimpinan Pedesaan Dalam Pem angunan Nasional	132
BIBLIOGRAFI	135
LAMPIRAN	141

DAFTAR TABEL

Tabel	J u d u l	Halaman
1.	Jumlah Penduduk Kelurahan Dobonsolo, Kecamatan Kecamatan Sentani	20
2.	Jumlah Penduduk RW II Puai, Desa Itakiwa, Kecamatan Sentani	21
3.	Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan Di Kelurahan Dohonsolo, Kecamatan Sentani	22
4.	Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan Di Rw II Puai, Desa Itakiwa, Kecamatan Sentani	22
5.	Mutasi Penduduk Di Kelurahan Dobonsolo, Kecamatan Sentani	24
6.	Keadaan Guru Pada Sekolah Dasar Impres Yahim dan Komba, Kelurahan Dobonsolo, Kecamatan Sentani	114
7.	Keadaan Guru Pada Sekolah Dasar Negeri RW II Puai, Desa Itakiwa, Kecamatan Sentani	114

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1. Struktul Organisasi Pemerintahan Kelurahan Dobonsolo, Kecamatan Sentani	41
Bagan 2. Struktur Organisasi Rukun Wilayah II Puai, Desa Itakiwa, Kecamatan Sentani	42
Bagan 3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1979)	46
Bagan 4. Struktur Organisasi Pemerintahan Tradisional (Adat), Kecamatan Sentani	62

BAB I PENDAHULUAN

Pada hakekatnya seluruh wilayah pedesaan di Indonesia dewasa ini, baik secara ketat maupun secara longgar telah berada di bawah kontrol kekuasaan administrasi pemerintah Indonesia. Bahkan kelompok-kelompok komunitas kecil yang setengah mengembara, biasanya digolongkan sebagai kelompok-kelompok suku bangsa terasing, dengan satu dan lain cara telah berada dalam kontrol administrasi pemerintah (antara lain melalui pengaturan administrasi oleh Departemen Sosial, Departemen Kehutanan, Departemen Dalam Negeri dan Lembaga-Lembaga Pendidikan/Agama).

Keaneka ragaman corak pedesaan di Indonesia (Geertz 1967, Koentjaraningrat, 1967, Suparlan, 1978) terwujud dalam bentuk :

1. Tingkat kebudayaan, yaitu dari "primitif" sampai dengan yang sudah mengenal "modern";
2. Sistem ekonominya, yaitu dari yang masih hidup berdasarkan sistem perladangan (membakar hutan/belukar dan menyebar bibit tanaman dengan tugal) yang berpindah-pindah dan meramu sampai dengan yang bersawah dengan sistem irigasi rumit dan yang sebagian telah tercakup dalam sistem agri-bisnis yang modern;
3. corak masyarakatnya, yaitu dari yang terwujud dalam komunitas-komunitas kecil, setengah mengembara dan terisolasi, sampai

dengan terwujudnya sebagai masyarakat-masyarakat pedesaan yang besar dan padat penduduknya dengan corak struktur-struktur sosialnya yang kompleks yang menunjukkan ciri-ciri kehidupan perkotaan atau urbanisasi;

4. kesukubangsaan, yaitu dari yang bercorak tunggal, bersifat koperasi (klen, lineage) dan tertutup sampai dengan yang bercorak majemuk kesukubangsaan warga masyarakat dan bersifat terbuka; dan
5. prinsip-prinsip yang melandasi sistem-sistem sosial sebagaimana yang terwujud dalam bentuk hukum adat dan adat istiadat yang berlaku, yaitu yang berdasarkan pada ikatan kekerabatan, teritorial atau kombinasi dari keduanya.

Adanya keanekaragaman corak kebudayaan, sistem ekonomi, dan sistem sosial di pedesaan Indonesia mengacu pada dan menjadi landasan dari adanya keanekaragaman sistem politik yang berlaku di masing-masing masyarakat desa. Walaupun secara singkat tipologi keseragaman sistem-sistem politik yang berlaku di masing-masing masyarakat tersebut telah menjadi lebih sederhana karena adanya pengaruh kekuatan politik dari sistem administrasi nasional, tetapi keanekaragaman tersebut tetap ada karena adanya: (1) pengaruh kekuatan politik dari sistem nasional yang tidak seragam waktu mulai pengaruhnya di pedesaan Indonesia; (2) orientasi politik dan kekuatan politik yang ada pada sistem kepemimpinan dan pemimpin di desa yang bersangkutan; dan (3) besarnya pengaruh kekuatan kebudayaan atas sistem politik yang berlaku setempat dan atas sistem kepemimpinan, yang secara keseluruhan di pedesaan Indonesia itu beraneka ragam, dalam menanggapi masuknya pengaruh kekuatan dari sistem nasional.

Pengaruh dari kebudayaan atas corak sistem politik dan kepemimpinan amat besar yang kaitannya antara satu dengan lainnya dapat diumpamakan seperti kaitan hubungan antara air dengan ikan. Fried (1967) memperlihatkan bahwa masyarakat dengan kebudayaan yang sederhana, dan sebaliknya masyarakat dengan tingkat kebudayaan yang kompleks juga mempunyai sistem politik dan kepemimpinan yang kompleks.

Sedangkan Swarta (1968) memperlihatkan bahwa pada tingkat masyarakat setempat, yang dinamakannya dengan tingkat lokal dalam perbandingan dengan tingkat nasional, proses-proses politik

yang terwujud merupakan suatu hasil perpaduan antara hasil-hasil permainan sistem-sistem politik nasional, masyarakat setempat (atau lokal), dengan kebudayaan yang berlaku setempat, sehingga secara aktual memberikan suatu corak tersendiri pada sistem politik dan kepemimpinan yang berlaku pada tingkat lokal tersebut. Thamrin Hamdan (1980), yang dengan menggunakan modal Swarta tersebut telah memperlihatkan bahwa corak sistem politik dan kepemimpinan yang secara aktual berlaku di Lintang Empat Lawang, Sumatera Selatan, ditandai oleh adanya perpaduan antara peranan-peranan yang dijalankan oleh orang-orang menggunakan sistem nasional, sistem politik tradisional, sistem-sistem kekerabatan, dan berbagai sistem penguasaan sumber daya (Suparlan 1977), Thamrin Hamdan memperlihatkan pula bahwa corak sistem politik dan kepemimpinan yang berlaku pada tingkat masyarakat setempat muncul sebagai hasil interaksi dan permainan antara unsur-unsur tradisional di masyarakat desa setempat dengan unsur-unsur yang datang dari kota.

1.1 Masalah

Yang menjadi masalah penelitian adalah sistem kepemimpinan di pedesaan Indonesia. Dalam pendekatannya desa dilihat sebagai suatu satuan sosial yang merupakan satuan kebudayaan dengan coraknya yang tersendiri dan merupakan salah satu unsur dari sistem jaringan administrasi, ekonomi, politik, dan sosial, yang pusatnya terdekat adalah kota kecamatan. Melalui sistem-sistem jaringan tersebut, pengaruh sistem nasional (kebudayaan, politik, ekonomi dan sosial) memasuki dan memberi corak pada kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat desa setempat.

Sistem kepemimpinan yang akan dilihat sebagai suatu perwujudan, atau perangkat-perangkat model-model pengetahuan yang digunakan untuk menanggapi berbagai masalah dan gejala-gejala yang berkaitan dengan pengaruh tata kehidupan manusia, dari kebudayaan masyarakat setempat. Sistem kepemimpinan yang operasionalisasi kegiatan-kegiatannya dilakukan melalui struktur kepemimpinan, yang merupakan sebagian dari struktur-struktur dalam sistem politik yang berlaku setempat, menciptakan adanya kedudukan-kedudukan atau jabatan-jabatan yang masing-masing menjalankan peranan untuk mencapai tujuan penataan atau pengaturan tata kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Secara ideal struktur kepemimpinan ini akan dapat berjalan secara efektif tanpa harus mendapat dukungan dari struktur-struktur sosial dan kekuatan lainnya yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan. Tetapi aktual struktur kepemimpinan hanya mungkin dapat berjalan secara efektif kalau mendapat dukungan dari berbagai sarana dan struktur yang ada dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena kepemimpinan menuntut akumulasi kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi, politik dan fisik yang secara bersama-sama mewujudkan adanya kekuasaan atau kesanggupan untuk menyuruh orang atau sejumlah orang lain melakukan sesuatu sesuai dengan yang dikehendakinya.

Seringkali struktur kepemimpinan yang ada, yang terwujud dari sistem politik setempat, tidak menyajikan atau tidak dilengkapi secara baik dengan kekuatan-kekuatan tersebut, sehingga dalam kegiatan-kegiatan harus meminjam dan menggunakan kekuatan-kekuatan yang terdapat dalam struktur-struktur lainnya yang ada dalam masyarakat setempat maupun yang berasal dari luar masyarakat tersebut biasanya terdapat di pusat jaringan sosial, ekonomi, administrasi dan politik yaitu di kota kecamatan atau di kota Kabupaten. Ada beberapa kasus, seperti yang dikemukakan oleh Thamrin Hamdan (1980), sumber-sumber kekuatan bukan hanya yang berasal dari kota kecamatan dan kota kabupaten, tetapi juga dari ibu kota propinsi dan dari Jakarta (ibu kota negara). Dengan demikian, corak sistem kepemimpinan di pedesaan di Indonesia dilihat sebagai hasil perwujudan dari interaksi unsur-unsur yang menjadi landasan kekuatan sosial, ekonomi, politik, dan fisik dari kepemimpinan itu dalam mengatur tata kehidupan masyarakatnya yang sumbernya berasal dari masyarakat desa yang bersangkutan dan dari kota. Ruang lingkup sasaran masalah penelitian tersebut dapat dilihat sebagai sama dengan model yang dikembangkan oleh Redfield (1941, 1953, 1955) yang melihat hubungan antara dua macam struktur sosial yang prosesnya berjalan terus menerus.

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah tentang sistem kepemimpinan seperti yang dikemukakan di atas, maka permasalahan sistem kepemimpinan di dalam masyarakat pedesaan dapat dirumuskan sebagai berikut :

”Sejauh mana jaringan kebudayaan, ekonomi, politik dan sosial berpengaruh terhadap sistem kepemimpinan di dalam masya-

rakat di pedesaan Indonesia pada umumnya atau di pedesaan daerah Sumatera Barat pada khususnya dalam kaitannya dengan struktur sosial kota dan desa”.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari inventarisasi dan dokumentasi ini adalah agar Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Dikbud Republik Indonesia mampu menyediakan data dan informasi kebudayaan untuk keperluan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, pendidikan dan masyarakat. Rumusan tersebut mengandung hal yang bersifat umum dan bersifat khusus yang sekaligus dapat menjadi tujuan umum dan tujuan khusus atau jangka pendek dan jangka panjang dari inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan ini.

1.2.1 Tujuan Jangka Pendek atau Tujuan Khusus.

Mengumpulkan dan menyusun laporan/naskah ”Sistem Kepemimpinan di dalam Masyarakat Pedesaan”. Naskah atau laporan tersebut mengungkapkan masalah kepemimpinan dihubungkan dengan politik, ekonomi, sosial dan dan budaya.

1.2.2 Tujuan Jangka Panjang atau Tujuan Umum.

Tujuan jangka panjang ini bermaksud agar tersusunnya kebijaksanaan Nasional di bidang kebudayaan yang meliputi pembinaan kebudayaan Nasional, pembinaan kesatuan bangsa dan meningkatkan ketahanan nasional.

1.3 Ruang Lingkup

1.3.1 Materi

Bertitik tolak atas corak sistem kepemimpinan di pedesaan di Indonesia adalah sebagai hasil perwujudan interaksi aspek-aspek sosial, ekonomi, politik dan fisik dari kepemimpinan yang berasal dari masyarakat desa setempat dan dari kota, maka secara hipotesis ditemui tiga corak atau tipe kepemimpinan di pedesaan Indonesia yaitu

- a. Sistem kepemimpinan tradisionalnya kuat dan mendominasi berbagai struktur dan kegiatan politik yang berlaku dalam masyarakat desa.

- b. Sistem kepemimpinan tradisional dan kepemimpinan yang berasal dari sistem administrasi politik nasional sama-sama kuatnya dan secara bersama-sama merupakan suatu satuan yang mengatur tata kehidupan dalam masyarakat desa.
- c. Sistem kepemimpinan yang bersumber pada sistem administrasi politik nasional kuat dan mendominasi bidang-bidang dan kegiatan-kegiatan politik dalam kehidupan masyarakat di desa, sehingga sistem kepemimpinan tradisional terkesampingkan dan tidak berfungsi lagi.

Berkenaan dengan tiga sistem kepemimpinan pedesaan yang menjadi obyek penelitian ini mencakup banyak dimensi atau variabel yang berhubungan dengan bidang politik, sosial, ekonomi, agama, dan pendidikan seperti, sistem administrasi politik, tingkat pemahaman masyarakat tentang azas dan program organisasi politik, sistem dan hubungan kekerabatan, sistem nilai dan harga, pengorganisasian kegiatan ekonomi, peredaran uang dan barang, sistem pengorganisasian kegiatan-kegiatan keagamaan, tingkat pengamalan dan penghayatan keagamaan masyarakat, sistem kepemimpinan pendidikan, kurikulum dan penyelenggaraan sekolah dan variabel-variabel lainnya yang menyangkut kelima bidang tersebut di atas.

Karena terbatasnya tenaga, dana dan fasilitas yang dimiliki, maka dalam penelitian atau inventarisasi dan dokumentasi sistem kepemimpinan ini ruang lingkup penelitian hanya mencakup keterangan-keterangan yang berkaitan dengan :

- a. Corak kebudayaan dan masyarakat desa yang diteliti.
- b. Sistem kekerabatan dan kelompok-kelompok kekerabatan.
- c. Sistem administrasi politik di desa dan struktur kepemimpinannya.
- d. Agama, sistem pengorganisasian kegiatan-kegiatan keagamaan, dan struktur kepemimpinan pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan.
- e. Sistem ekonomi, pengorganisasian kegiatan-kegiatan ekonomi, dan struktur kepemimpinan kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut.
- f. Tokoh-tokoh dalam masyarakat yang mempunyai kesanggupan untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu atau yang mempunyai pengikut-pengikut.

- g. Hubungan-hubungan kekerabatan sosial, ekonomi, dan politik dan antara Tokoh-tokoh masyarakat.
- h. hubungan tokoh-tokoh tersebut dengan pejabat/pejabat-pejabat di kantor kecamatan, kantor kabupaten, dan kantor gubernuran, atau dari kantor-kantor lainnya, melalui jalur-jalur hubungan kekerabatan sosial, ekonomi, dan kepartaian/Golkar.
- i. Cara-cara pengangkatan/penunjukan Lurah, dan dalam kebijaksanaan yang berhasil dan yang tidak berhasil dilaksanakan Lurah atau kepala Desa hanya berpegang pada kekuatan administrasi politik nasional yang diembannya, hanya dengan kompromi dengan keputusan-keputusan kebijaksanaan dari tokoh-tokoh masyarakat/pemimpin tradisional, atau lainnya.

1.3.2 Operasional.

Ditemui kenyataan di lapangan bahwa desa dalam pengertian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 belum diterapkan secara baik. Dalam arti bahwa proses pemilihan Kepala Desa belum terlaksana sesuai dengan pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1979. Termasuk pula di sini penempatan anggota Lembaga Musyawarah sebagai bagian dari aparat pemerintahan desa, belum seluruhnya terealisasi. Dengan demikian sistem kepemimpinan desa sukar untuk diteliti karena belum lengkap struktur termasuk aparatnya.

Sebagai catatan bahwa adanya konsep pembentukan "desa" sebagai unit pemerintahan terendah di bawah kecamatan, merupakan penggabungan dari beberapa desa/kampung (penggabungan administratif). Dan kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kampung itu merupakan kelompok etnis yang sama, dengan tugas menangani urusan-urusan pemerintahan. Selain itu, masih di tingkat kampung terdapat pula pemerintahan adat, terkenal dengan sebutan "Ondoafi". Kehadiran lembaga ini, sebetulnya memang sudah lama ada, dan diakui secara turun temurun, kekuasaannya jauh lebih luas bila dibandingkan dua sistem pemerintahan yang ada. Dengan demikian di tingkat desa, dapat dilihat dua bentuk pemerintahan. Masing-masing pemerintahan desa; merupakan penggabungan dari dua atau lebih kampung, dan pemerintahan adat/tradisional (Ondoafi).

Dengan demikian, dalam penelitian kancah/lapangan sebuah desa yang akan dilihat sebagai satuan sasaran penelitian. Untuk

sebuah propinsi akan diteliti dua desa secara mendalam. Dan desa-desa dimaksud berada dalam satu kecamatan, tetapi bukan dalam wilayah kota Administratif atau kota Madya. Pilihan atas desa yang akan diambil yang letaknya jauh dari kota kecamatan, dimana jaringan komunikasi sudah terbuka. Sebuah desa lagi di ambil yang letaknya jauh dari kota kecamatan, dimana jaringan komunikasi di desa tersebut masih tertutup.

Berdasarkan ruang lingkup operasional ini, maka Desa yang terpilih sebagai lokasi penelitian adalah:

- a. Kelurahan Dobonsolo; terletak di ibu kota kecamatan
- b. Rukun Wilayah II Puai (Desa Itakiwa); terletak di utara timur laut danau Sentani.

1.4 Pertanggungjawaban Ilmiah

1.4.1 *Populasi*

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tingkat I Irian Jaya, bahwa pada tahun 1982 di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya terdapat 9 daerah tingkat II, terdiri dari 107 kecamatan dengan 892 desa.

Seperti telah disinggung pada bagian terdahulu penerapan pemerintahan desa menurut undang-undang ini karena dalam transisi dan berorientasi pada kepemimpinan pedesaan dalam pengertian adat, sebagai suatu kesatuan hukum adat, maka desa sebagai obyek penelitian dalam arti desa yang jumlahnya sebanyak 892 desa.

1.4.2 *Kerangka Sampel*

Sepanjang informasi yang diperoleh berdasarkan pengamatan tim aspek sistem kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan Irian Jaya, ternyata dari 107 kecamatan yang ada di Propinsi ini 56 di antaranya mempunyai satu atau dua desa dalam masing-masing kecamatan tersebut relatif masih tertutup jaringan transportasi atau komunikasinya di daerah tersebut.

Patut pula dikemukakan bahwa desa-desa yang relatif tertutup ini pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok besar di tinjau dari segi letaknya dari ibu kota propinsi. Tiga kelompok desa tersebut adalah :

- a. Letak relatif sangat jauh dari ibu kota propinsi.
- b. Letak atau jaraknya sedang dari ibu kota propinsi.
- c. Letak dan jaraknya relatif dekat dari ibu kota propinsi.

Mengingat keadaan yang demikian dan dikaitkan pula dengan terbatasnya tenaga, fasilitas dan dana yang tersedia, maka dipilih daerah yang menjadi obyek/lokasi penelitian ini secara purposive yaitu Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura. Adapun desa yang akan diteliti dengan mempedomani ruang lingkup operasional yang telah digariskan sebelumnya adalah :

- a. Kelurahan Dobonsolo, terletak di ibukota Kecamatan dengan jaringan transportasi/komunikasi yang sudah lancar atau terbuka.
- b. Rukun Wilayah II Puai desa Itakiwa, terletak 25 km dari ibu kota Kecamatan dengan jaringan transportasi/komunikasi yang masih kurang lancar atau tertutup.

1.4.3 Informan

Untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini, selain mempelajari bahan kepustakaan yang ada, juga dikumpulkan informasi/data dari para informan kunci. Yang dimaksud dengan informan kunci di sini adalah para nara sumber yang di duga benar-banar memahami materi atau masalah yang tercakup dalam penelitian sistem kepemimpinan di masyarakat pedesaan ini. Nara sumber tersebut terdiri dari antara lain pemimpin-pemimpin Pemerintahan desa, tokoh-tokoh masyarakat, seperti cerdik pandai, rokhaniwan, pihak pemerintahan adat/Ondoafi dan para pemuka. Di samping itu juga para informan kunci diambil dari pemimpin-pemimpin organisasi baik politik, sosial, ekonomi dan pendidikan. Pengambilan informan kunci ini mempertimbangkan kelompok generasinya, yaitu mewakili generasi muda dan generasi sebelum, begitu juga yang mewakili kaum wanita.

Bertolak dari pengkategorikan informan kunci seperti dikemukakan di atas, maka telah dipilih 50 orang informan, dengan perincian sebagai berikut :

	Jenis Informan	Puai	Dobonsolo	Jumlah
1.	Pemimpin pemerintahan desa	5	7	12
2.	Pemimpin bidang organisasi sosial	2	5	7
3.	Pemimpin bidang organisasi ekonomi	3	6	9
4.	Pemimpin bidang organisasi agama	4	6	10
5.	Pemimpin bidang organisasi pendidikan	5	7	12
Jumlah		19	31	50

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data/Informasi

Metode yang dikumpulkan ini adalah: (1) pengamatan, (b) wawancara dan (c) studi dokumentasi.

Dalam metode pengamatan, dua metode yang dilakukan masing-masing:

- a. Metode pengamatan biasa, bertujuan untuk memperoleh berbagai keterangan dengan menggunakan kaca mata penelitian yang telah di-filter oleh masalah penelitiannya.
- b. Metode pengamatan terlibat yang bertujuan untuk memperoleh berbagai keterangan dimana makna keterangan tersebut sesuai dengan makna yang diberikan oleh informan terhadap keterangan yang dimaksudkan.

Sedangkan dalam metode wawancara, peneliti cukup menggunakan wawancara bebas. Dengan bentuk ini dimaksudkan untuk memperoleh keterangan yang sifatnya informal atau tidak resmi, yang biasanya terwujud dalam pembicaraan-pembicaraan yang santai. Setiap kegiatan wawancara dilakukan dalam ruang dan waktu yang berbeda-beda. Agar memudahkan di saat wawancara nanti, sudah disiapkan pedoman wawancara, dengan demikian keterangan-keterangan yang ingin diperoleh mudah dijangkau.

Dan dalam studi dokumentasi, Tim mempelajari berbagai dokumen-dokumen (surat-surat keputusan, perjanjian-perjanjian, surat perintah dan lain-lain yang terwujud dalam bentuk catatan tertulis) yang berkaitan dengan desa dan masalah penelitian di desa tersebut; baik secara langsung ada kaitannya maupun yang secara tidak langsung.

1.4.5 Pengolahan dan Analisa Data/Informasi

Untuk memperoleh penemuan-penemuan dan kesimpulan kesimpulan dalam penelitian ini semua data dan informasi yang telah dikumpulkan diolah sedemikian rupa dengan menggunakan analisa deskriptif dan pengelompokkannya sesuai dengan kebutuhan penelitian sistem kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan ini.

Hasil pengolahan data tersebut diinterpretasikan dan dibandingkan dengan data/informasi sekunder yang diperoleh dari studi dokumentasi/kepustakaan yang diperlukan sebelumnya. Dengan demikian akan diperoleh kesimpulan yang akan dijadikan bahan dalam pembahasan dan rekomendasi penelitian.

1.4.6 Sistem Penulisan Laporan

Sistem penulisan laporan ini adalah didasarkan atas petunjuk yang disusun Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Pusat Jakarta dan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang diberikan secara khusus dalam pekan penataran tenaga peneliti/penulis kebudayaan daerah seluruh Indonesia yang telah diadakan sebelum penelitian ini berlangsung.

Sistem penulisan yang dipakai adalah sistem penulisan untuk suku-suku bangsa dengan mempedomani organisasi atau kerangka laporan sebagai berikut:

BAB I. P E N D A H U L U A N

- A. Masalah
- B. Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Pertanggung Jawa Ilmiah

BAB II. IDENTIFIKASI

- A. Lokasi
- B. Penduduk
- C. Sejarah Pemerintahan Desa
- D. Latar Belakang Sosial Budaya

BAB III. GAMBARAN UMUM KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN

- A. Organisasi Pemerintahan Desa
- B. Sistem Kepemimpinan

BAB IV. POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG SOSIAL

- A. Organisasi dalam Kehidupan Sosial
- B. Sistem Kepmimpinan
- C. Pengaruh dan Fungsi Kepemimpinan dalam Bidang Sosial dalam Masyarakat

BAB V. POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG EKONOMI

- A. Organisasi dalam Kegiatan Ekonomi
- B. Sistem Kepemimpinan
- C. Pengaruh dan Fungsi Kepemimpinan Bidang Ekonomi dalam Masyarakat

BAB VI. POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG AGAMA

- A. Organisasi dalam Kegiatan Keagamaan
- B. Sistem Kepemimpinan
- C. Pengaruh dan Fungsi Kepemimpinan Bidang Agama

BAB VII. POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG PENDIDIKAN

- A. Organisasi dalam Kegiatan Pendidikan
- B. Sistem Kepemimpinan
- C. Pengaruh dan Fungsi Kepemimpinan Bidang Pendidikan Dalam Masyarakat

BAB VIII. BEBERAPA ANALISA

- A. Pengaruh Kebudayaan terhadap Sistem Kepemimpinan di Pedesaan
- B. Sistem Kepemimpinan Pedesaan dengan Sistem Administrasi Politik Nasional
- C. Sistem Kepemimpinan Pedesaan dalam Pembangunan Nasional

BIBLIOGRAFI

LAMPIRAN

INDEKS

BAB II

IDENTIFIKASI

2.1 Lokasi

2.1.1 Letak Geografis.

Dobonsolo merupakan salah satu di antara dua kelurahan dan sebelas desa yang terletak di wilayah Kecamatan Sentani. Kelurahan Dobonsolo, terdiri Rukun Wilayah Yahim, Yobe dan Komba. Luas kelurahan Dobonsolo adalah = 3000 Ha. Secara astronomis, terletak pada garis $140^{\circ} 318'$ Bujur Timur dan $20^{\circ} 34'$ Lintang Selatan.

Sedangkan secara administratif, kelurahan ini berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara : dengan pegunungan Cyclop/Kelurahan Sentani Kota;
- b. Sebelah Selatan : dengan desa Ebubgfa;
- c. Sebelah Timur : dengan desa Ajau;
- d. Sebelah Barat : dengan desa Doyo.

Kampung Puai (Lokasi II) merupakan salah satu kampung yang letaknya terisolir di Desa Itakiwa. Desa ini terdiri dari dua kampung Ayapo (Ibu Kota Desa) dan kampung Puai sendiri. Luas lokasi II adalah = 1200 Ha. Secara astronomis, terletak pada garis $140^{\circ} 31'$ Bujur Timur dan $0,20^{\circ} 34'$ Lintang Selatan. Sedangkan secara administratif berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara : dengan Desa Yoka;
- b. Sebelah Selatan : dengan Kecamatan Arso;

- c. Sebelah Timur : dengan Kecamatan Abepura;
- d. Sebelah Barat : dengan Desa Ebubgfa.

Untuk jelasnya dapat dilihat pada peta.

2.1.2 Lingkungan Alam.

2.1.2.1 Keadaan Alam

Berdasarkan pembagian daerah iklim, daerah Irian Jaya umumnya termasuk lokasi penelitian, tergolong iklim tropik. Di dalam menentukan dasar mengenai iklim di kelurahan Dobonsolo dan kampung Puai, digunakan sistem klasifikasi menurut Schmidt dan Ferguson, dengan perbandingan banyak bulan kering dan bulan basah dikaitkan 100%.

$$\text{Rumus : } Q = \frac{\text{Jumlah Bulan Kering}}{\text{Jumlah Bulan Basah}} \times 100\%$$

Sistem klasifikasi menurut ke-dua Sarjana ini adalah :

Type A,	Q = 0	–	0,143
Type B,	Q = 0,143	–	0,333
Type C,	Q = 0,333	–	0,60
Type D,	Q = 0,60	–	1,00
Type E,	Q = 1,00	–	1,67
Type F,	Q = 1,67	–	3,00
Type G,	Q = 3,00	–	7,00
Type H,	Q = 7,00	–	ke atas.

Berdasarkan data banyaknya curah hujan di Kelurahan Dobonsolo dan kampung Puai (Tabel I – 1), jumlah bulan kering adalah 22 bulan dan bulan basah 60 bulan, sehingga :

$$Q = \frac{22}{60} \times 100\%$$

$$Q = 0,366.$$

Dengan demikian iklim di lokasi penelitian termasuk type C, dengan curahan hujan pada 1800 mm/tahun. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel curah hujan pada halaman berikut.

Dengan demikian pendistribusian curah hujan pun tidak merata atau normal, sehingga untuk menentukan curah hujan dalam tiap-

tiap bulan tidak menentu pula. Temperatur rata-rata berkisar 26°C.

Pada umumnya di daerah ini bertiup dua jenis angin, yaitu angin timur dan angin barat. Angin timur bertiup antara bulan April sampai bulan September. Pada tiupan angin ini kurang terjadi hujan sehingga jarang terjadi luapan air di sungai-sungai terutama di Danau Sentani. Sebaliknya angin Barat bertiup antara bulan Oktober/sampai bulan Maret. Berembusnya jenis angin ini disertai hujan yang cukup lebat menyebabkan peluapan air di sungai-sungai dan mengakibatkan banjir.

Selain kedua jenis angin di atas, secara rutin bertiup pula angin lokal, yaitu angin tenggara dan angin timur laut. Angin Tenggara berembus dari arah Selatan khatulistiwa yang dikenal dengan sebutan angin Darat. Angin Timur laut berembus dari sebelah Utara khatulistiwa.

Melihat keadaan geografis dan struktur tanah di kedua daerah (Kelurahan Dobonsolo dan kampung Puai) berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh F.A. Wenholt dalam bulan September 1932, mengklasifikasikan tanah-tanah di Hollandia, daerah Sentani dikategorikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu :

- a. Di sebelah Selatan pada umumnya terdiri dari tanah rawa dan di sana sini ditumbuhi pohon Sagu dan sebagian lagi ditumbuhi oleh pohon-pohon kecil alang-alang.
- b. Di sebelah Utara ditumbuhi pohon-pohon dan terdiri dari padang rumput yang luas. Struktur tanahnya termasuk tanah Coklat Merah.
- c. Di sebelah Barat, ditumbuhi pohon-pohon yang besar. Jenis hutannya termasuk hutan Hetrogen yang terdiri dari berjenis-jenis kayu-kayu seperti, *matoa*, kayu besi, kayu merah dan kayu gabus.

Sedangkan tanah di Kelurahan Dobonsolo pada umumnya terdiri dari tanah berwarna Abu-abu dan banyak mengandung pasir dan kerikil pada lapisan atasnya. Sering juga berwarna hitam karena banyak mengandung bahan organik dan merupakan tanah aluvial. Jenis tanah ini baik untuk dijadikan tanah pertanian.

2.1.2.2 Alam Flora

Melihat keadaan fisik kelurahan Dobonsolo pada umumnya merupakan dataran rendah yang ditumbuhi pohon-pohon kecil

dan dibumbuhi pohon-pohon Sagu yang merupakan makanan pokok penduduk di daerah ini. Pohon-pohon yang terdapat di daerah ini adalah matao, kayu gabus dan kayu besi. Disamping itu terdapat juga tanaman palawija yang diusahakan oleh penduduk setempat seperti; rambutan, nangka, nenas, pohon kelapa, belimbing, jeruk.

Adapun jenis flora yang terdapat di kampung Puai, keadaan daerah ini terletak di pinggiran Danau Sentani yang pada umumnya terdiri dari tanah rawa yang ditumbuhi oleh pohon Sagu. Semakin ke barat terdapat hutan lebat yang ditumbuhi berjenis-jenis pohon seperti kayu besi, kayu merah, matao, dan pohon cemara. Jenis pohon/tanaman yang diusahakan masyarakat dan bersifat ekonomis adalah pohon kelapa, jeruk, pohon piniang, belimbing dan nangka.

2.1.2.3 Alam Fauna

Satwa yang terdapat di kedua daerah ini termasuk satwa regional Australia. Jenis hewan berkantong seperti; kuskus (*koos-koos soorten phalangeriade*) dan tupai (*Larius insigna*).

Jenis unggas terdiri dari burung mambruk (*Goura conata*), merpati maleo besar (*Otidiphaps nobilis*), kakatua berjambul putih (*Cacatua alba*), kakatua raja (*Proboseiger aherimus*), kakatua berjambul merah (*Cacatua maluccensis*), burung tahun (*Aceros plecatus*), burung kasuari (*Hippalectryo*), burung maleo (*Megapodidum*), burung udang (*Alcyone*), burung bangau putih (*Ardea garzetta*), dan burung cenderawasih (*Paradisaea apoda*).

Selain itu terdapat kelas binatang reptiel adalah cecak, tokok kadal, biawak dan bermacam macam ular. Mengenai jenis-jenis binatang tersebut di atas, maka di daerah ini juga kaya akan kekayaan danaunya berupa ikan seperti; ikan mas, tawes, sepatsiam, ikan gabus, ikan sembilan dan ikan mujair.

Disamping binatang liar tersebut terdapat juga fauna piaraan yang diusahakan oleh penduduk setempat yaitu, babi, kambing, sapi, ayam, itik, anjing dan kucing. Kebanyakan penduduk di Kelurahan Dobonsolo juga mendapat kredit dari pihak Joint Development Foundation (JDF) berupa sapi. Ternyata dalam perkembangannya sampai sekarang ini sangat berkembang dengan baik.

2.1.3 Komunikasi

2.1.3.1 Prasarana

Dilihat dari letak geografi dan kondisi fisik lokasi, untuk lokasi pertama. Untuk masing-masing RW yang ada dihubungkan dengan jalan darat. Jalan ini masih berbentuk pengerasan dan sementara ini sudah bisa dilalui dengan kendaraan roda empat dan roda dua. Frekwensi pemakaian jalan ini relatif bertambah, karena di sana selain terdapat pasar (kecamatan Sentani) juga sebagai penghubung antara penduduk di tepian danau (Sentani barat) dengan daerah perkotaan (Sentani, Abepura dan Jayapura).

2.1.3.2 Sarana

Untuk lokasi pertanian, karena terletak dipinggiran kota kecamatan (Sentani) sehingga sarana (angkutan) seperti kendaraan roda empat dan roda dua sudah lama dikenal.

Sedangkan untuk lokasi II, akibat perletak jauh dari kota kecamatan, sehingga sarana yang dianggap ideal adalah perahu berbentuk kano (*khai-khai*). Selain transportasi jenis kecil ini (kano) sejak tahun 1981, dikembangkan motorisasi. Dilihat dari efisiensi dan efektivitas, justru jauh lebih baik alasannya, selain dari segi keselamatan terjamin, juga cepat tiba ditempat tujuan.

Trayek perjalanan Puai - Ayapo lima ratus rupiah (Rp 500,-) sedangkan Puai - Yako seribu rupiah (Rp 1000,-) sekali jalan. Sedangkan untuk charteran sekali jalan lima ribu rupiah (Rp 5000,-)

Sementara ini antara Yoka - Puai sedang dibangun sebuah jalan bentuk padat karya. Diharapkan dengan seledainya jalan ini, akan memudahkan termasuk mempercepat tiba ketempat tujuan.

2.1.4 Pola Perkampungan

Letak Perumahan penduduk dikelurahan Dobonsolo memanjang mengikuti jalan desa. Rumah-rumah ini tidak mengelompok berdasarkan keret tetapi berdasarkan urutan pindahan dari kampung semila, dengan kampung Yahim sebagai pusat kegiatan Pemerintahan desa.

Bentuk rumah penduduk, meliputi : (1) Tradisional, (2) Semi permanen dan (3) Permanen.

Bentuk tradisional, yaitu bangunan terbuat dari bahan-bahan setempat seperti, *gaga*, atap dari daun rumbiah dan dalam bentuk rumah panggung (rumah-rumah memakai tian). Tian yang di-

pergunakan oleh penduduk setempat untuk bangunan tersebut adalah berasal dari *kayu suan*. Jenis kahu ini hanya terdapat di beberapa daerah tertentu seperti kampung Harapan, Waena, Puai. Bentuk ruma seni permanent, yaitu atapnya terbuat dari seng, sedangkan dindingnya dari *gaba* dan dalam bentuk rumah panggung (rumah memakai tiang). Tujuan bentuk rumah ini adalah untuk menghindari dari bahaya banjir, karena lokasinya terletak dipinggir sungai, dan takut akan gangguan-gangguan seperti ular, pencuri dan penjahat. Bentuk rumah seperti ini terikat kepada pada bentuk rumah pada zaman perng suku dahulu. Penghuni-nya lebih dari satu keluarga (hidup kolektif) Bentuk rumah permanent type ini hanya sekitar 20 %.

Puai merupakan kampung yang letak ditepi danau Sentani, dengan pola perkempungan memanjang mengintari dari arah Timur ke Barat. Rumah-rumah dikampung ini mengelompok menurut marga/*keret* yang ada, yaitu Feabetau, Awaitau dan Mimitau. Selain itu terdapat keret Doyape, Kalembolo, Mahue, Felle, Kabei.

Menurut bentuknya, rumah penduduk dikelompokkan ke dalam tradisional, seni permenet dan permanent. Rumah-rumah penduduk pada umumnya dibangun ditepian danau dan dalam bentuk panggung (rumah memakai tiang).

Menurut bentuknya, rumah penduduk dikelompokkan ke dalam tradisional, seni permanent dan permanent. Rumah-rumah pada umumnya dibangun di tepian danau dan dalam bentuk panggung (rumah memakai tiang).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :

2.2. Penduduk

Berdasarkan data di lapangan menunjukkan bahwa penduduk di kelurahan Dobonsolo, berjumlah 1266 orang (213 KK), terdiri dari laki-laki sebanyak 664 orang, sedang perempuan sebanyak 602 orang untuk jelas, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Jumlah Penduduk di Kelurahan Dobonsolo,
Kecamatan Sentani (Oktober 1984).

No.	Lingkungan	U m u r	Jenis Kelamin		
			Pria	Wanita	Jumlah
1.	Y a h i m	0 - 5	97	77	174
		6 - 10	51	58	109
		11 - 15	41	37	78
		16 - 20	52	53	105
		21 - 25	79	59	138
		26 - 30	40	11	33
		31 - 35	22	11	33
		36 - 40	11	10	21
		41 - 45	6	5	11
		46 - 50	4	3	7
		51 ke atas	2	2	4
2.	Y o b e h	0 - 5	14	12	26
		6 - 10	8	12	20
		11 - 15	12	13	25
		16 - 20	13	8	21
		21 - 25	19	11	30
		26 - 30	5	6	11
		31 - 35	9	9	18
		36 - 40	10	17	27
		41 - 45	4	3	8
		46 - 50	5	3	8
		51 ke atas	2	2	4
3.	K o m b a	0 - 5	25	32	57
		6 - 10	31	19	50
		11 - 15	16	13	29
		16 - 20	17	24	41
		21 - 25	21	19	40
		26 - 30	18	19	37
		31 - 35	21	18	39
		36 - 40	5	7	12
		41 - 45	2	1	3
		46 - 50	2	2	4
		51 ke atas	-	-	-
J u m l a h			664	602	1266

Dari data yang sempat di angkat dilapangan, penduduk di lokasi II (kampung Puai) berjumlah 274 jiwa (49 KK), dengan perincian laki-laki sebanyak 162 orang dan perempuan sebanyak 112 orang. Untuk jelas, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.
Jumlah Penduduk Menurut Umur Di Kampung Puai,
Desa Ita Kiwa, Kecamatan Sentani

No.	U m u r	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	0 – 4	21	18	39
2.	13 – 14	40	2	60
3.	15 – 24	23	17	40
4.	25 – 34	25	21	46
5.	35 – 44	23	12	35
6.	45 – 54	16	13	29
7.	55 keatas	14	11	25
	Jumlah	162	112	274

Sumber data : Pengolahan data primer.

2. Jumlah Penduduk Menurut Angkatan Kerja.

Jumlah penduduk dilihat dari angkatan kerja; untuk lokasi I sebagai berikut:

- usia non produktif (0 – 15 tahun) sebanyak 644 jiwa
- usia produktif (16 – 54 tahun) sebanyak 611 jiwa
- usia tidak produktif (55 ke atas) sebanyak 35 jiwa

Untuk lokasi II, sebagai berikut:

- usia non produktif (0 – 14 tahun) sebanyak 99 jiwa.
- usia produktif (15 – 54 tahun) sebanyak 150 jiwa
- usia tidak produktif (55 ke atas) sebanyak 25 jiwa.

3). Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan.

Dari data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa untuk penduduk lokasi I yang bersekolah sebanyak 176 orang;

dengan perhitungan tamatan SD sebanyak 123 orang (69,89 %), SLTP sebanyak 32 orang (18,18 %), SLTA sebanyak 19 orang (10,80 %) dan Perguruan Tinggi sebanyak 2 orang (1,14 %). Untuk jelas, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3
Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan di
Kelurahan Dobonsolo.

Lingkungan	SD	SLTP	SLTA	PT/Ak.	Jumlah
	L' P	L' P	L' P	L' P	
Y a h i m	44 49	13 9	14 3	--	132
Y o b e h	--	3 4	1 1	--	9
K o m b a	15 15	1 2	--	1 1	35
J u m l a h	59 64	17 15	15 4	1 1	176

Sumber data : Kantor Kelurahan Dobonsolo, Kecamatan Sentani.

Untuk lokasi II, yang sempat bersekolah/menyelesaikan pendidikannya sebanyak 75 orang (28,5%); dengan perhitungan tamatan SD sebanyak 45 orang (60 %), SLTP 20 orang (26,67%), SLTA 8 orang (10,67%) dan Perguruan Tinggi/Akademi sebanyak 2 orang (2,66%).

Untuk jelasnya, dapat dilihat pada tabel halaman berikut.

Tabel 4
Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan di kampung
Puai, Desa Itakiwa

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4
SD	30	15	45
SLTP	15	5	20

1	2	3	4
S L T A	5	3	8
P T / Ak.	2	—	2
J u m l a h	52	23	75

Sumber data : Kantor Desa Itakiwa, Kecamatan Sentani.

b. Penyebaran Penduduk.

Lokasi pemukiman penduduk di Kelurahan Dobonsolo seluas 45 Ha. Dengan demikian, dari jumlah penduduk sebanyak 1303 jiwa diperkirakan bahwa kepadatan penduduk disana sekitar 28,96 jiwa/Ha. Apabila kepadatan penduduk diperhitungkan secara efektif dari luas masing-masing lingkungan yang ada, terdapat variasi. Untuk lingkungan Yahim, dengan luas wilayah (30 Ha), diperkirakan kepadatan penduduk disana sekitar 27,67 Sedangkan unuk lingkungan Yobe (10 Ha) dan Komba (5 Ha), dengan jumlah penduduk masing-masing 157 orang (untuk Yobe) dan 256 orang (untuk Komba), diperkirakan kepadatnn penduduk unuk kedua lingkungan ini sekitar 15,7 jiwa/Ha (Yobe) dan 51,2 jiwa/Ha (Komba).

Beda dengan Lokasi I (Dobonsolo), kondisi fisik lokasi kampung Puai (Lokasi II) terletak mengitari tepian danau, dengan jarak jangkau panjang = 500 meter dan lebar = 10 meter. Dengan jumlah penduduk 109 jiwa, diperkirakan kepadatan penduduk sekitar.

Sebetulnya kampung ini mempunyai daerah (areal) yang cukup luas, hanya saja belum dimanfaatkan secara baik. Dari pihak Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya sedang merencanakan untuk menjadikan sebagai daerah transmigrasi. Langkah awal yang ditempuh yaitu dengan membuka jalan antara desa Yoka dengan kampung ini. Diperkirakan jalan ini selesai pada tahun 1987, selanjutnya dengan penempatan para transmigran luar Irian Jaya (khususnya asal Jawa) dan transmigran lokal asal kampung Puai dan Ayapo.

c. Jenis Penduduk.

Dilihat dari etnis (suku bangsa), untuk lokasi I terdapat : (1) penduduk setempat (pribumi), (2) Transmigran (asal Jawa Tengah) dan (3) Sulawesi Selatan.

Untuk penduduk setempat, mulanya adalah pindahan dari pulau Yobeh (pulau di tengah danau Sentani) dan dari pantai Yahim. Setelah "dimukimkan" dari pulau Yobeh (1979) sebagian memilih tinggal di Komba bergabung dengan Transmigran. Jumlah penduduk menunjukkan, untuk penduduk asli sebanyak 189 orang (73,83%) dan transmigran sebanyak 67 orang (26,17%). Untuk penduduk yang dimukimkan asal Yobeh, berasal dari Suku Falle, Kallem dan Sokoi.

Kemudian untuk penduduk lingkungan Yobeh, merupakan sebagian penduduk yang tidak mau dimukimkan, dan ingin tetap bertahan disana (pulau). Merupakan sisa dari Suku Fille, Kallem dan Sokoi. Dan untuk penduduk di lingkungan Yahim, merupakan gabungan dari penduduk pindahan dari pantai Yakim (tepi danau) dan penduduk asal Sulawesi Selatan. Penduduk setempat sebanyak 549 jiwa (66,14%). Asal dari suku : Felle, Pangkali, Kallem, Sokoi dan Maloali. Sedangkan asal Sulawesi Selatan, terutama Suku Bugis berjumlah 281 jiwa (33,86 %). Mereka ini bergerak di bidang usaha, seperti : Kios, pertanian bawang merah dan penggergajian kayu.

Tabel 5
Mutasi Penduduk Di Kelurahan Dobonsolo Tahun 1984

Lingkungan	Lahir		Mati		Datang		Pindah		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	L	P	
Y a h i m	12	16	4	7	22	18	7	8	94
Y o b e h	7	6	6	2	-	-	-	-	21
K o m b a	11	10	5	1	-	-	-	-	27
J u m l a h	30	32	15	10	22	18	7	8	142

Sumber data : Kantor Kelurahan Dobonsolo, Kecamatan Sentani.

Dilihat dari etnis, untuk lokasi II hanya terdapat : (1) Penduduk asli (pribumi) dan (2) pindahan asal Danau Sentani. Untuk penduduk asli terdiri dari 86 orang, Sedangkan penduduk pendatang berjumlah 188 orang. Penduduk asli terdiri dari suku-suku yang ada, Awaitingatauw, Fiebetauw, Mimitauw dan Wahejar. Sedangkan penduduk pendatang terdiri dari Deda, (sentani timur), Tokoro (sentani tengah), Kabei (sentani tengah), Kalembulu (sentani tengah) dan Doyapo (sentani tengah). Perpindahan ini disebabkan karena akibat kawin masuk, sehingga mereka memilih berempat tinggal di puai. Selain itu disebabkan karena dulu akibat kalah dalam perang dan (penangkapan budak), dijadikan sebagai pampasan perang yang sampai sekarang belum ditebus oleh sukunya.

Selain itu disana, tiga orang merupakan pendatang dari : dua dari kabupaten Fakfak (kimana) dan satu dari Ujung Pandang.

2.3. Sejarah Pemerintahan Desa

Berbicara tentang Pemerintahan Desa yang ada di masing-masing lokasi, tentunya perlu ditelusuri kesejarahannya. Mengapa demikian? Diharapkan dengan mengetahui faktor ini, barangkali bisa memberi acuan pikir tentang periodisasi dari masing-masing pelaku sejarah yang pernah dan memang berkuasa pada waktu itu.

2.3.1 Asal Usul Desa

Dilihat dari periodisasi sejarah lokal, sebetulnya kedua lokasi masing-masing mempunyai kesamaan (sejarah) dalam hal menentukan siapa sebetulnya sebagai pemimpin. Dari mitos, masyarakat asal danau Sentani, sebetulnya datang dari arah timur (*Vanimio*)¹. Setelah tiba di tepian danau (sebelah timur danau), mereka tersebar, ada yang memilih tinggal Sentani Timur (Yoka, Ayapo dan Puai), ada yang ke Sentani Tengah (Ifale, Puyo, Abar, Ifar Besar, Ifar Kecil, Ajau) dan sisanya memilih bertempat tinggal di Sentani Barat (Kwadeware, Donday, Sosiri, Yakonde, Doyo).

Barangkali tidak bisa diingkari bahwa selama "para imigran" mencari daerah-daerah baru, terkadang terjadi ketegangan, konflik dengan penduduk asli (setempat). Akibat pembauran ini secara

langsung maupun tidak langsung mempersoalkan siapa sebetulnya penguasa tertinggi. Dari mitor, biasanya yang melakukan petualangan berbentuk sekelompok orang, yang diorganisir secara baik. Di dalamnya bisa dijumpai siapa pemimpin, perangkat-perangkat yang membidangi tugas-tugas tertentu, tua-tua adat, anggota masyarakat/keluarga termasuk budak-budak yang kalah akibat perang suku.

Data dilapangan menunjukkan bahwa umumnya masyarakat danau Sentani sejak dahulu sudah mengenal secara baik organisasi sosial yang disebut dengan Pemerintahan Tradisional/Adat, dengan *Ondoafi* sebagai penguasa tertinggi. Hanya saja untuk sebutan *Ondoafi* untuk kedua lokasi, terdapat sedikit perbedaan karena pengaruh dialek. Untuk lokasi I disebut dengan *Ondoforo* sedangkan lokasi II *Ondofolo*.

Masing-masing *Ondoafi* mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang cukup luas baik itu mencakup hutan, kebun dan perairan danau (kanipughla). Pemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Kepengurusan *Ondoafi* didalam mekanisme kehidupan politik masyarakat setempat tersebar kedalam urusan staf dan urusan fungsional.

Urusan staf ditangani oleh pembantu/sayap kanan dan sayap kiri (*Abu Ala*), pesuruh pribadi *Ondoafi* (*Abu Agkho*) dan tungku (*Aranggae*)². Urusan fungsional, ditangani oleh kepala-kepala suku (*Kotelo*)

Realisasi dari urusan-urusan staf biasanya terlihat dalam bentuk: memberi saran, nasihat dan pertimbangan kepada *Ondoafi* baik diminta ataupun tidak; mewakili *Ondoafi* dalam pertemuan-pertemuan (adat) di luar wilayah kekuasaannya; memimpin ritus-ritus tradisional, memimpin upacara pelantikan *Ondoafi* (baru), menyimpan kekayaan *Ondoafi*. Sedangkan realisasi pelaksanaan urusan-urusan yang bersifat fungsional, tercurah ke dalam kewenangan *Kotelo*. Dan sebetulnya, hal-hal yang menyangkut kewenangan suku/klan adalah urusan *Kotelo*.

Di dalam hal pergantian kepemimpinan (*Ondoafi* ataupun satuan-satuan di bawahnya), biasanya yang ditunjuk berdasarkan prinsip senioritas. Dalam arti setiap anak tertua (khususnya laki-laki) mempunyai peluang yang paling besar untuk tampil sebagai pengganti.

2.3.2 Periode Penjajahan Belanda.

Selain pemerintahan adat/tradisional, pada kurun waktu jajahan Belanda, di kedua lokasi ini terdapat pemerintahan kampung. Sebagai kepala pemerintahan dikenal dengan *Korano*, dibantu dengan seorang *Mandor*. Adapun tugas Korano hanya terbatas pada urusan-urusan yang bersifat pembangunan dan administratif. Sepanjang urusan adat yang memang menyangkut perdata maupun pidana, biasanya diselesaikan bersama antara pihak Ondoafi dan Karono.

Penyelesaian urusan-urusan yang mengalami jalan buntu dan memang harus diselesaikan oleh pihak atas, diteruskan ke Onder Disterik Selanjutnya secara vertikal diteruskan ke Onder Afdelling yang dipimpin oleh *Controleur*.

Berbeda dengan kepengurusan Pemerintahan Adat/Tradisional, dalam pergantian pimpinan biasanya dipilih. Mekanisme pelaksanaan, diawali dengan penunjukan calon, kemudian dipilih. Suara terbanyaklah yang punya kesempatan untuk memangku jabatan Korano. Akan tetapi untuk tetap menjaga kestabilan dan kewibawaan Pemerintah Hindia Belanda, cenderung untuk jabatan Korano dipercayakan kepada Ondoafi. Hal ini dimaksudkan selain dimata masyarakatnya sudah mendapat pengakuan sebagai junjungannya, diharapkan dengan keterlibatannya dalam tubuh pemerintahan kampung, masyarakat semakin patuh untuk melaksanakan semua program-program yang berasal dari pihak Pemerintah Belanda.

2.3.3 Periode Penjajahan Jepang

Pada periode ini, tidaklah terjadi perubahan secara drastis dalam tubuh pemerintahan kampung. Hal ini disebabkan karena kehadiran tentara Nippon di Jayapura khususnya danau Sentani adalah mengkonsolidasi kekuatan untuk perang lawan Sekutu. Dengan demikian struktur pemerintahan kampung ala Pemerintahan Belanda tetap dikembangkan. Demikian halnya dengan pelaksanaan tugas, dalam hal Korano dan Mandor, pilihan tetap tercurah pada merka yang dianggap berasal dari keturunan Ondoafi.

Hanya saja situasi pada waktu itu adalah perang, sehingga kehadiran tentara Jepang benar-benar membuat masyarakat setempat

menjadi takut. Setiap perintah yang disampaikan lewat Korano dan Mandor harus dilaksanakan, tanpa pandang bulu. Tentara Jepang untuk masyarakat Sentani diidentik dengan manusia berperawakan kasar dan kejam.

2.3.4 Periode Peralihan (Trikora)

Kebalinya Irian Barat (red. Irian Jaya) ke pangkuan ibu pertiwi, ternyata belum terjadi perubahan dalam sistem politik di tingkat kampung. Hal ini disebabkan karena di masing-masing daerah/wilayah di seluruh Indonesia, tiap-tiap kampung/desa mempunyai bentuk pemerintahan yang tetap diakui sebagai penguasa tertinggi. Repotnya lagi, sebutan untuk penguasa itu beranekaragam. Hal ini cukup menyulitkan Pemerintah Pusat segera merumuskan nama yang dapat menjangkau dan dipakai sebagai pedoman bagi seluruh kampung-kampung yang ada.

Pada periode ini, pejabat yang ada (semasa jajahan Jepang) tetap masih dipercayakan untuk jabatan Korano dan Mandor. Hanya saja untuk mempercepat masyarakat untuk menerima kehadiran Republik Indonesia, tentunya aparat dituntut bekerja keras dalam hal memperkenalkan program pembangunan yang ada.

Sebutan Korano diganti menjadi Kepala Pemerintah Kampung (KPK) Membidangi tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Ada suatu hal yang menarik untuk diangkat dalam tulisan ini yaitu tentang kewibawaan. Kalau pada periode jajahan Belanda dan Jepang, Korano dianggap sebagai orang yang ditakuti dan disegani. Apa yang dikatakan, adalah pantang kalau tidak dituruti. Akan tetapi pada periode peralihan, kelihatannya mulai berangsur-angsur pudar. Barangkali disebabkan karena kehidupan masyarakat yang semakin demokratis, di mana sistem dan aparat yang ada adalah oleh, dari dan untuk masyarakat setempat.

2.3.5 Periode Pembentukan Desa Administratif

Pada periode-periode sebelumnya, untuk masing-masing kampung dipimpin oleh kepala kampung ditambah seorang mandor. Akan tetapi untuk menyeragamkan sistem dan struktur pemerintahan di seluruh Indonesia, terutama ditingkat desa segera dibentuk pemerintahan desa sebagai unit pemerintahan terendah, dengan kepala desa sebagai pimpinannya.

Untuk Daerah Tingkat I Irian Jaya, pelaksanaan pembentukan desa diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 21/GIJ/1974. Selanjutnya, untuk pembentukan desa-desa di wilayah kekuasaan Daerah Tingkat II Kabupaten Jayapura, lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nomor 20/KPTS/Pem/1974.

Pada dasarnya desa-desa di Daerah Tingkat II Jayapura dikategorikan ke dalam cara pembentukan penggabungan administratif. Untuk lokasi I (Kelurahan Dobonsolo) secara fisik terdiri dari tiga kampung, akan tetapi karena letaknya berdekatan, sehingga secara administratif digabung jadi satu dengan Yahim sebagai ibu kota. Demikian halnya dengan lokasi II (kampung Puai), secara fisik letaknya agak berdekatan dengan kampung Ayapo, dan untuk memudahkan urusan-urusan pemerintahan dan pembangunan digabung jadi satu dengan Ayapo.

Nampaknya, sejak pelaksanaan Pelita (Pembangunan Lima Tahun) tiap desa dibutuhkan keikutsertaan (partisipasi). Dan partisipasi itu tidak hanya terbatas pada masyarakat desa tetapi kesiapan dan ketanggapan perangkat-perangkat desa merupakan faktor penentu pula. Langkah awal yang perlu ditempuh adalah menentukan perangkat-perangkat ke dalam struktur organisasi yang ada. Seperti pada penjelasan sebelum bahwa pembangunan yang sementara dicanangkan oleh Pemerintah khususnya pembangunan di tingkat desa sifatnya kompleks; menyangkut seluruh totalitas kehidupan dan penghidupan masyarakat. Adalah tidak mungkin apabila mekanisme kehidupan politik (sistem) yang ada tidak bisa menunjang. Dengan demikian lembaga dan sistem yang ada harus ditata dalam arti dirasionalisasikan, disesuaikan dengan mekanisme kehidupan politik Nasional (UU Nomor 5 Tahun 1979).

Dari struktur pemerintahan desa, terlihat bahwa yang namanya Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa. Kepala Desa itu sendiri secara garis staf membawahi sejumlah perangkat dengan bidang tugas yang sesuai dengan keahlian. Kemudian secara garis komando membawahi sejumlah ketua rukun wilayah dan ketua rukun tetangga. Untuk perangkat yang terakhir ini dalam hal mempertanggungjawabkan tugas dan kewajibannya itu dilakukan secara bertingkat. Kemudian untuk Lembaga Musyawarah Desa; pada prinsipnya merupakan wadah penyalur aspirasi masyarakat, mempunyai posisi yang cukup pen-

ting di dalam menentukan policy tingkat desa. Keanggotaan dari lembaga ini terdiri dari kepala desa dan sekretaris desa karena jabatannya (ex-officio) sebagai ketua dan sekretaris Lembaga Musyawarah Desa, ditambah dengan tokoh-tokoh masyarakat, kaum cendekiawan dan golongan adat sebanyak lima sampai dengan tujuh orang. Mengenai bagan struktur organisasi pemerintahan desa, dapat dilihat pada halaman berikut.

2.4 Latar Belakang Sosial Budaya

Seperti telah disinggung sebelumnya, bahwa masyarakat yang sementara bermukim di kedua lokasi penelitian, umumnya bukan penduduk asli/setempat. Dilihat dari budaya migrasi, mereka datang dari arah timur (Ponom). Catatan untuk lokasi I, setelah kembali ke Republik Indonesia, di sana sementara ini banyak dijumpai penduduk asal Jawa (Transmigran) dan penduduk asal Sulawesi Selatan (pedagang). Kemudian, untuk mengecek penduduk asli, rasanya sulit sekali. Dari wawancara dengan beberapa anggota masyarakat, katanya kalau sekarang disuruh untuk menghitung penduduk asli, barangkali itu dapat dihitung dengan jari dalam artian relatif sedikit. Hal ini dikarenakan akibat kawin keluar marga/klan dan keterbatasan jumlah jiwa.

Perlu diketahui bahwa sekalipun oleh pemerintah telah memperkenalkan unsur administrasi pusat lewat desa sebagai unit pemerintahan terendah, akan tetapi itu bukan berarti bahwa akan mengurangi pengakuan masyarakat terhadap unsur yang memang lama telah ada di sana (tradisional/adat). Nampaknya dari pengamatan lapangan menemukan bahwa kedua lembaga ini hidup berdampingan. Sepanjang urusan-urusan atau hal-hal yang menyangkut adat-istiadat itu kewenangan Ondoafi dan perangkat-perangkatnya. Demikian halnya dengan pemerintahan desa; sepanjang hal-hal yang menyangkut kewenangan pembangunan desa dan pemerintahan, itu ditangani oleh kepala desa dan stafnya. Akan tetapi jangan lupa bahwa sepanjang urusan-urusan pembangunan itu menyangkut dan menyentuh kepentingan masyarakat (dalam arti luas) biasanya dalam hal penyelesaian, dari pihak adat dimintai pendapat. Dan untuk mengambil keputusanpun Ondoafi harus meminta pendapat dan saran kepada dewan adat (tingkat marga/klan).

2.4.1 Kolektifa dan Elite-Elite Desa

Berbicara tentang kolektive dan elite-elite desa, untuk kedua lokasi penelitian, sebetulnya tidak terlalu kompleks bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Barangkali ini disebabkan karena keadaan tingkat pendidikan yang belum menonjol dan juga masih "terasa" pengaruh dari kelompok adat/tradisional.

Dari data dan pegalaman di lapangan, sebetulnya untuk menentukan kolektive dan elite-elite desa barangkali hanya terpaut pada tiga kelompok, masing-masing: (1) kelompok adat/tradisional, (2) kelompok rohaniwan dan (3) kelompok cendekiawan/cerdik pandai.

Untuk lokasi I, barangkali karena terletak berdekatan dengan ibu kota Kecamatan, banyak perubahan yang menerobos masuk; baik itu di bidang sosial politik, sosial ekonomi dan sosial budaya. Khusus untuk RW. Komba dan Yahim, kelompok yang punya pengaruh paling menonjol adalah rohaniwan dan cendekiawan. Barangkali sebagai catatan bahwa untuk jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Tingkat Irian Jaya, justeru berasal dari kedua lokasi ini. Sedangkan untuk RW Yobeh, yang punya pengaruh paling menonjol adalah kelompok adat/tradisional dan rohaniwan. Hal ini dikarenakan RW ini semula merupakan tempat tinggal baik RW Yahim, RW Komba dan RW Yobeh sendiri. Akan tetapi akibat pemukiman penduduk ke darat, ada penduduk yang cenderung memilih Komba dan Yahim sebagai pemukiman kemudian. Dengan demikian barangkali yang sementara ini yang punya pengaruh paling menonjol di sana adalah kelompok adat/tradisional dan rohaniwan.

Seperti halnya dengan RW terakhir (Yobeh), di lokasi II (kampung Puai) dari data dan pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa di sana kelompok adat/tradisional punya pengaruh yang besar sekali. Dalam keikutsertaan pada program pembangunan tingkat kampung, biasanya orang pertama yang dimintai pendapat adalah kelompok ini. Barangkali karena hubungan keterikatan antara – Ondoafi dengan masyarakat –, yang sudah semakin menyatu, sehingga adalah sulit kalau di dalam hal merumuskan program pembangunan, dari pihak Ondoafi tidak dilibatkan malah sebagai pengambil keputusan. Kelompok berikut adalah dari pihak rohaniawan/gereja.

2.4.2 Stratifikasi Sosial

Berbicara tentang stratifikasi sosial atau lapisan sosial, sebetulnya adalah menarik untuk mengangkat lebih awal struktur kehidupan masyarakat di kedua lokasi penelitian. Secara ideal masyarakat di daerah ini barangkali masih dikategorikan sebagai masyarakat agraris tradisional, di mana semua kebutuhan konsumtif masih disediakan oleh alam sekitar, sehingga orientasi pandang kepada "*Ondoafi sentris*" masih merupakan benang merah. Ondoafi sentris tidak saja terbatas lapangan politik (wibawa tradisional) tetapi juga menguak masuk ke kehidupan sosial ekonomi. (*patron-client relationship = terarokherare-akharong*).

Peluang untuk mobilitas sosial (vertikal) sebagai strategic elit, sebetulnya kelompok merdeka punya peluang yang cukup besar. Hanya saja akibat ikatan-ikatan *patrimonial* yang sengaja dibuat oleh kelompok Ondoafi justru merupakan penghalang. Barangkali jatah sebagai anggota dewan adat (*arranggaé*) saja. Akan tetapi dalam proses perkawinan, sebetulnya barrier ini bisa diatasi. Hanya saja anak yang diperoleh (laki-laki), sekalipun ibunya dari keturunan Ondoafi, tidak punya hak "kesulungan" untuk tampil sebagai *Ondoafi*. Untuk kelompok terakhir, rasanya agak sulit untuk melakukan mobilitas sosial (vertikal). Oleh karena tugas mereka (secara adat) tidak lebih dari mengurus dan melayani Ondoafi. Untuk perkawinan, akibat pengaruh di bidang pendidikan, rasanya dari keluarga kelompok yang terakhir bisa kawin dengan kelompok merdeka dan Ondoafi.

Dengan semakin berkembangnya pendidikan di danau Sentani, khususnya di lokasi penelitian ada semacam kecenderungan untuk menentukan strategic elit bukan dari lapisan di mana dia berasal, akan tetapi dilihat dari ijazah pendidikan yang dimiliki. Di sini terlihat ada semacam persaingan (sehat) dari kelompok Ondoafi dan lapisan di bawahnya. Malah untuk jabatan kelurahan Dobonsolo, dijabat oleh kelompok Ondoafi. Sedangkan untuk jabatan kepala desa Itakiwa, justru bukan dari kelompok Ondoafi, akan tetapi dari kelompok merdeka (suku Puhili). Jadi di sini terlihat ada semacam persaingan untuk pejabat kepala desa atau ketua RW dan RT, pilihan tidak saja harus dari kelompok Ondoafi. Siapa saja asal memenuhi persyaratan formal yang ditentukan oleh pihak supra-village. Sebaliknya untuk jabatan dalam struktur organisasi tradisional, rasanya sulit sekali untuk melakukan mobilitas sosial.

Konsep ini sejak pemerintahan Hindia Belanda, termasuk pendudukan tentara Jepang, ikut mewarnai percaturan politik tingkat lokal. Terkadang dalam hal proses pergantian pejabat (formal) dan juga untuk tetap menjaga wibawa pemerintah di mata masyarakat, cenderung untuk secara berturut-turut memberi kepercayaan kepada Ondoafi.

Dilihat dari kehidupan politik (tradisional), struktur kehidupan masyarakat dibedakan ke dalam: (1) kelompok Ondoafi, (2) kelompok penduduk asli (pribumi) dan (3) masyarakat biasa (*ro-mie*). Kelompok pertama sebetulnya merupakan elite tradisional. Mempunyai kewenangan yang cukup luas. Barangkali fitrat *kanipughla* (hutan, kebun dan perairan) merupakan indikator bahwa kelompok ini memang menguasai hajat hidup orang banyak, di mana penguasaannya untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Kelompok kedua, lebih banyak diidentik dengan orang merdeka, dalam arti tidak bisa diperintah baik oleh kelompok pertama maupun yang terakhir. Hal ini dikarenakan, kalau dilihat asal, sebetulnya merekalah orang pertama yang memang mendiami daerah itu. Kehadiran kelompok sebagai Ondoafi, sebetulnya tidak lebih dari suatu permufakatan saja. Di dalam proses pengambilan keputusan, mereka punya hak suara yang wajar diperhatikan sekali oleh pihak Ondoafi. Di dalam dewan adat tingkat Ondoafi, mereka sebagai anggota dan punya *bargainning of position* yang cukup kuat. Kelompok terakhir biasanya terdiri dari orang-orang yang kalah perang (akibat penangkapan budak) maupun yang menghambakan diri karena kondisi sosial ekonomi tidak memungkinkan untuk *survival*. Biasanya mereka ini menghambakan diri kepada pihak Ondoafi.

2.4.3 Sistem Kekerabatan

Hubungan kekerabatan di sana, nampaknya terjalin secara luas. Hal ini dikuatkan dengan garis keturunan yang bersifat *bilateral*, di mana seorang secara bersama-sama memiliki warga kekerabatan menurut garis keturunan menurut ayah demikian juga menurut garis keturunan ibu. Selain itu hubungan yang terjalin akibat perkawinan dapat memperluas hubungan kekerabatan. Orang sering mengaku keluarga lain sebagai familinya, karena antara anggota keluarga dengan keluarga lain terjadi kawin mawin.

Perkawinan yang dianggap ideal (prefence) adalah perkawinan sepupu dua kali atau sepupu tiga kali. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di sana cenderung untuk melakukan perkawinan endogamus kerabat. Alasan perkawinan seperti itu (secara adat) karena "bukan orang lain", sehingga kemungkinan bertengkar itu jarang terjadi. Selain itu untuk merapatkan kembali "nyala api yang semakin padam". Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa perkawinan di luar kerabat itu tidak dilakukan. Perkawinan semacam ini juga dijumpai di sana, di mana alasan perkawinan itu disebabkan karena dulunya yang bersangkutan pernah bertugas di daerah tersebut.

Dalam hal sapaan (terms of adress), terutama dilihat dari perbedaan usia, ada istilah-istilah kekerabatan tertentu yang sering digunakan. Terhadap yang lebih tua (sudah kawin) untuk laki-laki disapa dengan *Atai*, sedangkan untuk perempuan *Ana*. Untuk anak-anak laki-laki sampai usia belum kawin di depan namanya di sapa dengan *Kelufa*, sedangkan untuk perempuan disapa dengan *Menggerfa*. Untuk anak-anak kecil (baik laki-laki atau perempuan) disapa dengan *Fa kending*.

Perkawinan antara anggota kerabat sendiri menumbuhkan hubungan kekerabatan yang sedemikian luasnya, dan ini ditambah dengan sistem kekerabatan yang bersifat bilateral menyebabkan tali temali hubungan kekerabatan yang berantai tak terputus. Dan itulah yang menyebabkan dalam satu kampung terdiri dari satu rumpun keluarga.

2.4.4 Sistem Ekonomi

Perbedaan pokok tentang sistem ekonomi antara masyarakat RW II Puai dengan masyarakat di kelurahan Dobonsolo adalah adanya ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap sektor lapangan hidup yang ada di kedua lokasi penelitian ini. Pada masyarakat di RW II Puai, lebih banyak bergerak di sektor pertanian. Dalam artian sektor ini, lebih banyak dilihat ke sistem berladang berpindah-pindah (*shifting cultivation*). Termasuk pula kegiatan penangkapan ikan di tepian danau. Bila dibandingkan dengan sektor berkebun, justeru penangkapan ikan merupakan salah satu masukan yang berarti dalam memenuhi kebutuhan atau keperluan sehari-hari. Sedangkan hasil kebun, umumnya untuk dikonsumsi secara habis.

Pemasaran hasil, dilakukan ke pasar Sentani, Abepuradan Jayapura. Masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat adalah sarana transportasi. Akibat terbatasnya sarana transportasi yang ada, dibantu dengan kapal motor "Simavi" (milik Suster Belanda di Joka). Dan sebetulnya jasa angkutan ini hanya bertujuan "memberi pelayanan terhadap orang-orang sakit". Akan tetapi melihat sulitnya alat transportasi, sehingga atas persetujuan bersama, juga dipakai oleh masyarakat Puai. Frekuensi kunjungan jasa angkutan hanya terbatas pada hari-hari pasar tertentu, yaitu Rabu dan Sabtu, dengan trayek Yoka – Puai pulang pergi.

Seperti halnya dengan masyarakat Puai, masyarakat di kelurahan Dobonsolo, masih terbatas pada/di kegiatan bercocok tanam dan menangkap ikan (di tepian danau). Hanya saja, khusus yang berada di lingkungan Komba, intensifikasi pertanian jauh lebih baik bila dibandingkan dengan dua lingkungan lainnya. Hal ini dikarenakan justeru penduduk itu "asal transmigrasi Jawa". Selain tanaman pangan untuk tujuan konsumtif, seperti: sayur-mayur dan hortikultura; juga dikembangkan tanaman jenis keras (cras-croft) seperti: cengek, jeruk, limon nipis dan rambutan dan lain-lain.

Bila dibandingkan dengan kedua lingkungan lain, masyarakat di sini justeru mempunyai tingkat penghasilan yang jauh lebih baik. Dan ada semacam kecenderungan untuk bergerak ke bidang jasa atau sektor lain, seperti: angkutan, bertukang dan berdagang kecil-kecilan.

Masih di kelurahan Dobonsolo, di lingkungan Yahim, ada beberapa anggota masyarakat yang bergerak di bidang pengadaan sayur-mayur. Rupanya di sektor ini cukup berhasil, terutama dalam hal pengadaan sayur-mayur dan bawang (merah dan putih). Malah menurut informasi, untuk dua tahun terakhir ini sudah panen. Bantuan pupuk bibit dan penyuluhan dan bimbingan teknis ditangani langsung oleh Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II Jayapura. Selain itu juga, di tepian danau, ada pula sejumlah anggota masyarakat yang menggalakkan kegiatan pengurangan ikan, seperti: ikan mas, dan mujair. Hasil yang diperoleh kegiatan ini untuk dijual.

Dalam bidang perkoperasian, kedua lokasi penelitian ini mempunyai sistem yang hampir sama, yaitu terdapat Koperasi Unit Desa (KUD). Hanya saja pengelolaan dan kegiatan KUD di kelu-

rahan Dobonsolo, jauh lebih baik ketimbang RW II Puai. Ini dikarenakan selain jauh dan tidak didukung oleh sarana transportasi yang memadai.

2.4.5 *Sistem Teknologi*

Pada umumnya sistem teknologi di kedua lokasi penelitian, tidak berbeda secara berarti. Maksudnya adalah hampir pada setiap bidang kehidupan dan lapangan kerja, teknologi yang digunakan tidak berbeda satu sama lain. Di bidang pertanian, faktor tenaga kerja masih mengandalkan pada tenaga manusia.

Dalam hal kegiatan di bidang pembangunan fisik, seperti pembuatan perumahan penduduk, masih menggunakan teknologi tempo dulu yaitu tenaga manusia dan alat perlengkapan tradisional. Selain itu dari sudut alat yang digunakan, teknik dan metode juga belum berubah seperti konstruksi bangunan dan arsiteknya.

Teknologi yang berkaitan dengan pengolahan hasil pertanian tidak berbeda. Pengawetan bahan makanan misalnya, masih menggunakan bumbu-bumbu tradisional atau cukup dengan pengeringan atau cukup dengan pengeringan atau pengasapan saja.

Teknologi di bidang transportasi dan komunikasi, terlihat ada perbedaan antara kedua lokasi penelitian ini. Untuk masyarakat di RW II Puai, masih terbatas pada sarana angkutan lokal, seperti: penggunaan perahu jenis "kano" dan motor tempel. Sedang untuk masyarakat di kelurahan Dobonsolo, sudah mengenal dan menggunakan jasa angkutan darat/jalan. Malah untuk ke pasar atau berbelanja ke toko, di antaranya sudah menggunakan mobil atau motor (termasuk sepeda).

Di bidang teknologi komunikasi, justeru kondisi masyarakat di kelurahan Dobonsolo jauh lebih baik. Pada umumnya masyarakat di sini sudah menggunakan jasa penerangan listrik, termasuk ikut mengenyam manfaat pesawat televisi dan tape recorder. Hanya untuk radio, nampaknya baik untuk masing-masing lokasi penelitian, sebahagian dari penduduk setempat sudah memilikinya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tingkat teknologi pada kedua lokasi penelitian, tidak begitu berbeda untuk sektor-sektor kehidupan seperti: peternakan, pertanian, dan pembangunan perumahan. Akan tetapi untuk beberapa sektor se-

perti: transportasi, komunikasi dan penerangan masyarakat, terlihat sedikit perbedaan, di mana masyarakat di kelurahan Dobonsolo relatif lebih baik bila dibandingkan dengan masyarakat di RW II Puai.

2.4.6 *Sistem Religi*

Pada umumnya hampir seluruh masyarakat yang ada pada kedua lokasi penelitian adalah penganut agama Kristen yang taat. Justeru karena itu tata pergaulan hidup dan pemecahan masalah kehidupan bersumber dari ajaran Alkitab.

Khusus untuk kelurahan Bobonsolo, juga terdapat anggota masyarakat yang beragama Islam (khusus di lingkungan Komba). Nampakny kehidupan beragama di antara masing-masing pemeluk yang ada cukup baik. Dalam arti apabila ada perayaan-perayaan keagamaan di antara masing-masing pemeluk, saling kunjung-mengunjungi. Jelasnya kalau berbicara tentang toleransi termasuk interaksi antar pemeluk agama, berjalan dengan baik.

Berkaitan dengan sistem religi, nampaknya ajaran agama tidak bertentangan. Di saat permulaan penyebaran agama di danau Sentani (1928) mengalami banyak tantangan. Hal ini dikarenakan, ajaran agama dianggap sebagai nilai (penerobosan budaya) yang bertentangan dengan budaya pandang masyarakat setempat. Namun, berkat kerja keras dalam upaya men-Kristen-kan, masyarakat setempat secara perlahan-lahan (lambat tapi pasti) melepas termasuk membakar *hobat-hobatan* (black-magic), dan memilih jalan menjadi pemeluk agama Kristen yang saleh, setia dan patuh.

Bertalian dengan sistem religi, perlu dikemukakan bahwa ajaran agama yang lebih banyak tendency ke "patrilineal", justeru sesuai dengan masyarakat setempat yang menganut sistem "patrilineal". Menurut ajaran agama Kristen, dalam hal sistem pewarisan adalah dari bapak ke anaknya. Hal ini bila dihubungkan dengan adat masyarakat Sentani, justeru ada kesamaan, karena masyarakat setempat di dalam hal pewarisan cenderung menghubungkan dengan sistem patrilineal.

2.4.7 *Bahasa*

Secara umum bahasa Sentani tergolong ke dalam bahasa non Austronesia (tidak serumpun dengan bahasa Indonesia), ter-

bagi atas dialek Sentani Barat, Sentani Tengah dan Sentani Timur. Oleh karena kedua lokasi penelitian ini, masing-masing terletak di Sentani Tengah (kelurahan Dobonsolo) dan Sentani Timur (RW II Puai), dengan demikian, antara lain contoh dialek dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

- | | | | | | | | |
|----|------------------|---|-------------|---|-----------------------|---|--------------------|
| a. | bahasa Indonesia | : | <i>apa</i> | : | bahasa Sentani Tengah | : | <i>rahe</i> |
| | | | | | bahasa Sentani Timur | : | <i>ma-
kha</i> |
| b. | bahasa Indonesia | : | <i>ayah</i> | : | bahasa Sentani Tengah | : | <i>arai</i> |
| | | | | | bahasa Sentani Tengah | : | <i>ateai.</i> |

BAB III

GAMBARAN UMUM KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN

Dengan mengemukakan gambaran organisasi pemerintahan desa kiranya akan lebih jelas memahami tentang profil kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan. Dikatakan demikian karena dalam organisasi pemerintahan desa dilibatkan semua unsur pimpinan baik yang bersifat formal; maupun kepemimpinan yang bersifat informal/tradisional.

Di Irian Jaya baik secara ideal maupun secara praktis kedua kategori atau unsur kepemimpinan dimaksud memegang peranan penting dalam roda pemerintahan karena dengan meninggalkan salah satu unsur kepemimpinan tersebut menurut pengalaman akan mengganggu kelancaran program yang akan atau sedang dilaksanakan baik program pemerintah maupun program-program yang dirancang oleh masyarakat sendiri.

Untuk memperoleh gambaran tentang kepemimpinan masyarakat pedesaan di Irian Jaya perlu ditinjau sistem kepemimpinan dimaksud baik yang menyangkut syarat-syarat, hak dan kewajiban, atribut maupun cara pengangkatan dan segala seluk beluknya. Selanjutnya akan dijelaskan tentang sistem kepemimpinan tersebut seperti berikut ini.

3.1 Organisasi Pemerintahan Desa

Walaupun penerapan pemerintah desa sebagai mana diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1979 telah mulai dilaksanakan di kedua desa dalam penelitian ini, tetapi karena masih dalam transisi pemerintahan desa yang berlaku sebelumnya masih belum dihapus malah sebagian fungsinya masih berjalan sebagaimana biasanya terutama desa sebagai suatu kesatuan hukum adat. Justru karena itu pertama-tama akan dijelaskan organisasi pemerintahan desa gaya lama tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Satu Irian Jaya No. 25/60/1974 tentang pembentukan pemerintahan desa di wilayah daerah tingkat I Irian Jaya.

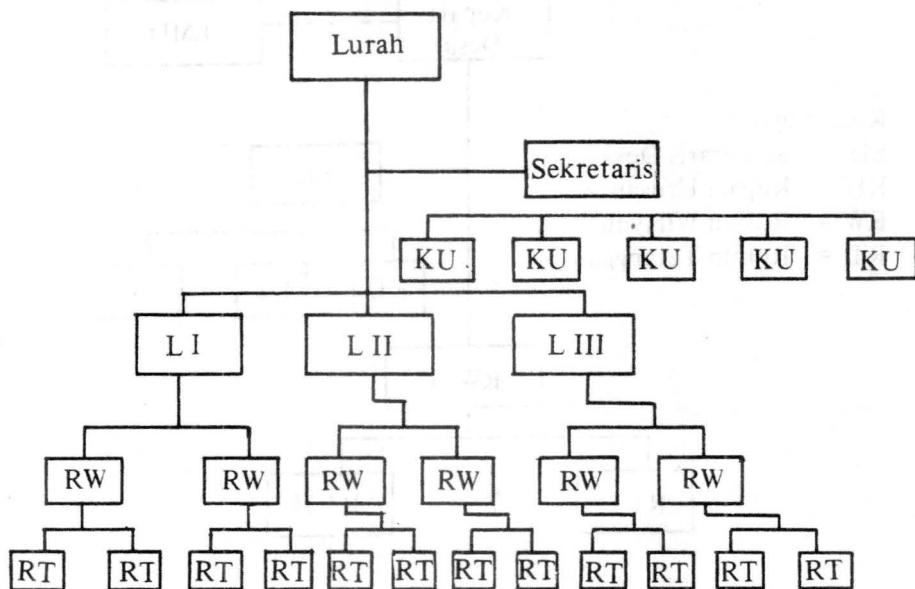
3.1.1 Struktur dan Nama Jabatan

Alat perlengkapan desa terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD); yang secara bersama-sama merupakan pemerintahan Desa. Pemerintahan desa ini dibantu oleh sekretaris desa, Ketua Rukun Wilayah dan Ketua Rukun Tetangga.

Setelah dikeluarkan keputusan Presiden No. 28 tahun 1980 tentang penyempurnaan dan peningkatan fungsi lembaga Sosial Desa dan diterbitkannya Surat Keputusan Mendagri No. 225 tahun 1980 tentang susunan organisasi dan tata kerja LKMD serta disusul dengan Instruksi Mendagri No. 25 tahun 1980 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden No. 28 tahun 1980 maka pemerintahan desa ini semakin lengkap dan sempurna karena LKMD bertujuan membantu pemerintahan Desa dalam meningkatkan pelayanan pemerintah dan pemerataan hasil pembangunan dengan menumbuhkan prakarsa serta mengerakan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional yang meliputi aspek-aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial budaya, Agama dan Pertahanan Keamanan. Dengan demikian berarti bahwa pemerintahan desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa akan memperoleh bantuan dari LKMD, terutama dalam hal perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan pertahanan masyarakat desa.

Untuk mengetahui struktur organisasi pemerintahan kelurahan Dobonsolo, dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

BAGAN 1
Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan
Kelurahan Dobonsolo, Kecamatan Sentani



Keterangan:

Sekr. = Sekretaris

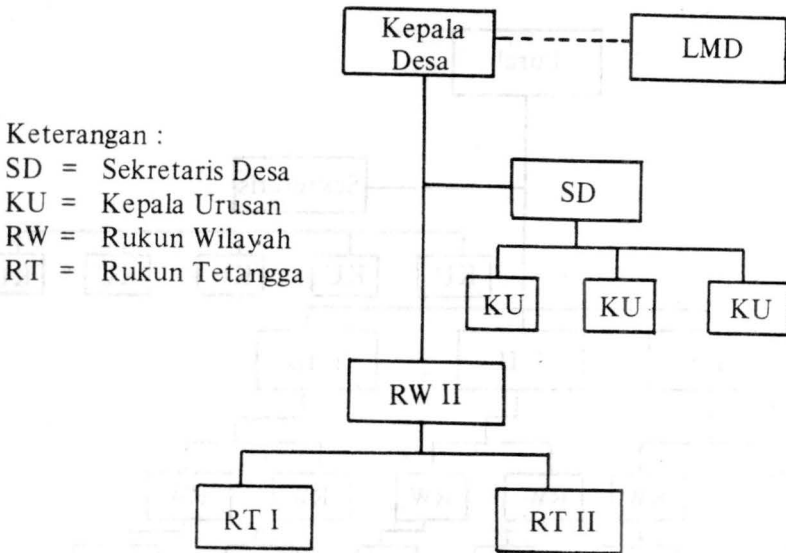
KU = Kepala Urusan

L (I, II, III) = Lingkungan

Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan LMD adalah Lembaga Musyawarah untuk mufakat dari pemuka-pemuka masyarakat desa, yang patut dipandang dan terdiri dari orang-orang tua yang mempunyai pengalaman, cerdik pandai. Jumlah anggotanya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lingkungan yang bersangkutan.

Demikian halnya dengan kepengurusan organisasi pada Rukun Wilayah II Puai, dapat dilihat pada bagan di bawah ini

BAGAN 2
Bagan Struktur Organisasi Rukun II Puai,
Desa Itakiwa, Kecamatan Sentani



Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa sebagai organ pembantu pemerintah desa, bertugas menangani kegiatan perencanaan, pelaksanaan termasuk mengawasi kegiatan-kegiatan pembangunan. Sesuai dengan struktur organisasi. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), mempunyai kepengurusan sebagai berikut : (1) Ketua Umum, (2) Ketua Satu, (3) Ketua Dua, (4) Sekretaris, (5) Bendahara, serta (6) Ketua-Ketua Seksi : (a) Seksi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban, (b) Seksi Pendidikan dan Kebudayaan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, (c) Seksi Penerangan, (d) Seksi Perekonomian, (e) Seksi Pembangunan Prasarana dan Lingkungan Hidup (f) Seksi Agama, (g) Seksi PKK, (h) Seksi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana (i) Seksi Pemuda dan olah raga serta kesenian (j) Kesejahteraan sosial.

3.1.2 Tugas Kewajiban

3.1.2.1 Pemerintahan Desa

Tugas pemerintahan desa antara lain adalah mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan, baik yang termasuk urusan

rumah tangga desa dan bantuan pemerintah maupun urusan-urusan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kewajiban pemerintah desa adalah : (1) Melaksanakan tugas-tugas umum (2) Membina keamanan dan ketertiban umum (3) Mempertinggi taraf hidup rakyat, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (4) Meningkatkan kecerdasan rakyat dan memelihara nilai-nilai agama dan kesenian (5) Melaksanakan dan membina kehidupan demokrasi dalam seluruh tata hidup masyarakat (6) memelihara harta benda desa dan meningkatkan penghasilannya, serta menggali dan mengembangkan sumber-sumber kekayaan desa (7) Melaksanakan peraturan perundang-undangan dan tugas-tugas pemerintah tingkat atas yang diturunkan kepada desa (8) Mengerakkan hal-hal lain untuk kepentingan dan kemajuan dari desa.

3.1.2.2 Kepala Desa

Tugas kepala desa adalah mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangga desa, bantuan pemerintah dan urusan-urusan lain dalam pemerintahan desa. Kewajiban kepala desa adalah mempertanggung jawabkan urusan-urusan rumah tangga desa kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

3.1.2.3 Lembaga Musyawarah Desa (LMD)

Tugas Lembaga Masyarakat Desa adalah merumuskan dan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan: (1) Anggaran dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja desa (2) Penetapan, Perubahan dan penghapusan pajak dan penghasilan desa (3) Pinjaman desa (4) Perusahaan desa (5) Kedudukan dan harta benda milik desa (6) pekerjaan, penyerahan barang-barang dan pengangkutan-pengangkutan tanpa mengadakan penawaran (7) Penghapusan tagihan-tagihan sebagian atau seluruhnya (8) Persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai, dimana desa menjadi satu pihak (9) Penerimaan atau penggantian serta pelantikan anggota baru yang harus dilakukan dalam rapat terbuka.

Disamping itu rapat desa juga bertugas melaksanakan peradilan adat (perkara-perkara kecil), peradilan agama memberikan pertimbangan serta nasehat kepada kepala desa baik diminta ataupun tidak diminta, yang pelaksanaannya dengan mempedomani Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya yang khusus untuk itu. Kewajiban ketua lembaga musyawarah desa adalah mempertanggung jawabkan semua keputusan yang diambil kepada masyarakat melalui sidan musyawarah desa.

3.1.2.4 Sekretaris Desa

Sekretaris desa bertugas menyelenggarakan administrasi yang berhubungan dengan tugas kewajiban pemerintah desa. Adapun kewajiban sekretaris desa ini adalah mempertanggung jawabkan pekerjaannya kepada kepala desa.

3.1.2.5 Ketua Rukun Wilayah.

Tugas Ketua Rukun Wilayah adalah memimpin pelaksanaan urusan tertentu dan bidang pemerintahan Desa, dengan kewajibannya adalah mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Kepala Desa.

3.1.2.6 Ketua Rukun Tetangga

Tugas Ketua Rukun Tetangga adalah melaksanakan pemerintahan dalam urusan yang lebih kecil yang dipimpinnya dengan mengindahkan kedudukan Kepala Suku menurut adat kebiasaan setempat. Kewajiban Kepala Rukun Tetangga adalah mempertanggungjawabkan tugas pemerintahan yang dilakukannya kepada Kepala Desa.

3.1.2.7 Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

Tugas pokok LKMD adalah membantu Kepala Desa dalam:

- 1) Merencanakan pembangunan yang didasarkan atas azas musyawarah.
- 2) Menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat.

- 3) Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan ketahanan di Desa.

Untuk melaksanakan tugas pokok LKMD dimaksud, dan sesuai dengan fungsinya LKMD berkewajiban mengusahakan :

- 1) Terpenuhinya kebutuhan esensiil masyarakat.
- 2) Tersusunnya rencana dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kemampuan setempat.
- 3) Terselenggaranya peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi secara litas setempat.
- 4) Terselenggaranya program berkelanjutan.
- 5) Adanya peningkatan dan perluasan kesempatan kerja.
- 6) Adanya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat.
- 7) Pemerataan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
- 8) Tumbuh dan berkembangnya kesadaran dan keyakinan masyarakat terhadap adanya perubahan karena adanya perubahan dan pembaharuan kearah kemajuan.
- 9) Terjaminnya perkembangan dan kerukunan dalam kehidupan antar umat beragama.
10. Terciptanya suatu kondisi tertib dimana masyarakat merasa keamanan dan ketenteraman dirinya terjamin.

Dalam pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 digariskan bahwa pemerintahan Desa terdiri atas Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh perangkat Desa yang terdiri atas sekretariat Desa dan kepala-kepala Dusun.

Selanjutnya dalam pasal 15 dicantumkan bahwa sekretariat Desa terdiri sekretaris Desa dan Kepala-kepala Urusan.

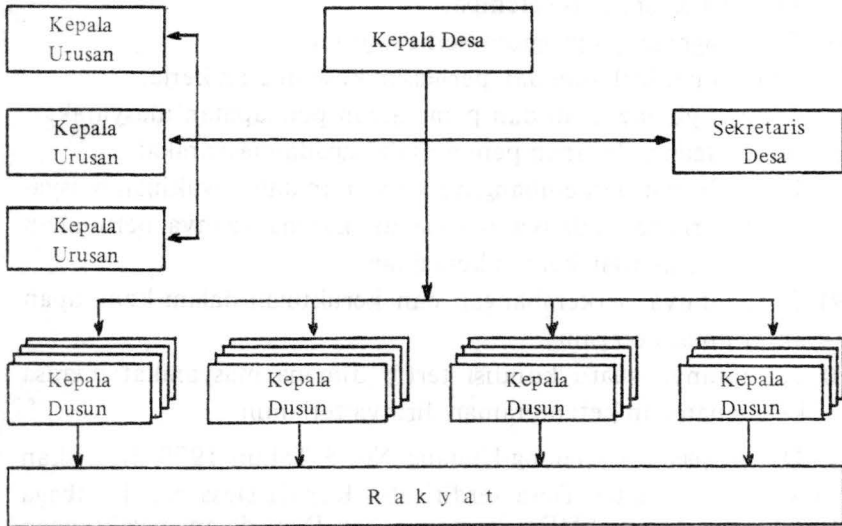
Nama-nama jabatan dalam struktur organisasi pemerintahan Desa menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 ini adalah sebagai berikut :

- 1). Kepala Desa
- 2). Sekretaris Desa
- 3). Kepala-kepala Urusan
 - a. Kepala Urusan Umum
 - b. Kepala Urusan bidang Ekonomi, Keuangan dan pembangunan.
 - c. Kepala Urusan bidang Kesejahteraan dan kebudayaan masyarakat Desa.

4) Kepala Dusun.

Struktur organisasi pemerintahan desa dan perangkat desa tersebut dapat digambarkan seperti dibawah ini.

BAGAN 3
Struktur Tata Pemerintahan Desa
(UU-RI-No. 5 tahun 1979)



Lembaga Musyawarah desa sebagai unsur pemerintahan desa hanya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota.

Selain penggambaran tentang struktur dan nama-nama dalam pemerintahan desa menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1979 ini perlu pula kiranya dijelaskan tentang tugas dan kewajiban dari Pemerintahan Desa tersebut dan pejabat-pejabat yang melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut:

1. Tugas dan Kewajiban Pemerintah Desa pada umumnya adalah:
 - a. Melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum di desa.
 - b. Membina keamanan dan ketertiban umum di desa.
 - c. Mempertinggi taraf hidup rakyat, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa.

- d. Meningkatkan kecerdasan rakyat dan memelihara nilai-nilai keagamaan, kebudayaan dan kesenian rakyat di desa.
 - e. Melaksanakan dan membina kehidupan demokrasi dalam seluruh tata hidup masyarakat desa.
 - f. Memelihara harta benda desa dan meningkatkan penghasilannya serta mengali dan mengembangkan sumber-sumber kekayaan desa.
 - g. Melaksanakan peraturan perundang-undangan dan tugas-tugas pemerintah atasan yang pelaksanaannya diserahkan kepada desa.
 - h. Menyelenggarakan hal-hal yang lain untuk kepentingan dan kemajuan desa serta penduduknya.
2. Tugas dan Kewajiban Kepala Desa adalah sebagai berikut :
- a. Umum (1) Administrator pemerintahan (2) Administrator pembangunan (3) Administrator kemasyarakatan.
 - b. Sebagai alat Pemerintah pusat/atasan. (1) Memegang pimpinan kebijaksanaan politik polisionil di desa (2) Menyelenggarakan koordinasi kegiatan-kegiatan yang ada di desa (3) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan di desa (4) Melaksanakan segala keputusan dalam tugas-tugas pemerintah umum.
 - c. Sebagai alat pemerintah Desa (Otonomi Desa)
 - (1) Bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan urusan-urusan kepentingan desa. (2) Melaksanakan segala keputusan-keputusan dari musyawarah yang menjadi program pemerintah desa. (3) Mengepalai penyelenggaraan administrasi desa. (4) Mengurus dan memelihara harta milik Desa, (Sekolah, kantor Desa dan lain-lain. (5) Membina dan mengurus serta mengawasi keuangan Desa. (6) Mengawasi kegiatan-kegiatan di bidang Agama, pendidikan dan kebudayaan, di Desa. (7) Memelihara dan mengembangkan lembaga-lembaga milik Desa (Ekonomi, Sosial dan budaya). (8) Menjaga lingkungan hidup dan kelestarian alam di Desa. (9) Membina dan membimbing kehidupan sosial. (10) Memelihara usaha-usaha kebersihan dan kesehatan. (11) Memelihara kehidupan gotong

- royong masyarakat Desa. (12) Memelihara dan mengelola harta milik dan kekayaan Desa.
3. Tugas dan Kewajiban Lembaga Musyawarah Desa adalah :
 - a. Lembaga Musyawarah desa adalah Lembaga Musyawarah yang merupakan perangkat pemerintah Desa, yang terdiri dari unsur-unsur yang ditentukan oleh Undang-Undang/Peraturan yang secara bersama-sama dengan kepala Desa mengurus kepentingan rumah tangga Desa.
 - b. Menetapkan peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa, untuk mengatur dana mengurus rumah tangga desa.
 - c. Menetapkan perencanaan pembangunan desa.
 - d. Menetapkan Anggaran pendapatan dan belanja Desa.
 - e. Menerima keterangan pertanggung jawab dari pelaksanaan pekerjaan urusan-urusan rumah tangga dari kepala desa.
 - f. Memberikan saran-saran kepada Kepala Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa.
 - g. Mengajukan calon-calon Kepala Desa dalam pemilihan kepala desa.
 4. Tugas dan Kewajiban Sekkretaris Desa adalah sebagai berikut:
 - a. Membantu Kepala Desa dalam mengurus administrasi desa.
 - b. Mengkoordinir semua pelayanan administrasi kantor yang merupakan sekretariat desa.
 - c. Sebagai sekretaris pada rapat-rapat/pertemuan tingkat Desa.
 - d. Mencatat dan membuat laporan tentang perkembangan Desa dan dikirim ke pihak atasan.
 - e. Mengurus soal-soal personil, inventaris Desa.
 - f. Mengurus soal-soal personil, inventaris Desa.
 - f. Mengurus agenda, arsip, ekspedisi dan dokumentasi.
 5. Tugas-tugas Urusan bidang Umum adalah :
 - a. Membantu usaha untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman umum.

- b. Mengkoordinir kegiatan dalam menghadapi bahaya yang akan mengganggu ketenteraman umum.
 - c. Membantu para petugas ABRI yang beroperasi di Desa.
6. Tugas-tugas bidang Ekonomi adalah :
- a. Membantu dalam hal :
 - (1) Peningkatan Ekonomi Desa. (2) Peningkatan Keuangan Desa. (3) Peningkatan pembangunan Desa.
 - b. Membantu mengatur hubungan, baik bersifat vertikal maupun bersifat Horizontal dengan lembaga-lembaga Desa untuk kepentingan pembangunan Desa.
 - c. Mengajukan saran-saran kepala-kepala desa.
7. Tugas-tugas Urusan Bidang Kesejahteraan dan Kebudayaan Masyarakat Desa adalah :
- a. Membantu dalam hal :
 - (1) Kesehatan dan kebersihan lingkungan (2) Menggerakkan dan meningkatkan kegiatan pendidikan (PKK) (3) Menggalakkan kesenian dan olah raga pemuda-pemuda di desa (4) Membina kehidupan beragama di desa.
 - b. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan LKMD.
 - c. Menggerakkan kegiatan sosial.
 - d. Ikut membantu pelaksanaan evaluasi program kerja desa bersama kepala desa.

3.2 Sistim Kepemimpinan

Di atas sudah dikemukakan bahwa kepala desa dan LMD adalah merupakan pemerintahan Desa, di mana pemerintahan desa ini dibantu oleh sekretaris desa, ketua rukun tetangga dan ketua rukun wilayah. Keputusan Presiden No. 28 tahun 1980 tentang penyempurnaan dan peningkatan fungsi lembaga sosial desa menjadi LKMD dan disusul dengan Instruksi Mendagri No. 25 tahun 1980 tentang pelaksanaan kepres No. 28 tahun 1980, maka LKMD juga merupakan unsur pembantu pemerintahan desa. Jika dikaji secara mendalam maka pada umumnya meliputi unsur dan sistem kepemimpinan formal dan informal. Untuk lebih dipahami kedua

sistem kepemimpinan ini maka akan dijelaskan secara berurutan yang kiranya dapat memberikan gambaran umum kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan di daerah ini.

3.2 Sistem Kepemimpinan Formal

Yang dimaksud dengan kepemimpinan formal di sini adalah pimpinan yang diangkat oleh pemerintah dengan suatu surat keputusan baik yang berasal dari calon-calon yang diumumkan masyarakat maupun tidak. Di tingkat desa pimpinan tersebut adalah kepala desa, anggota LMD, pengurus LKMD dan tokoh-tokoh masyarakat yang diangkat. Jelas di sini kepemimpinan formal tersebut sifatnya tidak merupakan pimpinan yang didapat dari keturunan daerah secara turun temurun melainkan diangkat melalui prosedur tertentu dan dalam jangka waktu tentu memegang jabatan kepemimpinan. Pemimpin ini diterima masyarakat karena ditetapkan oleh pemerintah atas walaupun sebelumnya dipilih oleh masyarakat desa dan diusulkan untuk diangkat.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang sistem kepemimpinan formal, dalam uraian berikut ini akan dikemukakan syarat-syarat kepemimpinan, faktor pendukung, hak dan kewajiban, atribut/symbol kepemimpinan, cara pengangkatan dan upacara yang dilakukan oleh masing-masing unsur pimpinan formal tersebut di atas.

a. Kepala Desa

1. Syarat-syarat Kepemimpinan dan Faktor Pendukung

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Desa adalah warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Berjiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Pancasila.
- b. Tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam peristiwa G. 30.S/PKI.
- c. Tidak pernah menjadi anggota bekas Partai Komunis Indonesia dan organisasi massa yang bernaung di bawahnya.
- d. Mempunyai hak untuk memilih dan dipilih berdasarkan keputusan pengadilan yang tidak dapat dirubah lagi.
- e. Tidak pernah dihukum karena suatu perkara kejahatan.

- f. Mempunyai pengalaman dalam memimpin masyarakat.
- g. Mempunyai rencana dan program tentang pembangunan desa.
- h. Sekurang-kurangnya pendidikan SLTP atau berpengalaman yang patut disamakan dengan SLTP.
- i. Sekurang-kurangnya berumur tiga puluh tahun dengan kesehatan yang mengizinkan.
- j. Menjadi penduduk desa yang bersangkutan.

Faktor pendukung untuk kepala desa ini selain memenuhi syarat-syarat seperti tersebut di atas juga faktor pendukung lain yang merupakan pemenang dalam pilihan kepala desa yang diadakan sebelumnya di desa yang bersangkutan. Di samping itu dengan ditetapkannya yang bersangkutan oleh pemerintah atasan (Gubernur KDH Tingkat I Irian Jaya) maka hal ini merupakan faktor pendukung pula kepemimpinan kepala desa bersangkutan. Kewibawaan, kepribadian yang menarik, ketaatan menjalankan agama yang dijalankan (dianut), pandai mengutarakan pendapat dan pola berpikir adalah pula merupakan faktor pendukung dari kepemimpinan kepala desa ini.

2. Hak dan Kewajiban Kepala Desa

Hak kepala desa adalah mengatur jalannya pemerintahan desa bersama-sama dengan aparat desa. Kewajiban kepala desa seperti telah disinggung di muka antara lain adalah mempertanggung jawabkan pelaksanaan pemerintahan desa kepada warga desa dan dalam bidang pelaksanaan tugas pemerintahan atasan. bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan yaitu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura.

3. Atribut/Symbol Kepemimpinan

Atribut atau simbol kepemimpinan yang biasa dipakai oleh Kepala Desa adalah berupa pakaian dan tanda jabatan. Pakain kepada desa ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya yaitu berwarna putih-putih. Tanda jabatan berbentuk lencana ditempatkan pada da-

da sebelah kiri. Topi kepala desa berwarna hitam dengan diberi lambang;

4. Cara Pengangkatan dan Upacara

Kepala Desa diangkat oleh Gubernur KDH Tingkat I Irian jaya dengan pemilihan. Kepala desa dipilih dari sekurang-kurangnya dua orang dan sebanyak-banyaknya empat orang dan diajukan oleh LMD yang sudah mendapat penetapan dari Bupati KDH Tingkat II yang bersangkutan (Jayapura).

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara umum langsung, bebas dan rahasia. Tata cara pemilihan diselenggarakan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh camat kepala wilayah setempat (Sentani). Yang dapat menjadi pemilih kepala desa adalah warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Menjadi penduduk desa yang bersangkutan.
- b. Sekurang-kurangnya berumur tujuh belas tahun atau sudah kawin
- c. Tidak terlibat langsung atau tidak langsung dengan G.30.S/ PKI.
- d. Dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- e. Terdaftar sebagai pemilih.
- g. Hadir di tempat pemungutan suara pada waktu pemungutan suara.
- h. Mematuhi segala peraturan/tatatertib pemilihan dan pemungutan suara.

Setelah panitia pemungutan suara untuk pemilihan kepala desa mengadakan pengumpulan suara maka selambat-lambatnya yaitu dua hari setelah pemilihan mereka membuat berita acara hasil pemilihan dan sekaligus mengumumkan hasil pemilihan tersebut diseluruh wilayah desa. Berita acara itu disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II untuk pengumuman selanjutnya.

Kepala Desa diangkat untuk masa jabatan 5 tahun mulai terhitung tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali setelah selesai masa jabatannya tetapi tidak boleh sampai tiga kali secara berturut-turut. Sebelum memangku jabatannya kepala

desa mengucapkan sumpah/janji jabatan dan dilantik dengan upacara khusus dalam silang L M D dengan disaksikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II setempat (Jayapura), atau pejabat yang ditunjuk dan bertindak atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II setempat (Jayapura).

b. Pemimpin dan Anggota Lembaga Musyawarah Desa

1. Syarat-syarat Kepemimpinan dan Faktor Pendukung

Persyaratan formal untuk menjadi anggota LMD adalah sama dengan persyaratan seseorang untuk dapat diangkat menjadi kepala desa, sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hanya saja untuk LMD ini perlu ditambah dengan unsur-unsur pimpinan yang hidup dalam masyarakat yaitu :

- (a) Unsur penghulu.
- (b) Unsur pemuka agama.
- (c) Unsur pimpinan Rukun Wilayah.
- (d) Unsur cerdik pandai.
- (e) Unsur Wanita dan
- (f) Unsur pemuda.

Kepala suku yang dipandang patut menjadi anggota LMD: adalah kepala suku yang benar-benar memimpin suku atau kaumnya di desa serta menurut adat desa setempat dipandang mewakili para kepala suku yang ada dalam desa. Pemuka agama (rohaniawan) yang dipandang patut menjadi anggota LMD adalah rohaniawan yang secara riil diakui sebagai pemimpin keagamaan di desa dan oleh masyarakat desa dipandang mampu mewakili rohaniawan yang ada dalam desa. Cerdik pandai yang patut menjadi anggota LMD adalah warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di desa tetap yang secara riil di samping pendidikan yang ada padanya, diakui dan dipandang mampu oleh masyarakat untuk membawa desa kepada kemajuan dan pembangunan yang merata. Perlu ditegaskan bahwa unsur wanita dan cerdik pandai dalam praktek dikelompokkan ke dalam unsur cerdik pandai ini. Sedangkan Ketua Rukun Wilayah adalah karena jabatannya memimpin suatu bagian dari wilayah desa menjadi anggota LMD. Sudah diterangkan sebelumnya bahwa ketua RW adalah suatu daerah

administratif pemerintah terendah setingkat di bawah desa yang dipimpin oleh seorang Ketua Rukun Wilayah sebagai alat pembantu kepala desa dalam wilayahnya.

Faktor pendukung dari Kepemimpinan Lembaga Musyawarah Desa ini selain dari memenuhi ketentuan-ketentuan formal sebagaimana dikemukakan di atas anggotadan pemimpin Lembaga Musyawarah Desa ini sesuai dengan profesinya harus bertindak dan berbuat menurut norma-norma yang berlaku dalam masyarakat terutama di bidangnya masing-masing. Dengan mengindahkan norma-norma dan terpenuhinya ketentuan formal dimaksud Kepemimpinan unsur pemerintahan dari Lembaga Musyawarah Desa ini secara relatif akan beroleh dukungan dari masyarakat pendukungnya.

Selain dari pada itu Ketua Rukun Tetangga dan juga Lembaga Musyawarah Desa lainnya harus menghayati aspirasi masyarakat Desa dan memahami benar tuntutan pembangunan yang perlu dilakukan di pedesaan ini baik yang bersifat fisik maupun mental spiritual.

2. Hak dan Kewajiban Lembaga Musyawarah Desa

Sepanjang informasi yang diperoleh LMD berkewajiban menetapkan peraturan dan atau peraturan Desa Serta menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa tersebut, maka Ketua LMD berkewajiban memberikan penyelesaiannya.

3. Atribut/symbol Kepemimpinan

Khusus mengenai Atribut atau symbol Kepemimpinan di bidang Kepemimpinan LMD ini diperoleh informasi bahwa, tidak ada suatu ketetapan dan kebiasaan yang mengatur dan biasa berlaku tentang atribut Kepemimpinan LMD ini baik dalam bentuk pakaian maupun tanda-tanda jabatan dan sebagainya.

4. Cara Pengangkatan dan Upacara

Lembaga Musyawarah Desa ditetapkan dengan keputusan Gubernur KDH Tingkat I Irian Jaya. Di setiap Desa baik Dabonsolo dan Itakiwa diadakan panitia pembentukan LMD yang terdiri dari :

- a) Kepala Desa sebagai Ketua merangkap anggota.
- b) Sekretaris Desa sebagai sekretaris merangkap anggota.
- c) Sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota yang mewakili unsur-unsur Tua-tua adat, agama dan pengetahuan yang cukup tinggi dalam desa itu.

Panitia pembentukan LMD diangkat dan dilantik oleh Bupati KDH Tingkat II Jayapura. Camat kepala wilayah Kecamatan Sentani membantu dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pembentukan LMD tersebut. Hasil pembentukan LMD dimaksud disampaikan kepada Gubernur KDH Tingkat I Irian Jaya melalui Bupati Tingkat II Jayapura untuk memperoleh penetapannya. Dalam hal ini Bupati dapat memberikan pertimbangan kepada Gubernur KDH Tingkat I Irian Jaya. Upacara yang dilakukan dalam pengangkatan pemimpin dan anggota LMD ini adalah sebelum memangku jabatan para pimpinan dan anggotanya LMD ini mengucapkan sumpah jabatan dan dilantik di ruangan sidang LMD oleh Bupati KDH Tingkat II Jayapura. Dalam hal ini dapat juga diwakili oleh pejabat yang ditunjuk untuk dan atas nama Bupati yang bersangkutan.

c. Rukun Tetangga (RT)

- 1). Syarat-syarat Kepemimpinan dan Faktor Pendukung.

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi ketua RT adalah sebagai berikut :

- a) Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Dasar atau setingkat dengan itu.
- b) Tidak terlibat G 30 S/PKI.
- c) Berdomisili di RT yang bersangkutan.
- d) Berkelakuan yang baik.
- e) Taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- f) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- g) Merupakan calon dari masyarakat RT-nya.

Faktor-faktor yang mendukung kepemimpinan ketua RT ini selain dari terpenuhinya syarat-syarat tersebut di atas seorang ketua RT harus :

- a) Suka bermusyawarah.
- b) Seorang yang pengetahuannya cukup tinggi di RT-nya.
- c) Mempunyai kejujuran dan disenangi masyarakat.
- d) Menjalankan ajaran agama yang dianutnya.

2) Hak dan Kewajiban Ketua Rukun Tetangga

Hak Ketua RT ini antara lain adalah mengatur jalannya pemerintahan desa dalam wilayah RT yang bersangkutan. Kewajiban ketua RT adalah membantu kepala desa dalam melaksanakan pemerintahan dalam lingkungan RT yang dipimpinnya dengan memperhatikan peranan kepala adat setempat menurut kebiasaan yang ada dalam desa. Dalam menjalankan kewajibannya ketua RT bertanggung jawab kepada kepala desa.

3) Atribut/Symbol Kepemimpinan

Secara khusus baik dalam ketetapan pemerintah atasan maupun menurut adat kebiasaan yang berlaku ketua RT tidak mempunyai atribut-atribut atau simbol kepemimpinan sebagai seorang pemimpin di daerah pedesaan. Jika ketua RT tersebut berasal dari Tua-tua adat atau rohaniawan maka atribut yang dipakai adalah atribut tua-tua adat dan rohaniawan itu saja.

4) Cara Pengangkatan dan Upacara

Ketua RT adalah kepala resor administratif yang merupakan bagian dari desa. Mendengar LMD maksudnya adalah memilih calon dan mendengar pendapat LMD tentang calon yang bersangkutan apakah layak atau belum menjadi seorang ketua RT. Upacara dalam pengangkatan ketua RT ini tidak diadakan secara khusus hanya diumumkan kepada masyarakat oleh kepala masyarakat oleh kepala desa atau pembantunya dengan menyebarkan dan membacakan surat keputusan kepala desa yang bersangkutan biasanya dilakukan ditempat-tempat pertemuan masyarakat seperti sidang-sidang di tempat-tempat ibadah dan semacamnya.

d. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)

1) *Syarat-syarat dan Faktor Pendukung.*

Anggota pengurus LKMD terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat seperti pemuka adat, agama, pendidikan/cendekiawan, pemuda dan wanita serta pimpinan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di pedesaan Dobonsolo dan Itakiwa.

Untuk dapat diangkat sebagai pengurus harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c) Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat.
- d) Sebagai penduduk desa Dobonsolo dan desa Itakiwa, serta bertempat tinggal tetap di kedua desa tersebut.
- e) Mempunyai kemampuan dan kesanggupan untuk bekerja dan membangun.

Di samping terpenuhinya syarat-syarat seperti di atas, anggota pengurus LKMD ini kepemimpinannya didukung oleh adanya pengikut yang mendukungnya dan mempunyai pengetahuan yang memadai serta kepribadian yang baik. Seorang pengurus LKMD tidak mungkin akan berperan jika kurang menghayati aspek-aspek kehidupan dan pembangunan dari desa sendiri serta tidak memahami program-program yang dilaksanakan pemerintah baik tingkat nasional maupun tingkat regional.

2). *Hak dan Kewajiban*

Pada umumnya anggota pengurus LKMD berhak mengajukan usul, saran dan merumuskan serta berpartisipasi aktif dalam menyelenggarakan tugas pokok LKMD seperti merencanakan pembangunan, menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan serta menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan ketahanan di desa Dobonsolo dan Itakiwa.

Kewajiban anggota pengurus LKMD Desa Dobonsolo dan Itakiwa adalah ikut dan bertanggungjawab melaksanakan tugas pokok LKMD sesuai dengan fungsi LKMD tersebut yaitu :

- a) Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.
- b) Menanamkan pengertian dan kesadaran P⁴ kepada masyarakat.
- c) Menggali, memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan.
- d) Sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta antar warga masyarakat itu sendiri.
- e) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat.
- f) Membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk pembangunan.
- g) Meningkatkan peranan wanita dalam mewujudkan keluarga sejahtera.
- h) Membina kerja sama antar lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan.
- i) Melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka membantu Pemerintah Desa untuk menciptakan ketahanan yang mantap.

Dalam rangka pertanggung jawaban kewajiban dari anggota pengurus LKMD ini telah digariskan untuk masing-masing unsur pimpinannya yaitu sebagai berikut :

- a) Ketua umum bertanggung jawab kepala-kepala desa.
- b) Ketua I, ketua II, sekretaris, dan bendaharawan bertanggung jawab kepada ketua umum.
- c) Ketua-ketua seksi bertanggung jawab kepada ketua umum, ketua I, ketua II dengan perincian sebagai berikut:
 - (1) Seksi Keamanan Ketentraman dan Ketertiban, Seksi pendidikan Pembudayaan Penghayatan Pancasila serta Seksi penerangan dalam tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada ketua umum.
 - (2) Seksi Perekonomian dan Seksi pembangunan prasarana dan lingkungan hidup dalam tugasnya sehari-hari tetap bertanggung jawab kepada ketua I.
 - (3) Seksi agama, Seksi PKK, Seksi kesehatan kependudukan dan keluarga berencana, Seksi pemuda olah raga

dan kesenian serta Seksi kesejahteraan sosial dalam tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada ketua II.

3) *Atribut/Symbol Kepemimpinan*

Kepemimpinan LKMD baik selaku unsur ketua, sekretaris, bendahara dan ketua-ketua seksi tidak ada mempunyai sesuatu atribut/symbol kepemimpinan tertentu. Informasi ini diperoleh team penelitian pada waktu penelitian lapangan di desa Dobonsolo dan Itakiwa. Dalam rapat-rapat resmi nama dan gelar yang dipanggilkan sesuai dengan jabatan di dalam kepengurusan LKMD setempat. Dalam percakapan sehari-hari dipanggilkan nama jabatan dalam pengurusan ini. Khusus untuk ketua umum karena juga berfungsi sebagai kepala desa lebih sering atau pada umumnya dipanggilkan nama jabatan yang bersangkutan sebagai kepala desa. Kepala desa ini dalam panggilan sehari-hari disebut "Kades" (kepala desa) walaupun yang bersangkutan menjabat sebagai ketua umum LKMD. Tanda-tanda kebesaran yang dipakai hanya tanda-tanda kebesaran selaku kepala desa.

4) Cara Pengangkatan dan Upacara

Untuk membentuk pengurus LKMD baik di desa Dabonsolo dan Itakiwa ditempuh tata cara sebagai berikut :

- a) Calon anggota pengurus kecuali ketua umum diajukan sebagai hasil musyawarah oleh dan dari masing-masing RT.
- b) Pemilihan anggota pengurus dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk itu, dipimpin oleh kepala desa selaku ketua umum.
- c) Nama-nama calon terpilih dalam daftar rapat tersebut diajukan kepada kepala desa untuk mendapatkan keputusan dan selanjutnya melalui Camat disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura mendapat pengesahan.
- d) Masa bakti pengurus LKMD adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali setelah habis masa baktinya.

Setelah mendapat pengesahan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura pengurus LKMD di kedua desa ini dilantiaik oleh

Camat atas nama Bupati pada suatu rapat atau upacara tertentu yang khusus diadakan untuk itu. Dengan demikian secara resmi terbentuklah kepengurusan LKMD di kedua desa itu.

Walaupun pada bagian ini penggambaran kepemimpinan formal dalam masyarakat pedesaan lebih dititik beratkan kepada unsur-unsur pemimpin yang terkait dalam pemerintahan desa, namun kepemimpinan formal tersebut tidak hanya tiga unsur pimpinan dimaksud, tetapi terdapat juga kepemimpinan formal di bidang lain terutama di bidang pendidikan. Yang dimaksudkan di sini adalah kepemimpinan tersebut didasarkan atas pengangkatan pemerintah atau pejabat atasan hanya saja untuk bidang-bidang tertentu.

Sebagai contoh nyata adalah kepemimpinan seorang kepala sekolah dasar negeri di daerah pedesaan. Secara umum kepala sekolah dasar desa ini termasuk unsur kepemimpinan dalam masyarakat desa. Sistem dari kepemimpinan kepala sekolah dasar ini jelas berbentuk formal diangkat oleh pejabat pendidikan yang berwenang di tingkat kabupaten atau propinsi. Sebagai seorang pemimpin sekolah dasar memberikan corak tertentu terhadap kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan terutama menyangkut hak dan kewajiban pemerintahan desa khususnya di bidang peningkatan kecerdasan rakyat. Walaupun demikian pola kepemimpinan di bidang pendidikan dan bidang-bidang lainnya yang menyangkut masyarakat di pedesaan.

3.2.2 Sistem Kepemimpinan Informal

Agar tidak memberi interpretasi yang salah/keliru tentunya sebelum dalam membahas atau menjelaskan tentang kepemimpinan informal, dirasa perlu ada kesamaan konsep tentang apa sebenarnya kepemimpinan informal? Samakah kepemimpinan informal dengan kepemimpinan formal tradisional? Namkapnya konsep-konsep ini menurut team peneliti cukup prinsipil untuk diketahui termasuk pula pemberian arti yang tegas, sehingga tidak salah kaprah nanti dalam hal pernyataan konsep.

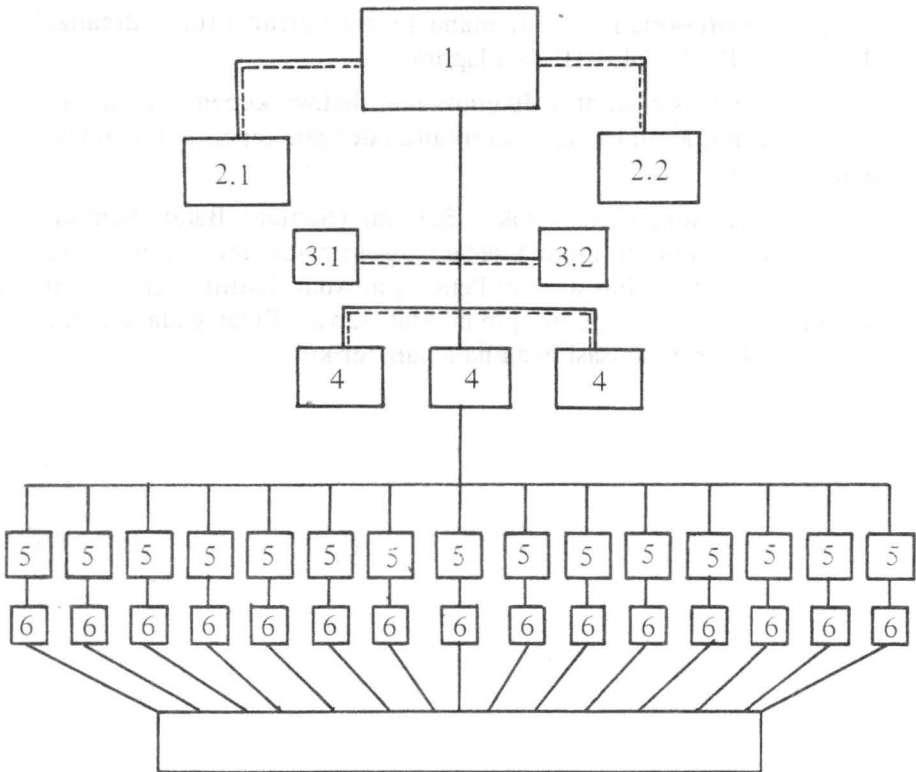
Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebetulnya ada dua kekuatan sosial yang punya peran dalam hal kehidupan masyarakat. Dua kekuatan dimaksud, terwujud dalam apa yang dikenal dengan: (a) kepemimpinan formal dan (b) kepemimpinan informal. Khusus untuk kepemimpinan informal; berdasarkan peneliti-

an lapangan dikenal dengan kepemimpinan adat atau tradisional. Dengan demikian pemimpin informal di sini, diidentikkan dengan pemimpin formal tradisional. Dan barangkali untuk pemimpin yang terakhir – non formal – lebih banyak dihubungkan dengan ”profesionalisasi”, di mana secara berturut-turut dibahas dalam Bab IV, V, VI, VIII dari laporan ini.

Padapenjelasan di atas dikemukakan bahwa kepemimpinan informal di sini, lebih banyak keterkaitan dengan kepemimpinan tradisional/adat.

Pada umumnya masyarakat Sentani (Sentani Barat, Sentani Tengah dan Sentani Timur) secara birokratisasi mengenal secara baik, apa yang disebut dengan Pemimpin Adat. Untuk mengetahui struktur organisasi kepemimpinan adat dapat dilihat pada gambar bagan struktur organisasi pada halaman berikut.

Bagan 4
Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Tradisional/Agat
(Ondoafi) Masyarakat Sentani, Kecamatan Sentani



Keterangan :

----- = garis Koordinasi

————— = garis Komando

- 1 = Ondoafi/Ondofolo
- 2.1 = Abu Afa (Ayafu Norofa)
- 2.2 = Abu Afa (Meaghban Norofa)
- 3.1 = Abu Agkho (Abu Agkho Khabam)
- 3.2 = Abu Agkho (Abu Agkho Khandin)
- 4 = Aranggae
- 5 = Kotelo
- 6 = Abu Agkho (Kotelo)
- 7 = Ro-Mie

Di lihat dari segi adat, *Ondoafi* justeru merupakan penguasa tertinggi. Punya tugas memimpin/menyelenggarakan upacara-upacara adat, menyelesaikan sengketa-sengketa adat, mengawasi pemakaian tanah-tanah adat (*ulayat*). Dan urusan keluar *Ondoafi* mewakili masyarakat setempat (adat) sepanjang urusan-urusan itu menyangkut kepentingan adat. Kewenangannya pun cukup luas, mencakup fitra *kanipughla* (*kani=tanah, pu=air dan ghla=hutan*). Pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat setempat.

Di dalam struktur organisasi, *Abu Afa* merupakan pembantu terdekat *Ondoafi*. Hal-hal yang bersifat sangat rahasia, hanya cukup diketahui oleh *Ondoafi* dan pembantu ini. Dilihat dari jabatannya, dibedakan kedalam: *Ayafu Norofa* (*sayap kanan*) dan *Meaghban Norofa* (*sayap kiri*).

Ayafu Norofa mengurus seluruh aktivitas (adat) yang berhubungan dengan kepentingan kampung. Apabila *Ondoafi* meninggal dunia, sementara anaknya (laki-laki dan tertua) masih di anggap *belum dewasa*, jabatan ke-*Ondoafi-an* dipegang olehnya. Oleh karena tugasnya mengurus kepentingan kampung, disebut sebagai *Yo Ondofolo* (*Ondoafi kampung*). Sedangkan *Meaghban Norof*, punya tugas menyimpan semua harta kekayaan, termasuk harta waris/peninggalan milik keluarga *Ondoafi*.

Dilihat dari pelaksanaan tugas, *Abu Agkho* (*Pesuruh*) di bedakan ke dalam: *Abu Agkho Khabam* (*Senior*) dan *Abu Agkho Khandin* (*Yunior*). Kedua pesuruh ini punya tugas memimpin upacara-upacara adat yang diselenggarakan, antara lain: Upacara pelantikan maupun kematian *Ondoafi*. Secara teknis, penanganannya dipercayakan sama *Abu Agkho Khandin*, sedangkan *Abu Agkho Khabam*, cukup mengawasi saja. Apabila pada saat pelaksanaan, ada acara yang kurang beres, barulah *Abu Agkho Khabam* ini turun tangan.

Aranggae adalah identik dengan *tungku* (tempat masak). Konotasi semacam ini memberi kejelasan bahwa semua persoalan yang menyangkut urusan adat, sebelum dijadikan sebagai keputusan, biasanya diselesaikan dalam arti dibicarakan lebih dahulu di tingkat ini. Jadi barangkali *Aranggae* disini lebih banyak disebut sebagai *'ewan Adat*. Dan di dalam struktur organisasi, mempunyai

kedudukan setingkat dengan *Ondoafi*. Dan dengan demikian perangkat ini tidak bertanggung jawab pada *Ondoafi*.

Kotelo secara harafial berarti kepala suku/marga. Punya tugas mengurus kepentingan termasuk menyelesaikan persoalan-persoalan di tingkat sukunya. Sebelumnya, secara kedalam *kotelo* ini punya kewenangan yang cukup besar, karena langsung bertindak atas nama sukunya, antara lain seperti: mengawinkan termasuk menerima harta maskawin anggota keluarga sukunya.

Di tingkat *kotelo*, dibantu dengan seorang *Abu Agkho*. Dengan tugas antara lain: menjaga harta (kekayaan) perkawinan dan memimpin upacara kematian.

1). Syarat-Syarat dan Faktor Pendukung Kepemimpinan Adat/ Tradisional

Berbicara tentang syarat-syarat dan faktor pendukung kepemimpinan *Ondoafi*, tentunya ada hal penting harus dikemukakan lebih awal dalam mendukung bahasan ini. Jabatan ke-*ondoafi*-an merupakan warisan pusaka (turun-temurun). Maksudnya, jabatan ini hanya di pegang oleh keluarga *Ondoafi*; dalam artian apabila *Ondoafi* itu meninggal dunia, diwariskan kepada anaknya (laki-laki dan mertua). Dan andaikan anak itu belum dewasa (dilihat dari adat) jabatan ini untuk sementara dipegang oleh pembantu *Ondoafi* (*Abu Afa*).

Adapun syarat-syarat untuk di angkat menjadi *Ondoafi*, adalah sebagai berikut :

- a). Berasal dari keturunan/keluarga *Ondoafi*.
- b). Dewasa
- c). Menguasai secara baik adat-istiadat.

Selain syarat-syarat formal ini, perlu dipenuhi beberapa lain, sebagai berikut :

- a). Punya kepribadian yang jujur, benar, bertanggungjawab, serta berani atas kebenaran.
- b). Cerdas dan menguasai adat-istiadat secara baik.
- c). Lancar berbahasa dan berkata-kata, sehingga meyakinkan orang lain dengan maksud baik dan dapat mempengaruhi untuk melakukan pekerjaan dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat.

2). Hak dan Kewajiban

Sebagai pemimpin adat, oleh masyarakat setempat dianggap sebagai Penguasa Tertinggi (Adat). Dengan demikian, Ondoafi dalam menjalankan tugas yang diemban mempunyai hak-hak, antara lain sebagai berikut :

- a). Mewakili masyarakat (adat) untuk menyelesaikan urusan-urusan dan masalah-masalah yang terjadi/timbul di luar wilayah hukum adatnya.
- b). Menguasai *fitrah kanipughla* (tanah, air dan hutan) secara baik, dan penguasaannya untuk kesejahteraan masyarakat setempat.
- c). Memimpin rapat-rapat adat yang diselenggarakan.

Sebaliknya, kewajiban-kewajiban Ondoafi, antara lain sebagai berikut :

- a). Menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi.
- b). Menjaga/melindungi dan memelihara secara baik kekayaan alam yang ada (*kanipughla*) agar dapat dimanfaatkan secara baik demi kesejahteraan masyarakat.
- c). Melindungi masyarakat dari perlakuan yang tidak adil.
- d). Menyelenggarakan ritus-ritus tradisional (upacara-upacara adat).

3). Atribut dan Simbol Kepemimpinan Adat/Tradisional

Ondoafi di mata masyarakat Sentani (Adat) adalah junjungan dan panutan kaum. Dengan demikian atribut dan simbol memegang peran penting, dalam artian selain ukuran kekuasaan dan pengakuan, juga untuk membedakan dengan masyarakat biasa.

Secara ideal, rumah dan pakaian merupakan atribut dan simbol yang harus dimiliki oleh Ondoafi. Rumah di sini punya makna ganda. Di satu sisi sebagai tempat tinggal atau berteduh, dan di sisi lain dilihat dari konteks budaya. Artian ini punya konsekuensi logis sebagai perlambang kekuasaan dan kewibawaan.

Data di lapangan menunjukkan bahwa konstruksi bangunan rumah milik Ondoafi jauh lebih besar (dan luas) dibanding dengan rumah masyarakat biasa. Dan pada setiap dinding diberi ornamen-ornamen tertentu yang bermakna religius. Demikian halnya de-

ngan bubungan/atap rumah diberi simbol-simbol tertentu, berbentuk seperti: burung, ikan, ular, manusia dan lain sebagainya.

Selain rumah, juga pakain sebagai perlambang. Fungsi pakaian di sini selain sebagai alat untuk menutup diri, juga menunjukkan keanggunan Ondoafi. Dan biasanya digunakan hanya pada ritus-ritus tradisional tertentu. Pakaian dimaksud di sini dilihat dalam konteks perwujudan dari beberapa bentuk/wujud dan merupakan satu kesatuan yang utuh, antara lain terdiri dari :

- a). *Nai* (ikat pinggang); terbuat dari sejenis kayu, dan hiasi dengan manik-manik tertentu.
- b). *Kemba (Nokeng)*; dibuat dari kulit kayu, dan di dalamnya berisi kapur, pinang dan siri.
- c). *Knali* (hiasan kepala); dibuat dari bulu burung.
- d). *Onei* (anting-anting); terbuat dari kulit kerang.
- e). *Siakha* (burung cenderawasih) yang sudah dikeringkan.
- f). *San* (Tombak); terbuat dari sejenis kayu, dan berfungsi sebagai alat perang.
- g). *Nunggu* (tifa); terbuat dari sejenis kayu tertentu, dan berfungsi penabuh.

4). Cara Pengangkatan dan Upacara Ondoafi.

Idealnya, proses pergantian pimpinan Adat, dilakukan setelah Ondoafi meninggal dunia. Seperti pada penjelasan sebelum, bahwa jabatan ini merupakan warisan keturunan (Ondoafi), sehingga haanya yang berhak menggantikan adalah dari keluarga Ondoafi yang bersangkutan. Hanya saja seniriotas, mutlak diperhitungkan. Ada satu kasus yang perlu diketengahkan sebagai acuan pikir. Terkadang sang Ondoafi ini punya isteri dalam jumlah banyak, secara adat yang berhak mewarisi titian ke-ondoafi-an adalah anak laki-laki isteri pertama. Akan tetapi ternyata isteri ini tidak punya anak (dalam arti hanya anak perempuan saja). Sementara jabatan ini dipegang oleh Abu Afa; sambil menunggu anak laki-laki dari isteri berikut. Masalah yang terjadi adalah oleh karena secara adat yang berhak mewarisi termasuk memiliki harta pusaka adalah isteri pertama (termasuk anak-anak perempuan), sehingga terkadang timbul bentrok dengan anak-anak dari isteri-isteri berikut.

Adalah menjadi tradisi bagi masyarakat di kedua lokasi penelitian bahwa setiap pergantian pimpinan Adat (Ondoafi), disertai dengan upacara-upacara adat. Ritus ini sebetulnya dilihat dari konsep politik ini cukup penting karena itu merupakan perlambang adanya – pengakuan dan penerimaan secara resmi – dari masyarakat (sebagai yang dipimpin).

Biasanya yang menangani penyelenggaraan ritus ini adalah *Abu Angkho*. Sedang tugas *Abu Afa* adalah mendandani Ondoafi termasuk melilitkan nai ke badannya. Di atas kepala diletakkan siakha (burung cenderawasih), pada bahu disandangkan kempa. Di tangan kanan diberikan tempat kapur dan sementara dari dalam kempa dikeluarkan kapur, pinang dan sisi untuk dimakan.

Kemudian, Abu Agkho melantik Ondoafi dengan janji berbentuk ucapan kata-kata sebagai berikut :

”Saya mengangkat/menobatkan Ondoafi sebagai pemimpin baik keluar maupun ke dalam. Saya letakkan/limpahkan baik orang yang dari jauh ataupun dekat, patuh untuk mendengarkan perintah Ondoafi. Selama dalam tugas nanti, kamu tidak bisa dibiasakan oleh sesuatu bencana maupun penderitaan/kemiskinan. Kamu diberkati baik darat, laut dan harta benda dilimpahkan kepada kamu”.

Pada saat ritus ini diadakan, biasanya semua Ondoafi di danau Sentani, termasuk Ondoafi-Ondoafi lain di luar danau, seperti dari: Genyem, Depapre, Skou, Nafri, Tobati, Enggros, Arso dan Waris ikut hadir. Dan tugas mereka selain memberi dukungan moral, termasuk memberi nasehat-nasehat, petuah dan pesan agar di dalam kepemimpinan Ondoafi baru ini, dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

Menjelang penyelenggaraan ritus ini, biasanya tugas menghubungi Ondoafi di sekitar danau (masih punya hubungan keluarga) untuk menangkap babi. Pengadaan daging dimaksud untuk menjamu undangan selama acara ritus ini berlangsung.

BAB IV

POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG SOSIAL

4.1 Organisasi Dalam Kegiatan Sosial

Data di lapangan menunjukkan bahwa organisasi sosial yang ada di kedua lokasi penelitian dapat dibedakan kedalam : (a) dikelola langsung oleh LKMD dan (b) di luar LKMD. Dengan demikian dalam bahasan nanti, masing-masing organisasi di atas akan diuraikan secara terpisah.

4.1.1 Dikelola langsung oleh LKMD

Secara struktural, salah satu program pokok dari LKMD adalah Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Dengan demikian Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dimaksud di sini merupakan satu gerakan pembangunan melalui keluarga dan dalam keluarga sebagai unit atau kelompok terkecil dalam masyarakat dengan wanita sebagai peran utamanya.

Selain dari Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1980 tentang penyempurnaan dan peningkatan fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi LKMD dan Instruksi Mendagri No. 25 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1980 serta Keputusan Mendagri No. 225 Tahun 1980 tentang susunan organisasi dan tata kerja LKMD, maka secara operasional landasan pendirian dan pelaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga ini adalah didasarkan atas Keputusan Mendagri No. 30 tahun 1981 tentang pembentukan Tim LKMD dan Tim Penggerak PKK. Di

samping itu juga di dasarkan atas Instruksi Menteri No. 10 tahun 1980 tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan Instruksi Mendagri No. 29 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pembentukan Tim LKMD dan Tim Penggerak PKK.

4.1.1.1 Susunan Kepengurusan PKK

Baik di kelurahan Dobonsolo maupun RW II Puai, terdapat kepengurusan ini. Dan secara formal dan operasional di bentuk pada tahun 1980, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura No. 84/Kpts/JP/1980.

Data di lapangan menunjukkan bahwa untuk kepengurusan PKK kelurahan Dobonsolo diketuai oleh ibu lurah sendiri (Ibu Feble), di bantu Ketua I dan Ketua II masing-masing Yulian T. Mahuse dan Alfonsina Felle. Sedangkan kepengurusan PKK di RW II Puai di ketuai oleh ibu kepala desa dibantu oleh Ketua I dan Ketua II masing-masing ibu Lusia Awaitaw dan Mintje Mimitaw.

Jabatan Sekretaris PKK di kelurahan Dobonsolo ditangani oleh Mien Malowali. Sedangkan untuk RW II Puaioleh Lena Awaitaw. Demikian halnya untuk jabatan bendahara. Untuk kelurahan Dobonsolo, ditangani oleh Ibu Yos Felle sedang di RW II Puai kepada ibu Mien Ohee.

Kepengurusan PKK ini dilengkapi dengan beberapa Seksi. Dan kelengkapan kepengurusan PKK ini hanya terbatas di kelurahan Dobonsolo. Dengan demikian dalam bahasan lanjut mengenai kelengkapan organisasi termasuk pula tempat dan kegiatan termasuk sistem kepemimpinan di sana, cukup dibicarakan terbatas pada yang ada di kelurahan Dobonsolo saja.

Kepengurusan PKK di kelurahan ini, dilengkapi dengan beberapa seksi; masing-masing: (1) usaha perbaikan gizi, dipercayakan kepada kepala ibu Estevina Sokoy dan dibantu oleh petugas Puskesmas Sentani, (2) ketrampilan jahit menjahit, dipercayakan kepada Yuliana Kalem dan Oktovina Pulalo (Untuk lingkungan Komba dan Yahim dipercayakan kepada ibu Alfonsina Mebri dengan dibantu ibu Mien Maloali, (3) pertanian dikoordinir oleh Oktovina Pulalo, (4) olah raga dipercayakan kepada ibu Yos Felle, (5) kebaktian dipercayakan kepada masing-masing pelayan jemaat dan (6) perlengkapan, dipercayakan kepada ibu Debora Felle.

4.1.1.2 Keanggotaan

Data di lapangan menunjukkan bahwa jumlah keanggotaan pada Kelurahan Dobonsolo adalah sebanyak 60 orang. Sedangkan jumlah anggota PKK di RW II sebanyak 40 orang.

4.1.2 Tempat Dan Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di kelurahan Dobonsolo pada umumnya di pusatkan di lingkungan I Yahim. Hal ini dikarenakan, disana merupakan daerah percontohan terhadap lingkungan lain di kelurahan tersebut. Kegiatan-kegiatan yang pernah dan sedang dilaksanakan di lingkungan ini, meliputi: pembuatan perumahan dan perbaikan lingkungan, air bersih, upaya peningkatan swadaya masyarakat, penyuluhan P4, pembuatan sabun detergent dan usaha ternak sapi. Tujuan pengadaan kegiatan-kegiatan dimaksud adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.

Pemusatan kegiatan PKK untuk lingkungan Yahin, terletak di Kantor-kantor Kelurahan, yaitu di Balai Pertemuan. Demikian halnya dengan lingkungan II Komba, bertempat di balai pertemuan. Hanya saja untuk RW II Puai terpusat di tempat kediaman/rumah ketua.

Jenis kegiatan yang dikelola di ketiga daerah ini, umumnya sama saja. Sebagai kejelasan terhadap kegiatan dimaksud secara singkat diuraikan sebagai berikut.

Seksi usaha perbaikan gizi, menangani atau mengusahakan penyuntikan setiap tiga bulan sekali, memberi makan dan susu bagi anak-anak kurang gizi. Pelaksanaan kegiatan perbaikan usaha gizi ini disesuaikan dengan jadwal Puskesmas di Kecamatan Sentani (setiap hari jumat). Seksi ketrampilan jahit menjahit membidangi kegiatan antara lain kegiatan pola khusus guntingan dan jahit. Pengadaan fasilitas seperti mesin jahit termasuk penyelenggaraan kursus ditangani langsung oleh PKK Dati I Propinsi Irian Jaya dan Dinas Sosial Kabupaten Jayapura. Selain itu pemberian penyuluhan, setiap hari selasa dan Jumat. Hasil kegiatan yang diperoleh lewat penyelenggaraan kursus di maksud, berbentuk taplak meja, pakaian anak dan perhiasan dinding. Hasil dimaksud biasanya dijual, untuk mengisi keuangan dari seksi dimaksud.

Seksi pertanian (baru dibentuk pada bulan Oktober 1984). Pengadaan alat-alat seperti: pacul, sekop dan bibit di datangkan atau diperoleh dari Seksi pertanian Kecamatan Sentani. Untuk sementara bidang usaha yang ingin di kembangkan adalah tanam-an jangka pendek, antara lain seperti: sayur-mayur dan hortikultura.

Seksi olahraga, dikhususkan pada cabang bola volly saja. Pengadaan sarana olah raga berbentuk bola dan net diperoleh dari kandep Kecamatan Sentani. Hari-hari olah raga atau latihan, di jadwalkan untuk setiap hari Selasa dan Jumat.

Seksi kerohanian, dengan tujuan pembinaan dan penyegaran rohani di kalangan ibu-ibu setempat. Jadwal kegiatan pelayanan di atur oleh tiap seksi kerohanian.

Berbicara tentang tujuan apa yang ingin dicapai lewat ke-ngurusan ini, antara lain sebagai berikut. Memberikan petunjuk praktis kepada ibu-ibu untuk meningkatkan pelayanan kesejah-teraan keluarga termasuk masyarakat, membantu anggota masya-rakat yang lain dan menunjang kegiatan-kegiatan lain di tingkat kelurahan.

4.1.3 Dikelola oleh Instansi Lain

Pembahasan tentang kepengurusan disini termasuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan, seputar PSM (Pembimbing Sosial Masya-rakat) saja. Sebetulnya secara struktural PSM ini berada dalam jangkauan LKMD (kordinasi) akan tetapi teknis operasional berada dalam kontrol Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Irian Jaya. Perbedaan semacam ini dianggap perlu, untuk meng-hindari bahasan yang sifatnya –tumpang tindih– sekaligus mem-beri acuan pikir yang tegas tentang masing-masing kepengurusan yang ada.

4.1.3.1 Susunan Kepengurusan

Seperti pada penjelasan di atas, bahwa bahasan ini hanya ber-kisar seputar Pembimbing Sosial Masyarakat (PSM). Oleh karena ada kecenderungan bahwa PSM terdapat di kedua lokasi peneliti-an, sehingga untuk memudahkan pembahasan, dirasa perlu untuk menguraikannya secara terpisah.

Di kelurahan Dobonsolo, kepengurusan PSM teralokir secara habis pada kedua lingkungan yang ada (Yahim dan Komba). Kepengurusan PSM Yahim dikoordinir oleh sdr. Yoel Felle, sedang kepengurusan PSM di Komba di koordinir oleh sdr. J. Sokoy. Sebagai catatan bahwa baik kepengurusan PSM yang ada di lingkungan Yahim maupun Komba, dibentuk pada tahun 1979.

Untuk RW II Puai, oleh karena kepengurusan PSM itu terpusat di ibu kota Desa Itakiwa (Ayapo), sehingga disini hanya terbatas pada Karang Taruna saja.

PSM di Yahim membidangi sejumlah satuan tugas, masing-masing: (1) Bimbingan Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat (BPKM), (2) Karang Taruna, (3) Bimbingan Sosial Masyarakat Perumahan dan Lingkungan (BSMPL), (5) Bantuan Penyantun Lanjut Usia (BPLU) dan (6) Pembinaan Peranan Fungsi Wanita (P2FW). Dari informasi di lapangan sebetulnya satuan-satuan PSM di atas terdapat pula di lingkungan Komba, akan tetapi mengingat kelengkapan data termasuk perangkat/pengurus yang ada, sehingga cukup di ambil saja yang ada di lingkungan Yahim.

4.1.3.1.1 Bimbingan Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat (BPKM)

BPKM ini didirikan pada tahun 1983, dengan ketua sdr. Permenas Felle, dan sasaran anak asuh sebanyak 30 orang. Jumlah ini sesuai dengan petunjuk dari Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Irian Jaya.

4.1.3.1.2 Karang Taruna

Organisasi ini dibentuk pada tanggal 23 Oktober 1983. Sebagai ketua dipercayakan pada sdr. Sefnath Felle, dengan anggota sebanyak 120 orang.

4.1.3.1.3. Bimbingan Pengembangan Anak Terlantar (BPAT).

Organisasi ini didirikan pada tahun 1983 dengan dengan dipimpin oleh sdr. Else Felle dan Sefnath Felle, masing-masing sebagai ketua dan sekretaris. Organisasi atau satuan tugas ini mempunyai anak asuh sebanyak 30 orang. Penentuan jumlah ini

diperoleh dari selain asal anak piatu dan juga dari keluarga besar (jumlah anak banyak).

4.1.3.1.4 Bimbingan Sosial Masyarakat Perumahan dan Lingkungan (BSMPL).

Satuan tugas sosial ini didirikan pada tanggal 24 Januari 1984, dengan di pimpin oleh Yoel Felle dan Domungus Taime, masing-masing sebagai ketua dan sekretaris. Beranggotakan sebanyak 30 orang.

4.1.3.1.5 Bantuan Penyantun Lanjut Usia (BPLU).

Satuan tugas sosial ini dipimpin oleh Yoel Felle dan Domungus Taime, masing-masing sebagai ketua dan sekretaris. Beranggotakan sebanyak 30 orang, dan dibentuk pada tahun 1984 dikoordinir oleh Arnold Doyapo dan Ishak Mimitauw. Keanggotaan dari satuan tugas sosial sebanyak 38 orang. Dan dikenal dengan sebutan "*Jaifuri*".

Pendidikan Luar Sekolah (PLS) di lingkungan Komba, dikelompokkan ke dalam dua bagian, masing-masing: (1) Kelompok I, dikenal dengan nama "*KUE*" (*Kena U Embay*), berarti: "sehati". Kepengurusan kelompok ini, dipercayakan pada Naftali Yoku dan Hendrik Kalembulu, masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris. Beranggotakan sebanyak 10 orang.

Untuk (2) Kelompok II, dikenal dengan sebutan "*SABETA*", berarti: "*ulat sagu*". Sebagai Ketua dan Sekretaris kelompok ini, dipercayakan kepada Pudjodiono dan Warsono. Beranggota sebanyak 10 orang.

Dua kelompok ini di asuh oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Irian Jaya.

4.1.4 Tempat dan Kegiatan

4.1.4.1 Pembimbing Sosial Masyarakat (PSM).

Di RW II Puai, pusat kegiatan dari organisasi sosial ini bertempat di rumah Ketua RW. Sedang untuk kelurahan Dobonso, teralokir pada masing-masing Balai Pertemuan yang ada.

Jenis kegiatan yang dikelola pada PSM di RW II Puai adalah penyiapan bahan bangunan berupa pengumpulan batu kali, peng-

gergajian balok, membangun fondasi rumah dan menaikkan kerangka rumah serta pemasangan atap. Pengadaan bahan non lokal, antara lain seperti: seng, semen engsel dan lain-lain disiapkan oleh Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Irian Jaya.

Untuk kegiatan yang dikelola oleh Karang Taruna adalah pembersihan kampung, terutama menjelang hari Kebaktian Sosial (20 Desember), pembuatan jalan padat karya dengan poros Puai-Yoka, pembuatan sawah (1 HA) dengan bantuan biaya asal KUD setempat sebesar Rp. 700.000,—, pembuatan rumah guru. Termasuk pula menjelang 17 Agustus di ramaikan dengan pertandingan sepak bola dan bola volly dengan RW lain (khusus di Desa Itakiwa).

Untuk kelurahan Dobonsolo, pelaksanaan kegiatan PSM teralokir di Lingkungan Yahim dan Komba. Bentuk kegiatan meliputi, antara lain, mendistribusikan setiap bantuan dengan baik kepada klien. Bantuan tersebut berbentuk: 30 ekor ayam kepada anak-anak terlantar, dengan jatah —satu anak lima ekor—, kepada orang tua anak (yang terlantar) masing-masing mendapat tiga ekor babi, kepada enam anak (penderita cacat) dilengkapi dengan modal usaha berbentuk Kios dan bantuan bibit ikan kepada anak-anak terlantar. Pengadaan bantuan ini dimulai sejak tahun 1979.

Selain bantuan di atas (Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Irian Jaya), dari Dinas Sosial Daerah Tingkat I Irian Jaya juga memberi bantuan berbentuk bahan-bahan bangunan seperti: seng (65 lembar) dan ditambah paku, dan gergaji belah sebanyak tiga buah, untuk setiap kepala keluarga.

Juga dari pihak Kecamatan Sentani, dibantu dengan 10 sak semen (untuk balai desa) seng 10 (untuk 30 kepala keluarga) dan ditambah dengan gergaji dan sekop termasuk pula bibit ternak ikan (masing-masing dua ekor) untuk setiap kepala keluarga.

Dari pihak Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I Irian Jaya dibantu dengan pompa sumur dan ditambah 10 zak semen untuk pembuatan sumur. Dan juga dari SKB di bantu dengan tiga buah radio (untuk kegiatan PLS). Juga dari Kepala Pelabuhan Udara Sentani berupa 10 sak semen. Dan dari pihak Yayasan Asing (WFI) berbentuk lima ekor ayam.

4.1.4.1.1 Bimbingan Pengembangan Kesehatan Masyarakat (BPKM)

Satuan tugas sosial ini membidangi dua tugas sasaran, masing-masing: (a) peternakan dan (b) perikanan. Kegiatan peternakan meliputi: ternak ayam, sapi dan babi. Pengadaan ternak asal Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Irian Jaya. Untuk kegiatan perikanan (darat) dari Depsos membantu dalam bentuk pengadaan bahan untuk pembuatan kurungan ikan dan pengadaan bibit ikan emas (sebanyak 300 ekor). Dan untuk meningkatkan jumlah ikan digalakkan kegiatan arisan antar anggota dengan uang sebewar Rp 13.000.00,—.

4.1.4.1.2 Karang Taruna

Satuan tugas ini memusatkan kegiatan pada tiga bidang usaha, masing-masing; (a) olah raga, (b) vokal group dan (c) pertanian. Untuk kegiatan olah raga, meliputi: bola kaki, bola volly dan bola basket. Kegiatan latihan dijadwalkan pada sore hari, setiap hari rabu dan sabtu. Untuk perlawatan keluar dengan antar Karang Taruna se-kecamatan Sentani. Untuk meningkatkan intensitas latihan, dari pihak Kantor Departemen Sosial, dibantu dengan dua buah bola kaki dan satu net volly.

Untuk kegiatan kesenian, telah dibentuk sebuah vokal group, berfungsi pada saat acara gerejani. Untuk meningkatkan intensitas latihan dan pelayanan, dibantu dengan pengadaan sebuah gitar dari pihak Dep-sos.

Di bidang pertanian, secara aktif digalakkan dengan bantuan peralatan seperti: tiga buah pacul, tiga buah parang dan tujuh buah kampak. Selain itu juga dibantu pula dengan 10 kg bibit kacang tanah, 10 kg bibit jagung dan satu kg bibit sayur pertsai.

4.1.4.1.3 Bimbingan Pengembangan Anak Terlantar (BPAT).

Satuan tugas sosial ini memusatkan kegiatannya pada masing-masing lokasi yang ada. Kegiatan yang ditangani oleh satuan ini terpusat pada kegiatan peternakan, dengann skala prioritas ternak ayam potong. Untuk itu telah dibangun sebuah kandang ayam, atas bantuan dan kerja sama orang tua anak.

Bantuan perda, diserahkan pada bulan Nopember 1984, sebanyak 250 ekor. Untuk periode ini, seluruhnya untuk di jual. Hasil penjualan, dibagikan kepada 30 anak dimaksud. Selebihnya digunakan oleh Badan Pengurus untuk membangun sebuah kios dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak terlantar.

4.1.4.1.4 Bimbingan Sosial Masyarakat Perumahan dan Lingkungan (BSMPL).

Satuan tugas sosial membidangi kegiatan di bidang perumahan dan lingkungan. Kegiatan yang dilakukan dikelompokkan kedalam dua tahap masing-masing sebagai berikut.

Kegiatan tahap pertama, bersama 30 kepala keluarga menyiapkan 30 rumah, berukuran 7 x 5 meter, berdasar petunjuk dari Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Irian Jaya. Dari sana juga mendapat bantuan seng untuk masing-masing keluarga di atas sebanyak 60 lembar. Selain itu melalui satuan tugas sosial ini digalakkan kegiatan arisan setiap minggu dengan jatah untuk masing-masing kepala keluarga, dengan dana sebesar Rp. 5000.00,-. Dari hasil arisan ini dipergunakan untuk membeli bahan bangunan dengan sistem giliran.

Kegiatan tahap kedua, selain 30 kepala keluarga (jadi anggota BSMPL) di tambah lagi dengan 60 kepala keluarga menyiapkan 60 rangka rumah dengan ukuran rumah seperti tersebut di atas. Dari pihak Kanwil Sosial dibantu dengan seng 60 lembar untuk setiap kepala keluarga. Kegiatan lain yang juga digalakkan bahwa pada waktu itu bersama 15 kepala keluarga mendaftarkan diri pula untuk menyiapkan kerangka rumah. Mereka juga masing-masing mendapat bantuan seng sebanyak 60 lembar.

Untuk meningkatkan intensitas dan efektivitas kerja di lokasi, dari pihak Kantor Wilayah Departemen Sosial dengan melalui organisasi sosial ini menyerahkan alat-alat bangunan berupa: empat buah gergaji, empat buah palu, empat buah sekop, empat buah water pass, empat buah parang, empat buah kampak, empat buah batu gosok, empat buah pensil kayu dan empat buah mal (cetakan batu tela).

4.1.4.1.5 Bantuan Penyantun Lanjut Usia (BPLU)

Pemusatan kegiatan yang dikelola oleh satuan organisasi sosial ini, dikelola di masing-masing lokasi, dengan jumlah anggota sebanyak 30 orang lanjut usia.

Kegiatan yang dikerjakan di prioritaskan usaha peternakan ayam kampung dan babi. Jumlah ternak yang disiapkan adalah sebagai berikut: untuk ayam (kampung) sebanyak 50 ekor dan (b) babi sebanyak 10 ekor. Manfaat adanya usaha sosial ini adalah untuk di jual. Hasil penjualannya dibagi-bagikan kepada para lanjut usia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

4.1.4.1.6 Bantuan Penyantun Lanjut Usia (BPLU)

Kegiatan ini diarahkan kepada membina wanita-wanita di pedesaan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketrampilan di bidang usaha, seperti: jahit-menjahit, masak-memasak dan pertanian (di lingkungan). Untuk memudahkan mekanisme kerja termasuk pengawasan/pengendalian wanita-wanita yang tersebar di lingkungan Yahim dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, dengan bidang sasaran kerja yang berbeda.

Kelompok I, bergerak di bidang masak-memasak. Kegiatan ini dilakukan pada setiap hari Selasa (sore). Bahan panganan seperti: ubu-ubian dan pisang dibebankan kepada ibu-ibu pada kelompok itu. Hasil masakan ini dijual kepada masing-masing anggota. Dan dari hasil yang diperoleh nanti dimasukkan ke dalam kas kelompok.

Kelompok II, membidangi kegiatan jahit menjahit. Kegiatan ini dilakukan pada setiap hari Kamis (sore). Hasil jahitan atau sulaman, berupa taplak/pengalas meja, pakaian bayi dan hiasan dinding, dijual pada masing-masing anggota kelompok. Hasil dari usaha ini disetor ke kas kelompok.

Kelompok III, membidangi usaha pertanian. Kegiatan ini dikerjakan pada setiap hari Sabtu (sore). Mekanisme kerja diawali dengan pengolahan sebidang tanah secara intensip. Setelah itu ditanami dengan tanaman sayur-sayuran maupun hortikultura. Hasil panen, selain di jual dikalangan anggota juga diusahakan pemasaran ke pasar Sentani.

Untuk menunjang kegiatan P2FW, dari pihak Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Irian Jaya, membantu kelompok I dengan fasilitas berupa : kompor dua buah, oven dua buah, alat penggiling mie (1 buah), dan panci (1 buah). Untuk kelompok II, memperoleh bantuan berbentuk mesin jahit (1 buah) dan ditambah benang, gunting serta jarum secukupnya. Dan untuk kelompok III, di bantu dengan pacul (6 buah) parang (6 buah), sekop (6 buah) dan bawang merah (bibit) dua kilogram.

4.1.4 Pendidikan Luar Sekolah (PIS).

Kegiatan dari organisasi sosial ini terpusat di masing-masing lokasi (penelitian). Untuk kelurahan Dobonsolo, teralokir pada lingkungan Yahim dan Komba. Demikian halnya di RW II Puai.

Kegiatan yang dilakukan di masing-masing lokasi adalah mengikuti secara intensif acara siaran pedesaan yang diselenggarakan atas kerja sama RRI Nusantara V Jayapura dengan Pendidikan Luar Sekolah, untuk malam hari. Paket acara yang diudarkan mencakup masalah-masalah pertanian, ternak dan pemeliharaan lingkungan. Selain itu juga lewat PLS, juga diinformasikan pesan-pesan pembangunan berbentuk petunjuk praktis dalam hal ini jenis-jenis ketrampilan tertentu.

4.2 Sistem Kepemimpinan

Dalam sistem kepemimpinan ini akan dibahas secara terpisah syarat-syarat dan faktor pendukung kepemimpinan setiap organisasi sosial yang ada di kedua lokasi penelitian ini. Di samping itu juga akan diuraikan hak dan kewajiban, simbol atau atribut kepemimpinan dan cara-cara pengangkatan serta upacara yang dilakukan jika ada, pada waktu pengukuhan seseorang atau sekelompok orang yang menjadi pemimpin.

4.2.1 Syarat-syarat dan Faktor Pendukung

4.2.1.1 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Untuk dapat menjabat sebagai Ketua PKK syaratnya adalah isteri Lurah. Sedang jabatan lainnya seperti Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara, termasuk pula Ketua-ketua Kelompok harus terdiri dari pemuka wanita yang ada di lokasi penelitian. Pemuka wanita maksudnya tidak saja pemimpin suatu organisasi atau kelompok wanita tetapi juga tokoh-tokoh wanita yang mem-

punya pengikut di kalangan masyarakat wanita karena tingkat pendidikannya di bidang ilmu pengetahuan dan kemasyarakatan. Faktor pendukung kepemimpinan PKK ini selain terpenuhinya syarat-syarat kepengurusan di atas, pengurus PKK bersangkutan harus mempunyai pemahaman dan pengetahuan di bidang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan mempunyai kepribadian yang menarik, berwibawa dan aktif dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang direncanakan.

4.2.1.2 Pembimbing Sosial Masyarakat (PSM)

Berbicara tentang syarat-syarat kepengurusan Pembimbing Sosial Masyarakat (PSM) di mana satuan-satuan organisasi sosial terdiri dari: (1) BPKM, (2) Karang Taruna, (3) BPAT, (4) BSMPL, dan (6) P2FW untuk menjadi pengurus di kedua lokasi penelitian, perlu memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

- 1). Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945,
- 3) Melaksanakan dan mengamalkan Ketetapan MPR-RI NO. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
- 4) Memiliki pengetahuan dan ketrampilan berorganisasi serta kemauan dan kemampuan pengabdian di bidang kesejahteraan sosial.
- 5) Yang bersangkutan adalah penduduk Desa dan bertempat tinggal tetap.
- 6) Berumur antara 18 tahun sampai dengan 30 tahun.

Faktor pendukung dari satuan-satuan organisasi sosial ini adalah pandai bergaul, berwibawa, mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap semua golongan pemuda/remaja yang ada di lokasi penelitian. Di samping itu yang bersangkutan lebih mementingkan hidup bermasyarakat daripada kepentingan individu atau golongan.

Di dasarkan atas kenyataan yang dijumpai di lapangan, kiranya keberhasilan satuan-satuan organisasi sosial ini sangat tergantung kepada faktor pendukung kepemimpinan sebagai tersebut di atas di samping terpenuhinya syarat-syarat kepemimpinan terutama di bidang kecerdasan dan ketrampilan berorganisasi serta mem-

punya kemauan dan kemampuan pengabdian dalam hal kesejahteraan sosial.

4.2.1.3 Pendidikan Luar Sekolah (PLS)

Berbicara tentang syarat-syarat yang dimiliki oleh pengurus Pendidikan Luar Sekolah, perlu memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Berasal dari daerah setempat.
- 2) Berpengetahuan dan trampil dalam berorganisasi.
- 3) Terdidik.
- 4) Sehat jasmani dan rohani.

Faktor pendukung dari kepemimpinan Pendidikan Luar Sekolah adalah di senangi, mempunyai pengetahuan luas, mampu mengorganisir dan aktif tanpa mengharapkan imbalan jasa dalam melakukan kegiatan organisasi.

4.2.2 Hak dan Kewajiban

4.2.2.1 Kepemimpinan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Anggota pengurus PKK (dalam LKMD) berhak mengajukan usul, saran dan ikut serta melaksanakan tugas Seksi PKK dalam LKMD, yaitu :

- 1) Melaksanakan 10 program pokok PKK.
- 2) Mensukseskan program LKMD dalam ruang lingkup keluarga.
- 3) Melaksanakan program P2WKSS untuk meningkatkan peranan wanita.

Kewajiban anggota Seksi PKK dalam LKMD adalah aktif melaksanakan tugas Seksi PKK sesuai dengan fungsi PKK yaitu :

- 1) Memberikan informasi kepada Ketua Umum LKMD dan Tim Penggerak PKK Kecamatan tentang kebutuhan esensi dan skala prioritas pelaksanaan 10 program PKK.
- 2) Menyusun rencana pelaksanaan program di Desa.
- 3) Menggerakkan keluarga dalam masyarakat lingkungannya untuk terlaksananya semua program PKK.
- 4) Memanfaatkan kader-kader wanita dalam PKK ke dalam kelompok-kelompok kerja.
- 5) Memberikan bimbingan motivasi dan petunjuk kepada keluarga dan masyarakat untuk terlaksananya program-program PKK.

4.2.2.2 Kepemimpinan Pembimbing Sosial Masyarakat (PSM)

Pimpinan satuan-satuan organisasi sosial (BPKM, Karang Taruna, BPAT, BSMPL, BPLU dan P2FW) berhak untuk menetapkan kebijaksanaan operasional dalam melakukan program-program kerja yang telah ditetapkan dan digariskan oleh organisasi melalui ketentuan-ketentuan yang berlaku. Di samping itu pengurus dari satuan-satuan ini berhak untuk mengambil keputusan sementara untuk melakukan tindakan disiplin yang bersifat sementara terhadap para anggota yang melanggar ketentuan organisasi dan mencemarkan nama organisasi.

Hal lainnya adalah mempergunakan dan memanfaatkan dana dan fasilitas yang ada untuk kepentingan organisasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan pedoman organisasi. Selain daripada itu anggota pengurus sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing berhak mewakili organisasi dalam mengadakan hubungan keluar baik terhadap masyarakat maupun pemerintah.

Kewajiban pimpinan atau pengurus satuan-satuan organisasi sosial adalah bersama-sama pemerintah menanggulangi berbagai permasalahan sosial dalam lingkungannya dalam rangka pembinaan dan pengembangan generasi muda. Di samping itu pengurus-pengurus di maksud berkewajiban pula melakukan peran aktif sebagai wadah pembangunan kesejahteraan sosial, khususnya wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda dalam rangka usaha pemantapan fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dalam pembangunan, khususnya bidang kesejahteraan sosial.

4.2.2.3 Pimpinan Pendidikan Luar Sekolah (PLS)

Hak pimpinan atau pengurus Pendidikan Luar Sekolah adalah ikut merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan-kegiatan siaran pedesaan di lokasi penelitian masing-masing. Kegiatan tersebut meliputi mengedarkan acara siaran, menyiapkan peralatan/perengkapan termasuk prasarana siaran yang memadai.

Kewajiban pimpinan atau pengurus Pendidikan Luar Sekolah ini adalah menyelenggarakan tugas pokok program-program yang telah disusun. Secara umum kewajiban tersebut nanti disampaikan

kepada pengelola program sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4.2.3 Simbol/Atribut Kepemimpinan

Sebagai bagian dari sistem ini selain dari syarat-syarat, faktor pendukung, hak dan kewajiban seorang pemimpin atau kelompok pemimpin perlu pula kiranya dijelaskan tentang simbol/atribut kepemimpinan organisasi atau kelompok di bidang sosial ini pada kelurahan Dobonsolo dan RW II Puai.

4.2.3.1. Gelar / Nama.

Baik kepemimpinan atau kepengurusan PKK, ζ BM dan PLS itu tidak mempunyai nama atau gelar yang melambangkan seseorang sebagai pemimpin di bidang yang bersangkutan. Hanya cukup dengan sebutan Ketua saja atau jabatan-jabatan pimpinan dalam organisasi atau kelompok seperti Ketua Umum, Ketua I, Ketua II dan seterusnya.

Dalam pertemuan-pertemuan resmi, nama dan gelar ini hanya disebutkan sesuai dengan kedudukan yang bersangkutan dalam organisasi atau kepemimpinan kelompok bersangkutan seperti : Sekretaris, Bendahara, Ketua Seksi dan atau anggota saja.

4.2.3.2 Tanda Kebesaran.

Sepanjang data yang diperoleh di lapangan, tidak ada penemuan tentang tanda-tanda kebesaran setiap pemimpin bidang sosial yang ada. Dengan demikian berarti tidak terapat tanda-tanda atau lambang tertentu yang membedakan para pemimpin dengan para pendukungnya. Hal ini tidak saja berlaku pada saat sekarang, tetapi juga sejak msa sebelumnya.

4.2.4 Cara-Cara Pengangkatan dan Upcara.

4.2.4.1. Kepemimpinan Pembinaan Kesejahteraan Sosial (PKK).

Untuk menduduki jabatan Ketua PKK secara otomatis dijabat oleh isteri ketua lingkungan. Dengan demikian dalam hal menyusun kepengurusan lengkap, Ketua ζ KK perlu berkonsultasi dengan Kepala Desa. Dan dalam konsultasi itu Ketua ζ KK dan Kepala Desa menginventarisasi pemuka-pemuka wanita yang dianggap mampu untuk menduduki jabatan kepengurusan Seksi PKK ini.

Setelah mendapat kata sepakat, para pemuka wanita diundang dalam suatu rapat khusus penyusunan pengurus. Dalam rapat itu ditetapkan personil yang akan menduduki jabatan kepengurusan tertentu pada seksi PKK.

Susunan kepengurusan ini oleh Kepala Kelurahan selaku Ketua LKMD diusulkan untuk mendapat pengesahan kepada Tim Penggerak Kabupaten melalui Tim Penggerak Kecamatan Sentani. Setelah mempertimbangkan usul tersebut secara matang Tim Penggerak Kecamatan Sentani atas nama Tim Penggerak Kabupaten Jayapura. Dengan pelantikan dimaksud, secara resmi terbentuklah pengurus Seksi PKK dalam LKMD di kedua lokasi penelitian.

4.2.4.2 Kepemimpinan Pembimbing Sosial Masyarakat (PSM).

Pengurus atau pemimpin pada satuan-satuan organisasi sosial dalam PSM terdiri dari pemuka remaja/pemuda. Pembentukan pengurus satuan-satuan ini adalah dengan cara pemilihan yang dilakukan dengan masyarakat dan dipimpin oleh Ketua PSM.

Setelah terbentuk pengurus dari masing-masing satuan-satuan organisasi sosial dimaksud, melalui Kepala Kantor Departemen Sosial Kabupaten Jayapura, diusulkan pengesahan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Irian Jaya, untuk menerbitkan Surat Keputusan yang isinya mensahkan dan menetapkan susunan personel atau kepengurusan. Dan dengan demikian berarti satuan-satuan organisasi ini telah mempunyai landasan hukum dan pembentukan dan pendiriannya.

4.2.4.3 Pemimpin Pendidikan Luar Sekolah (PLS)

Cara pengangkatan pimpinan atau pengurus ini sangat sederhana sekali, yaitu setelah secara aklamasi menunjuk Ketua dan Sekretaris termasuk menginventarisir anggota kelompok, kemudian disampaikan kepada Organisasi Pengelola susunan kepengurusan dimaksud untuk diketahui. Dan selanjutnya, dari Instansi atau Organisasi pengelola merencanakan jadwal acara siaran termasuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan kepada kelompok-kelompok dimaksud agar segera dapat menyesuaikan diri dengan waktu-waktu siaran nanti.

4.3 Fungsi Dan Pengaruh Kepemimpinan Bidang Sosial Dalam Masyarakat

Berbicara tentang kepemimpinan pedesaan di bidang sosial pada masyarakat di kelurahan Dobonsolo dan RW II Puai, sebenarnya tidak terlepas dari organisasi resmi yang ada, dalam hal ini Kelurahan dan Desa.

Secara organisatoris, birokrasi kepengurusan dari masing-masing kegiatan termaktub dalam program Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Selain itu dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan khususnya pembangunan di desa, semua pusat perhatian di arahkan kesana dalam rangka menata dan membentuk manusia-manusia pembangunan Indonesia yang siap pakai dan bermoral Pancasila dalam arti berbudi luhur.

Sejalan dengan komitmen –yang manusiawi ini diharapkan bahwa pada akhirnya keberhasilan pembangunan di desa lebih banyak ditentukan oleh peran aktif dari masyarakat setempat sebagai subyek pembangunan. Dan keberhasilan dari pembangunan itu juga antara lain dilihat dari sisi keterlibatan pemuka-pemuka atau tokoh-tokoh di bidang organisasi sosial.

Untuk memacu kecepatan proses pembangunan itu dari pimpinan-pimpinan dimaksud, dibutuhkan ketanggapan (kepekaan) terhadap keadaan disekitar. Dengan demikian diharapkan kepada pemimpin-pemimpin itu tidak saja berperan sebagai pelaksana aba-aba/intruksi dari pihak atas (supra-village), tetapi persoalan yang mendasar adalah bagaimana menterjemahkan konsep-konsep pembangunan dari atas kepada masyarakat disekitar dalam hal ini satuan-satuan kerja, sehingga dapat menyelesaikan dengan baik.

Memang di akui sebagai penterjemah konsep adalah hal yang sukar, karena lebih banyak diperlukan pemberian contoh/teladan dan sebagai panutan. Hal ini dikarenakan bahwa sebagai organisasi sosial, pilihan yang paling dilakukan adalah resiko pemenuhan kewajiban (sebagai pengurus) justeru lebih banyak bila dibandingkan dengan hak.

Melihat kenyataan seperti ini, dan diharapkan agar supaya pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang sosial dapat berhasil dengan baik, dibutuhkan adanya sikap kemandirian, peka terhadap keadaan di sekitar, keuletan, jujur dan berani bertanggung jawab.

Sebagai akibat dari kemajuan teknologi diperlukan metoda-metoda yang relevan dalam kehidupan masyarakat, tidak saja di bidang teknologi itu sendiri tetapi juga berkaitan dengan sikap mental masyarakat. Berkaitan dengan itu kepemimpinan di bidang sosial ini kelihatannya sangat berfungsi untuk membina dan menanamkan sikap mental pembaharuan kepada para pendukungnya baik dalam cara-cara berorganisasi maupun dalam hal melakukan aktivitas dan merupakan sistem nilai ke arah hal-hal yang mendukung pembaharuan.

BAB V

POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG EKONOMI

Kepemimpinan di bidang ekonomi dimaksudkan sebagai suatu peranan dari pemuka-pemuka masyarakat yang ikut aktif memikirkan, mengelola, membina dan mengendalikan usaha-usaha masyarakat dalam mata pencaharian hidup sehingga mengarah kepada peningkatan produktifitas dan income masyarakat di daerah yang bersangkutan dalam rangka mencapai tingkat penghidupan yang layak.

Bertolak dari pikiran yang demikian dan didasarkan atas kenyataan yang di kedua lokasi penelitian, yaitu adanya keragaman mata pencaharian hidup masih sangat terbatas pada usaha pertanian, sedangkan usaha-usaha lainnya sebagian besar hanya merupakan pekerjaan sampingan (khusus di kelurahan Dobonsolo) dan hanya menyerap tenaga kerja yang sangat relatif kecil. Dengan demikian maka kepemimpinan di bidang ekonomi juga tidak banyak jenis ragamnya, selain dari yang menyangkut kegiatan-kegiatan pertanian.

Jika kepemimpinan ini dikaitkan dengan jenis dan jumlah organisasi ekonomi yang ada, maka kelompok kepemimpinan bidang ekonomi yang terdapat di kedua lokasi ini hanyalah terbatas pada Koperasi Unit Desa (KUD).

5.1. Organisasi Dalam Bidang Ekonomi.

5.1.1. Komposisi Unit Desa.

Di kedua lokasi penelitian, masing-masing terdapat satu Koperasi Unit Desa. Untuk RW II Puai, nama koperasi ini disebut dengan KUD Walihole. Dan sebetulnya KUD ini merupakan cabang dan berpusat di ibu kota Desa Itakiwa (Ayapo). Sedangkan KUD di kelurahan Dobonsolo; meliputi lingkungan Yahim, Komba dan Yobe.

5.1.1.1 Susunan Kepengurusan.

Susunan kepengurusan Koperasi Unit Desa baik di RW II Puai maupun kelurahan Dobonsolo tidak jauh berbeda satu sama lain. Susunan pengurus tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua
- 3) Sekertaris.
- 4) Bendahara
- 5) Anggota Pengurus Bidang Pertokoan
- 6) Anggota Pengurus Bidang Pertanian.
- 7) Anggota Pengurus Bidang Perikanan
- 8) Anggota Pengurus Bidang Peternakan.
- 9) Anggota Pengurus Bidang Penggergajian.
- 10) Anggota Pengurus Bidang Penjaringan (Pengurangan Ikan)
- 11) Anggota Pengurus bidang Perusahaan.

Kepengurusan ini masing-masing di lengkapi dengan tiga orang sebagai anggota dan seorang Penasihat.

5.1.1.2 Keanggotaan.

Mengenai keanggotaan KUD di RW II Puai, hanya terbatas pada RW dimaksud, sebanyak 48 orang. Sedangkan untuk kelurahan Dobonsolo, keanggotaannya terbagi habis ke dalam ketiga lingkungan yang ada.

Adapun persyaratan untuk menjadi anggota KUD adalah sebagai berikut :

- 1) Melapor kepengurusan KUD
- 2) Memberi uang pangkal sebesar Rp. 5000,-

- 3) Setia dan jasa nama baik KUD
- 4) Tidak melibatkan dari dalam kegiatan-kegiatan di luar KUD yang bersangkutan.

5.1.2. Tempat dan Kegiatan.

5.1.2.1. pusat Kegiatan.

Pada umumnya kelompok tani ini mengorganisir diri di tingkat/lingkungannya masing-masing, maka pusat kegiatannya pun adalah di lingkungan yang bersangkutan. Seperti halnya kelompok tani di RW II Puai memusatkan kegiatan usaha taninya pada RW II Puai memusatkan kegiatan usaha taninya pada RW II PUai. Demikian sebaliknya dengan kelurahan Dobonsolo. Di dalam pengelolaan kegiatan-kegiatan kepengurusan, dilakukan di kantor KUD setempat.

5.1.2.2 Jenis Kegiatan.

Baik di RW II Puai dan kelurahan Dobonsolo, jenis kegiatan kelompok tani ini sama saja keadaannya.

Pada umumnya kegiatan kelompok tani tersebut adalah :

- 1) Penyediaan sarana-sarana produksi, misalnya benih, pupuk, obat-obatan, alat-alat pertanian, kredit, angkutan dan sebagainya.
- 2) Pemeliharaan dan Perbaikan.
- 3) Penyerahan ilmu/ketrampilan, komunikasi dan hubungan baik, misalnya kursus, diskusi, pertemuan dan lain-lain.
- 4) Mengatur pembagian kerja.

5.1.3. Tujuan Yang Akan Dicapai.

Secara umum tujuan yang akan dicapai oleh adanya Koperasi Unit Desa ini adalah meningkatkan kesejahteraan anggota, kemajuan daerah kerja dan masyarakat pada umumnya sehingga tercapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Maksudnya adalah berubahnya tingkat atau taraf kehidupan masyarakat dalam daerah kerja yang bersangkutan ke arah yang lebih baik secara merata di kalangan/masyarakat atau terutama bagi anggota pendukung Koperasi Unit Desa/Badan Usaha Unit Desa bersangkutan.

Bagi KUD untuk mencapai tingkat ideal atau masyarakat sejahtera seperti dikemukakan di atas sesuai dengan jenis dan fungsinya

yakni memberikan pelayanan berbagai kegiatan-kegiatan perekonomian pedesaan, maka KUD di bidang perkreditan bertujuan untuk membantu penumpukan modal dalam menyelenggarakan dan meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah pedesaan pada umumnya atau RW II Puai maupun kelurahan Dobonsolo pada khususnya. Dengan kata lain dapat dinyatakan tingkat yang akan dicapai KUD itu adalah untuk lebih memampukan KUD dalam memberikan pelayanan kepada anggota dalam masyarakat sekitarnya serta dalam memanfaatkan potensi perekonomian yang ada di RW II Puai dan Kelurahan Dobonsolo dengan sebaik-baiknya.

Di bidang penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi, barang-barang keperluan sehari-hari dan jasa-jasa lainnya untuk tingkat yang ingin dicapai adalah relatif lengkapnya faktor-faktor produksi yang dimiliki para anggota untuk dapat dimanfaatkan, meningkatkan produktifitas dan income masing-masing sehingga kesejahteraan anggota akan memperoleh perbaikan, begitu juga di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produksi.

5.2. Sistem Kepemimpinan

5.2.1. Syarat-syarat dan Faktor Pendukung.

Syarat-syarat kepemimpinan Koperasi Unit Desa atau KUD RW II Puai dan Kelurahan Dobonsolo adalah sebagai berikut :

- 1) Anggota yang mempunyai sifat jujur, terampil, ada pengertian tentang perkoperasian (diutamakan yang pernah mendapat pendidikan/kursus/latihan tentang perkoperasian).
- 2) Tidak mempunyai usaha yang bisa bersaing dengan usaha koperasi.
- 3) Aktif dalam usaha-usaha peningkatan kehidupan perekonomian masyarakat desa.
- 4) Telah memenuhi dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai anggota Koperasi.

Yang menjadi faktor pendukung dari kepemimpinan KUD ini adalah kewibawaan, keaktifan untuk kemampuan berorganisasi dari pimpinan yang bersangkutan. Di samping itu juga tersedianya waktu dari para pemimpin tersebut untuk mengelola atau menjalankan kegiatan koperasi sehari-hari. Ketaatan dalam menjalankan

kan ajaran agama dan menghormati norma-norma yang berlaku di desa setempat serta kemampuan untuk berusaha dengan instansi dan badan-badan lainnya baik pemerintah maupun swasta adalah pula merupakan faktor pendukung kepemimpinan di bidang perkoperasian di daerah penelitian.

Faktor-faktor pendukung kepemimpinan KUD ini adalah kewibawaan, keaktifan dan kemampuan hubungan dengan pihak-pihak lain dari pemimpin yang bersangkutan. Selain daeripada itu ketaatan beragama dan menghayati adat istiadat setempat serta menonjolkan usaha-usahnya dalam kegiatan pembangunan masyarakat pedesaan khususnya di RW II Puai dan Kelurahan Dobonsolo adalah merupakan faktor pendukung kepemimpinan KUD.

Jadi jelas syarat-syarat kepemimpinan KUD hampir sama saja dengan syarat-syarat Koperasi pada umumnya yaitu mempunyai sifat kejujuran dan ketrampilan kerja, mempunyai pengertian tentang perkoperasian dan telah memenuhi dan menjalankan hak dan kewajiban lain yang harus dipenuhi. Di samping itu yang bersangkutan tidak boleh merangkap sebagai pelaksana usaha KUD.

5.2.2. Hak dan Kewajiban.

Hak dari pengurus KUD yang terutama adalah menetapkan kebijaksanaan dalam KUD berdasarkan keputusan rapat anggota. Selanjutnya pengurus berhak mengangkat beberapa anggota sebagai manager di dalam mengelola kegiatan-kegiatan kelompok tani.

Sedangkan kewajiban dari pengurus KUD adalah melakukan pembinaan dan memberikan pelayanan kepada anggota secara aktif baik atas inisiatif pengurus maupun atas usul para anggota KUD. Di samping itu pengurus KUD berkewajiban melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam hubungannya dengan fungsi KUD.

5.2.3. Simbol/Atribut Kepemimpinan.

Sepanjang informasi yang diperoleh dalam penelitian kepemimpinan di bidang ekonomi, tidak ada yang mempunyai simbol-simbol atau atribut-atribut tertentu. Maksudnya adalah bahwa organisasi Koperasi Unit Desa baik yang berada di RW II Puai maupun kelurahan Dobonsolo tidak ditemui lambang-lambang

atau atribut-atribut tertentu yang menunjukkan identitas kepemimpinan dalam bidang ekonomi.

Lambang-lambang tersebut tidak saja berupa tanda-tanda kebesaran tetapi juga dalam bentuk pemberian nama atau gelar-gelar tertentu yang menyatakan seseorang atau sekelompok orang adalah pemimpin di bidang ekonomi di kedua lokasi penelitian dimaksud. Begitu juga atribut dalam bentuk pakaian dan perlengkapan hidup tidak ada ditetapkan dan dipakai yang menyatakan seseorang adalah pemimpin di bidang ekonomi.

5.2.4 Cara Pengangkatan dan Upacara.

Pengurus KUD dipilih secara demokratis dalam arti anggota bebas memilih calon-calonnya. Anggota pengurus dipilih, hendaklah mencerminkan semua kepentingan anggota yang ada. Pemilihan tersebut dilakukan dalam suatu Rapat Anggota KUD yang khusus diadakan untuk itu.

Perlu dikemukakan bahwa Rapat Anggota KUD dihadiri oleh utusan-utusan anggota kelompok sebagai peserta Rapat Anggota. Cara pemilihan sejauh mungkin berdasarkan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Jika tidak tercapai kata sepakat, maka pemilihan atau keputusan di ambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir.

Sebelum mulai memangku jabatan, anggota pengurus KUD yang telah berhasil dipilih tersebut, mengangkat sumpah atau janji sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengangkatan sumpah atau janji dari anggota pengurus ini adalah demi meyakinkan kepada yang bersangkutan bahwa tugas Pengurus adalah murni dan penuh tanggung jawab.

5.3 Fungsi Dan Pengaruh Kepemimpinan Bidang Ekonomi Dalam Masyarakat

Berdasarkan kenyataan yang ditemui di lapangan pengaruh dan fungsi kepemimpinan bidang ekonomi dalam masyarakat di RW II Puai dan kelurahan Dobonsolo, hampir sama saja keadaannya. Maksudnya adalah kepemimpinan bidang ekonomi di kedua lokasi itu menunjukkan pengaruh atau peranan yang menonjol dalam menggerakkan dan membina perekonomian masyarakat.

Sejalan dengan itu kepemimpinan KUD walaupun peranan dan pengaruh agak lebih baik di kelurahan Dobonsolo bila dibandingkan dengan RW II Puai, namun jika dibandingkan dengan beberapa desa yang maju perekonomiannya di daerah Irian Jaya, dapat dikatakan bahwa pengaruh dan fungsi kepemimpinan bidang ekonomi di kedua lokasi itu belum menunjukkan pencapaian sasaran yang berarti. Dikatakan demikian karena belum banyak anggota KUD yang terdaftar di kedua daerah penelitian (pada waktu penelitian ini berlangsung). Di KDU walihole tercatat 40 orang, sedangkan jumlah penduduk yang ada sebanyak 274 orang. Demikian juga untuk KUD Dobonsolo, dimana anggota KUD yang terdaftar sebanyak 20 orang, sedangkan jumlah penduduk yang terdaftar sebanyak 20 orang, sedangkan jumlah penduduk yang tersebar di ketiga lingkungan yang ada sebanyak 1303 orang. Dengan demikian berarti bahwa kepemimpinan di bidang ekonomi khusus KUD belum banyak menjangkau anggota masyarakat.

Jika ditelusuri secara mendalam pengaruh kepemimpinan di bidang ekonomi yang belum berperan sesuai dengan yang diinginkan, agaknya disebabkan adanya faktor timbal balik antara pimpinan itu sendiri dengan masyarakat yang dipimpin. Di satu pihak pemimpin bidang ekonomi ini masih terbatas pada kemampuan, pengetahuan dan teknik atau metoda yang digunakan dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya sedangkan di pihak lain warga masyarakat yang menjadi jangkauan kepemimpinan bidang ekonomi ini belum menunjukkan sikap yang mendukung terlaksananya ekonomi kekeluargaan untuk pembangunan di kedua lokasi penelitian dimaksud.

Untuk memecahkan masalah ini perlu kiranya dilakukan usaha-usaha yang intensif untuk membina dan meningkatkan kepemimpinan dan ketrampilan serta pengetahuan para pemimpin di bidang ekonomi ini pada masa yang akan datang. Dengan pembinaan dan peningkatan kepemimpinan bidang ekonomi ini diharapkan fungsi kepemimpinan yang bersangkutan dalam masyarakat pedesaan akan dapat berperan dengan baik. Fungsi dimaksud antara lain, adalah :

1. Mertampung aspirasi masyarakat pedesaan yang berkaitan dengan usaha-usaha dan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan guna meningkatkan perekonomian masyarakat dalam pembangunan Desa.

2. Merencanakan dan mengikutsertakan masyarakat dalam menyusun program-program di bidang ekonomi di daerah pedesaan.
3. Mendorong aktifitas masyarakat dalam kegiatan-kegiatan produktif dalam bidang ekonomi.
4. Menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan peranan dan tanggung jawab masyarakat pedesaan agar mampu mengurus diri sendiri dan berpartisipasi dalam pembangunan desa.
5. Mengawasi aktifitas dan kegiatan masyarakat untuk selalu mengarah kepada usaha-usaha yang produktif dan menghindari kegiatan-kegiatan yang kurang menguntungkan atau kurang produktif.

BAB VI

POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG AGAMA

6.1 Organisasi Dalam Bidang Agama

6.1.1 Gereja Keristen Injil (GKI)

Baik di kelurahan Dobonsolo maupun di RW II Puai (Desa Itakiwa, terdapat tiga Gereja (Kristen), yaitu : (1) Kristen Injili (GKI), (2) Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia (KINGMI) dan (3) Pantekosta. Dari data di lapangan, ternyata bahwa yang mempunyai kepengurusan yang lengkap dan sudah lama di sana, adalah GKI, sehingga dalam penulisan ini lebih banyak membahas diri kepada organisasi ini.

Untuk memudahkan pembahasan, di dalam uraian selanjutnya secara berturut-turut dibahas tentang: (1) Majelis Jemaat, (2) Persekutuan Wanita Gereja Kristen Injili (PWGKI), (3) Persekutuan Angkatan Muda Kristen (PAMGKI) dan (4) Sekolah Minggu.

6.1.1.1 Susunan Kepengurusan

6.1.1.1.1 Majelis Jemaat

Secara fungsional *Majelis Jemaat Peniel* (badan pelayan) terdiri dari pelayan jemaat, *penatua* dan *syamas/syamaset*. Sedangkan secara organisatoris, Majelis Jemaat ini diketuai oleh David Felle, dan sebagai sekretaris dan bendahara masing-masing Ismail Maluali dan Linus Felle.

Jabatan Penatua, sebanyak lima orang yaitu : David Felle, Elisa Felle, Linus Felle, Rehabiam Pangkali dan Cornelss Pakondo. Sebagai syamas dan syamaset terdiri dari : Hengki Felle, Benyamin Felle, Tresia Wali/Felle, Salomina Felle/Malowali, Belandina Felle/Swebu, Carolina Felle/Swebu dan Octovina Felle/Pankale. Sedangkan untuk pelayan jemaat dipimpin oleh Cristian Mehue.

Di lokasi II yaitu RW II Puai, sebagai ketua majelis jemaat dipercayakan kepada Bapak N. Tokoro, sedangkan sekretaris dan bendahara dijabat oleh Soleman Awaitaw dan Samuel Awaitaw. Untuk jabatan penatua dijabat oleh empat orang, masing-masing adalah: Agus Kalimbulu, Enos Ohee, Soleman Awaitaw dan Frans Ohe. Sebagai syamas adalah Zeth Deda, Soleman Awaitaw dan Frans Ohe. Sebagai syamas adalah Zeth Deda, Aser Fiabetaw, Arnold Awaitaw dan Martinus Ohe. Jabatan syamaset dipercayakan kepada Adolfina Kabei, Marice Ansaka, Karolina Kabu/Ohe. Majelis jemaat menunjuk Abraham Fiabetaw sebagai penasehat. Berdasarkan tempat pelayanan dibagi tiga (3) kelompok (*week*) yang terdiri dari kelompok I dipercayakan kepada Enos Ohe dan dibantu oleh Aser Awaitaw dan Karolina Kabu. Kelompok/week II dikoordinir oleh Agus Kalimbulu dibantu oleh Adolfina Kabey. Kelompok/week III dikoordinir oleh Soleman Awaitaw dengan dibantu oleh Arnold Awaitaw dan Manice Ansaka/Deda. Keanggotaan Majelis Jemaat Jahim terdiri dari dua(2) kelompok yaitu keanggotaan pengurus sebanyak 18 orang dan keanggotaan jemaat meliputi seluruh penduduk jemaat Jahim (GKI). Sedangkan keanggotaan Majelis jemaat Puai masing-masing adalah keanggotaan pengurus sebanyak 23 orang dan keanggotaan jemaat meliputi semua penduduk Puai (GKI).

6.1.1.1.2 PWGKI

Di jemaat Jahim dan jemaat Puai terdapat persekutuan Wanita Gereja Kristen Injili (PWGKI) sebagai unsur jemaat yang khusus melayani para ibu-ibu.

Sesuai dengan data di lapangan, maka unsur jemaat Persekutuan Wanita/PW Jahim sudah ada sejak masuknya injil di Sentani tahun 1933. Sedangkan untuk PWGKI jemaat Puai, didirikan pada tanggal 17 April 1963 oleh pendeta Adolf Okoka (pelayan jemaat pada saat itu).

Susunan pengurus PWGKI jemaat Jahim, mempercayakan Alfonsina Felle/Mebri sebagai ketua. Yosina Felle/Taime sebagai sekretaris dan bendahara adalah Paulinus Felle karena jabatannya sebagai bendahara jemaat. Sedangkan PWGKI Puai diketuai oleh Ruth Awaitaw/Ohe. Sekretaris dan bendahara dijabat oleh Yokbet Ibo/Awaitaw dan Orpa Yeimo. Yang bertindak sebagai pembina PWGKI Puai adalah Agus Kalimbulu. Selain itu dilengkapi pula dengan tiga (3) seksi, yaitu :

- (1) Seksi pujian/koor/paduan suara yang dikoordinir oleh guru Nico Tokoro.
- (2) Seksi pembina/kerohanian.
- (3) Seksi usaha, masing-masing dipegang oleh Agustina Kalembulu dan Cornelia Deda.

Perlu dicatat bahwa ketua I sejak itu (sejak mulanya) adalah ibu Yosephina Mebri.

Keanggotaan PW di masing-masing jemaat terbatas pada para ibu-ibu dan remaja putri. Di jemaat Jahim, keanggotaan terdiri dari semua ibu-ibu di jemaat. Sedang di Puai hanya 42 orang ibu.

6.1.1.1.3 PAM GKI

PAM GKI sebagai unsur jemaat berada di bawah Majelis jemaat yang memfokuskan pelayanannya khusus untuk para pemuda dan pemudi. PAM GKI jemaat Jahim dibentuk sejak bulan Maret 1979, sehingga bulan Maret dijadikan sebagai hari lahirnya PAM di jemaat tersebut. Sedangkan unsur PAM jemaat Puai dibentuk oleh klasis Sentani pada tahun 1976.

Data primer menunjukkan bahwa PAM jemaat Jahim memberi pertanggung jawaban kepada Yulianus Fangkali sebagai ketua. Sekretaris adalah Costan Muhai dan bendahara adalah Hendrik Felle serta dilengkapi pula dengan tiga seksi masing-masing

- (1) Seksi kerohanian, yang dikoordinir oleh Permenas Felle.
- (2) Seksi usaha dana, yang dikoordinir oleh Sefnat Felle dan Do, minggu Taime.
- (3) Seksi inventarisasi, yang dikoordinir oleh Saul Pangkale.

PAM GKI jemaat Poai diketuai oleh Arnold Awaitaw. Sekretaris dijabat oleh Frans Ohe dan bendahara dijabat oleh S. Awaitaw serta dilengkapi pula dengan empat seksi di antaranya :

- (1) Seksi pelayanan, yang dikoordinir oleh Isak Mimitaw.
- (2) Seksi pujian, Yang dikoordinir oleh Yulianus Awaitaw.
- (3) Seksi usaha dana, Yang dikocrdinir oleh Benyamin Kalimbulu.
- (4) Seksi olahraga, Yang dikoordinir oleh Benyamin Kalimbulu.

PAM GKI jemaat Jahim berdiri sejak bulan Maret 1979 dengan anggota sebanyak 46 orang. Sedangkan sampai tahun 1985 anggotanya sudah mencapai 85 orang.

Sedangkan untuk PAM GKI jemaat Puai, anggota-anggotanya terdiri dari semua pemuda – pemudi GKI di jemaat Puai, yaitu pemuda dan pemudi remaja.

6.1.1.1.4 Sekolah Minggu

Sekolah Minggu sebagai unsur jemaat, juga terdapat di jemaat Yahim dan jemaat Puai. Unsur jemaat ini memfokuskan pelayanan pada anak-anak.

Sekolah Minggu jemaat Yahim didirikan pada tahun 1967, sedangkan di jemaat Puai didirikan pada tahun 1964. Sekolah ini mempercayakan Alfontina Mebri sebagai ketua, Sekretaris Hengki Felle, Bendahara dirangkap oleh bendahara jemaat. Sedangkan sebagaimana pengasuh (guru Sekolah Minggu) ada tujuh (7) orang untuk jemaat Yakim yaitu : Ibu A. Felle/Mebri sebagai ketua koordinator, Hengki Felle menjabat sekretaris, dan sebagai anggota masing-masing : 1. Hanock Felle; 2. Salome Felle; 3. Jusak Pangkali; 4. Jacomina Felle/Moloali dan Josina Felle/Taime.

Sedangkan di jemaat Puai unsur Sekolah Minggu diketuai oleh Junus Wahei, sekretaris Anice Fiobetauw dan bendahara ditangani oleh bendahara jemaat. Untuk guru Sekolah Minggu diperlukan tiga (3) orang, masing-masing adalah Agus Kalimbalu, Aser Fiobetauw dan Juliana Fiobetauw.

Di masing-masing jemaat mempunyai keanggotaan Sekolah Minggu sendiri. Keanggotaan Sekolah Minggu di jemaat Yahim ada 70 orang, yang terbagi dalam tiga (3) kelas, yaitu : 1). Kelas Anak-anak, 2). Kelas Tanggung, 3). Kelas Remaja.

Sedangkan keanggotaan Sekolah Minggu jemaat Puai, beranggotakan 66 orang, yang terbagi juga dalam tiga (3) kelas, yaitu : (1). Kelas Anak Kecil = 26 orang, (2). Kelas Tanggung 16 orang, (3). Kelas Remaja 16 orang.

6.1.2 Tempat Kegiatan

6.1.2.1 Majelis Jemaat

6.1.2.1.1 Pusat Kegiatan

Kegiatan Majelis Jemaat berdasarkan tempat yaitu dipusatkan pada (1) di Gereja, (2) di rumah anggota secara bergilir, (3) di rumah ketua majelis.

6.1.2.1.2 Kegiatan

Sesuai fungsi pelayanan kegiatan majelis baik di Yahim, maupun di Puai terdiri dari (1) kebaktian hari Minggu, (2) kebaktian keluarga setiap hari Selasa dan Jumat di setiap rumah, (3) kebaktian hari-hari besar Gereja yang dilakukan setahun sekali seperti kematian, kenaikan Tuhan Yesus, Patenkosta, HUT GKI dan hari Natal, (4) pelayanan Sakramen berupa baptisan, perjamuan kudus, (5) pastoral dalam bentuk pelayanan orang sakit, ulang tahun, tamat sekolah dan lain-lain.

Tiap kegiatan unsur jemaat mempunyai tujuan terpisah sesuai sasarannya. Kebaktian-kebaktian diadakan sebagai tanda pengucapan syukur.

Baptisan menyatakan bahwa seseorang anak menjadi milik Tuhan sehingga dimeteraikan, membentuk air sebagai simbol bagi anak-anak sedangkan baptisan orang dewasa sebagai tanda penyerahan diri kepada Allah atau meninggalkan kehidupan lama dan mengikuti Kristus.

Peneguhan Sidi; *Sidi* dilaksanakan bagi orang dewasa, sebagai tanda bahwa orang itu telah menyerahkan dirinya kepada Allah.

Perjamuan kudus; sebagai jaminan bagi keselamatan setiap umat yang mengikuti Yesus. Roti yang dimakan melambangkan tubuh Kristus dan anggur yang diminum pada perjamuan kudus melambangkan darah Kristus sebagai penebusan umat.

Pemberkatan nikah; untuk menyatukan kedua insan sebagai suami istri sesuai jodoh yang dikaruniakan Allah dan untuk hidup sesuai ajaran Kristus.

6.1.2.2 PW GKI

6.1.2.2.1 Pusat Kegiatan

Kegiatan PW GKI Yahim terpusat di tiga (3) tempat yaitu (1) Gereja, (2) rumah ketua PW, (3) rumah masing-masing anggota sebagai kebaktian pelayanan keluarga.

Kegiatan PW GKI Puai terpusat : (1) di Gereja, (2) rumah sekretaris, (3) rumah anggota secara bergilir sebagai kebaktian pelayanan keluarga.

6.1.2.2.2 Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan PW GKI Yahim setiap hari Kamis dengan prioritas (1) Jahit-menjahit, masak memasak, penelaan Alkitab (PA), (2) Rekreasi yang diadakan satu kali setahun berupa picnic bersama (pernah ke Base G dan Borowai), (3) Kebaktian ibu-ibu secara bergilir setiap hari Sabtu, (4) melayani orang sakit setiap hari Senin sore, (5) Basaar, untuk kesejahteraan ibu dan untuk mengisi kas jemaat, (6) Paduan Suara untuk mengisi acara ibadah pada setiap hari Minggu di Gereja, (7) diakonia (pernah ada kegiatannya tetapi setelah tidak aktif lagi maka dialihkan kembali ke majelis jemaat, (8) natal PW setiap tahun (9) kegiatan paskah pada setiap hari paskah. PW GKI Puli memfokuskan kegiatan pada dua (2) hal pokok yaitu (1) kegiatan yang bersifat rohani dan (2) kegiatan sosial. Kegiatan yang bersifat rohani meliputi (1) Penyelidikan alkitab yang diadakan pada setiap hari Minggu siang/ usai ibadah, dan dipimpin oleh pe?ayan ibadah pada hari itu sesuai dengan jadwal majelis. Sedangkan kegiatan sosial meliputi (1) memberikan bantuan berupa makanan apabila ada kematian (2) mengerjakan kebun PW yang kemudian hasilnya akan dibagikan kepada anak yatim dan janda.

Kegiatan yang dilakukan PWGKI di masing-masing jemaat mempunyai tujuan yang sama yaitu (1) untuk memahami isi alkitab termasuk kata-kata yang sukar dimangerti, membaca dan menyelidiki alkitab (2) memupuk rasa persatuan antara ibu-ibu kristen yang ada di jemaat (3) memberi pelayanan bagi orang sakit dan membantu anak-anak yatim dan ibu-ibu janda serta duda dan membantu keluarga yang berduka apabila ada kematian dalam jemaat.

6.1.2.3 Persekutuan Angkatan Muda Kristen (PAM)

6.1.2.3.1 Pusat Kegiatan

Untuk PAM GKI Jahirn, semua kegiatan dipusatkan di gereja. Sedangkan untuk PAM GKI Puli, kegiatan-kegiatannya dipusatkan (1) di gereja yaitu khusus kegiatan-kegiatan yang penting seperti pemilihan badan pengurus PAM (dalam bentuk rapat), (2) di rumah ketua untuk penyampaian informasi tentang kebaktian, olahraga, pelayanan pada anggota yang sakit, puji-pujian.

6.1.2.3.2 Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan PAM GKI Jahirn meliputi (1) kebaktian persekutuan dengan PAM GKI yang lain setiap tiga bulan sekali (2) karyawisata dilakukan setiap minggu akhir pada bulan Maret (3) kebangunan rohani (4) perayaan natal (5) kunjungan ke rumah anggota (6) pembuatan kebun PAM dan (7) koperasi.

Sedangkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan PAM Puali meliputi (1) kebaktian PAM pada setiap hari Jumat (2) Persekutuan Pembaca Alkitab (PPA) setiap minggu setelah kebaktian (3) Penelaan Alkitab (PA) (4) kunjungan pelayanan keanggota jemaat yang lain (5) mengadakan pertandingan cabang olahraga volly antar PAM (6) mengadakan pendekatan pada anggota PAM yang dalam keadaan suram kehidupan rohaninya (7) melayani orang yang sedang berduka (8) mengadakan latihan paduan suara dan vokal group untuk dibawakan pada acara kebaktian jemaat dan pemuda (9) mengusahakan dana untuk mengisi kas PAM.

Kegiatan PAM di masing-masing jemaat mempunyai sasaran tertentu yang ingin dicapai yaitu (1) menyatukan pemuda-pemudi kristen untuk pengenalan akan Kristus (2) melayani sesama baik jemaat maupun unsur-unsur jemaat lain (3) menanamkan keimanan kristen para pemuda-pemudi agar sehat mental dan rohani sehingga menjadi manusia yang baik.

6.1.2.4 Sekolah Minggu

6.1.2.4.1 Pusat Kegiatan

Sekolah minggu dalam mengoperasikan kegiatan-kegiatannya terpusat pada dua lokasi yaitu (1) gedung gereja (2) di rumah ketua.

6.1.2.4.2 Kegiatan

Data primer mengungkapkan, kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing sekolah minggu adalah sebagai berikut: Sekolah minggu jemaat Jahim berupa (1) kebaktian di gedung gereja (2) pembersihan halaman gedung gereja (3) membuat bazaar (4) paduan suara (5) vokal group (6) rekreasi.

Sedangkan Sekolah Minggu jemaat Puai, kegiatan yang dilakukan berupa: (1) kebaktian Minggu pagi (2) pelayanan lewat pujian pada hari Minggu (3) mengadakan basar untuk mengisi kas sekolah Minggu.

Kegiatan yang dilakukan masing-masing sekolah Minggu pada tiap jemaat mempunyai tujuan khusus yaitu: (1) membina anak untuk mengenal Yesus Kristus sebagai Juru selamatnya (2) membina iman dari pada anak (3) mengajarkan anak untuk mengetahui hukum kasih.

6.2 Sistem Kepemimpinan

6.2.1 Syarat-syarat Kepemimpinan

Majelis dan unsur-unsur jemaat melaksanakan kegiatan sesuai petunjuk/tata gereja. Data lapangan menunjukkan syarat yang dipenuhi seorang Ketua, Sekretaris, Bendahara, Penatua, Syamas dan syamaset.

6.2.1.1 Majelis Jemaat

6.2.1.1.1 Ketua Majelis Jemaat

Untuk melaksanakan fungsi seorang ketua majelis jemaat diperlukan beberapa persyaratan :

(a) Mempunyai pengalaman dibidang gerejani, (b) Berpendidikan (c) Berwibawa, (d) Mempunyai pengabdian terhadap kehidupan rohani dalam jemaat.

6.2.1.1.2 Sekretaris Jemaat

Dalam menjalankan pelayanan untuk jemaat dibutuhkan seorang sekretaris. Dan untuk menjabat jabatan tersebut harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :(1) Mempunyai pengalaman dibidang keagamaan, (2) Berpendidikan, (3) Memiliki pengetahuan dasar tentang tugas sekretaris, (4) Berwibawa (5) Mempunyai rasa

pengabdian terhadap kehidupan rohani dalam jemaat, (6) Diteguhkan.

6.2.1.1.3 Bendahara Jemaat

Demikian pula untuk jabatan Bendahara Majelis Jemaat dituntut beberapa persyaratan: 1. Dapat dipercayai, 2. Berpengalaman di bidang keagamaan, 3. Memiliki pengetahuan dasar tentang tugas seorang bendahara, 4. Jujur, 5. Mempunyai rasa pengabdian terhadap kehidupan rohani dalam jemaat, 6. Diteguhkan.

6.2.1.1.4 Penatua, Syamas dan Syamaset

Sesuai tata Gereja Kristen Injili di Irian Jaya, maka pelayanan dalam Jemaat terdapat jabatan penatua, *syamas* dan *syamaset*. Untuk menduduki jabatan-jabatan ini diperlukan beberapa persyaratan :1) Pengalaman di bidang gerejani, 2) Berwibawa, 3) Berpendidikan, 4) Mempunyai rasa pengabdian terhadap kehidupan rohani anggota jemaat.

6.2.1.2 PW GKI

Sesuai data lapangan baik di lokasi I (Jahim) dan dilokasi II (Puai) dijumpai syarat-syarat sebagai ketua, sekretaris, bendahara menunjukkan ciri-ciri yang sama. Hal ini disebabkan bidang gerak PW GKI adalah keagamaan.

6.2.1.2.1 Ketua

Untuk dapat menjadi ketua PW GKI, harus mempunyai syarat-syarat: 1) Mempunyai pengetahuan yang cukup tentang firman Tuhan, 2). Berwibawa dan bisa mempengaruhi orang lain, (3). Sebagai Ibu Kristen yang mempunyai sifat yang baik.

6.2.1.2.2 Sekretaris

Untuk dapat diangkat menjadi sekretaris PW GKS, harus ada syarat: (1). Mempunyai pengetahuan tentang Firman Allah, (2). Mampu mengelola surat menyurat dari organisasi, (3). Bisa memberi contoh yang harus diteladani oleh anggota organisasi, (4) Dapat membina Ibu-Ibu lain tentang masalah-masalah yang menyangkut pelayanan Firman.

6.2.1.2.3 Bendahara

Untuk menjadi bendahara PW GKI, harus ada syarat-syarat pengetahuan tentang bagaimana mengurus kas jemaat.

6.2.1.3 PAM GKI

Sebagai pengurus PAM GKI perlu memenuhi syarat-syarat tertentu. Sesuai data lapangan baik lokasi I dan lokasi II untuk menduduki jabatan tersebut diperlukan beberapa syarat:

6.2.1.3.1 Ketua

Untuk menjalankan fungsi sebagai Ketua diperlukan: (1). Mempunyai pengalaman di bidang Gerejani, khususnya pelayanan untuk pemuda Jemaat, (2). Punya pengaruh dikalangan pemuda-pemudi, (3). Berpendidikan, (4). Berwibawa, (5). Rasa pengabdian terhadap pembinaan kehidupan rohani dalam jemaat (pemuda/pemudi).

6.2.1.3.2 Sekretaris

Untuk menjalankan fungsi sebagai sekretaris, maka (1). Harus mempunyai pengalaman khusus dalam hal surat menyurat, (2). Harus berpendidikan, (3). Berwibawa dan (4). Ada rasa pengabdian terhadap kehidupan rohani pemuda/pemudi dalam jemaat.

6.2.1.3.3 Bendahara

Jabatan bendahara mempunyai syarat-syarat tertentu yaitu (1) berpengalaman dibidang keagamaan (2) memiliki pengalaman dasar tentang tujuan seorang bendahara (3) jujur (4) mempunyai rasa pengabdian terhadap kehidupan rohani pemuda/pemudi dalam jemaat.

6.2.1.4 Sekolah Minggu

Seseorang yang ditunjuk sebagai pengurus (ketua, sekretaris, bendahara) perlu memenuhi syarat-syarat tertentu yang pada dasarnya sama, karena semua bergerak dibidang agama. Syarat-syarat itu ialah:

6.2.1.4.1 Ketua

Seseorang yang dapat diangkat menjadi ketua adalah dengan syarat: (1) pengetahuan yang cukup tentang firman Allah (2)

mampu mempengaruhi dan mendidik anak-anak untuk mengenal Yesus Kristus (3) kehidupan rohaninya menunjukkan nilai-nilai rohani yang baik (4) mempunyai kemampuan dalam bidang administrasi.

6.2.1.4.3 Bendahara

Untuk dapat diangkat menjadi seorang bendahara harus ada syarat-syarat: (1) setia (2) takut kepada Tuhan (3) jujur.

6.2.1.4.4 Pengasuh

Untuk menjadi seorang pengasuh juga mempunyai syarat-syarat seperti: (1) menguasai jiwa anak (2) memiliki kemampuan untuk mengajarkan firman Tuhan (3) mempunyai daya kreasi (4) harus betul-betul taat kepada firman Allah (5) sudah dibaptis dan sisi.

6.2.2 Hak dan Kewajiban

Data lapangan menunjukkan bahwa organisasi keagamaan di lokasi I (Kelurahan Dobinsolo/RW Jahim dan RW Komba) serta lokasi II (Desa Itakiwa/RW II Puai) terdapat hak dan kewajiban pada masing-masing tingkatan dalam badan pengurusan sebagai berikut :

6.2.2.1 Majelis Jemaat

Sebagai organisasi keagamaan, majelis jemaat mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur, melayani serta memberi bimbingan rohani pada jemaat, sesuai tugas masing-masing unsur dalam badan majelis jemaat (ketua, sekretaris dan bendahara).

6.2.2.1.1 Ketua majelis jemaat

Ketua majelis jemaat mempunyai hak-hak antara lain; (1) memimpin majelis jemaat (2) memimpin rapat majelis jemaat (3) mengikuti kegiatan yang diselenggarakan ditingkat klasis dan berhak untuk sisi.

Di samping adanya hak-hak, ketua majelis jemaat juga mempunyai kewajiban-kewajiban antara lain: (1) membina unsur-unsur dalam jemaat (2) mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilaku-

kan oleh unsur-unsur jemaat (3) mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh anggota majelis jemaat dalam melaksanakan tugas pelayanan.

6.2.2.1.2 Sekretaris majelis jemaat

Sekretaris majelis jemaat mempunyai beberapa hak yakni: (1) menyimpan serta mengatur segala dokumen majelis jemaat (2) membuat konsep tentang hal yang berhubungan dengan surat menyurat (4) memimpin rapat majelis jemaat apabila ketua berhalangan dan (5) mengeluarkan pendapat.

Di samping adanya hak-hak, sekretaris majelis jemaat juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan seperti: (1) memimpin serta membina unsur-unsur dalam jemaat (2) mengawasi semua kegiatan unsur-unsur dalam jemaat.

6.2.2.1.3 Bendahara majelis jemaat

Bendahara majelis jemaat mempunyai beberapa hak seperti: (1) menerima uang (derma) pada tiap hari Minggu (2) menyimpan uang jemaat (3) mengeluarkan uang dari kas jemaat dengan persetujuan majelis jemaat serta (4) menyimpan alat-alat inventaris milik jemaat.

Bendahara jemaat juga mempunyai kewajiban-kewajiban seperti : (1) mempertanggung jawabkan keuangan jemaat setiap hari Minggu didepan anggota jemaat dan (2) menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan jemaat kepada Klasis (Klasis Sentani).

6.2.2.2 Persekutuan Wanita Gereja Kristen Injili (PW-GKI)

6.2.2.2.1. Ketua WP-GKI

Ketua PW-GKI mempunyai hak-hak antara lain: (1) memimpin rapat (2) mengadakan pembagian tugas (3) menasehati setiap anggota yang melanggar ketentuan dalam organisasi dan (4) mengeluarkan pendapat.

Selain dari hak-hak, ketua PW-GKI juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan yakni: (1) mengadakan kunjungan kepada anggota (2) mempertanggungjawabkan laporan kerja PW kepada majelis jemaat dan (3) mengawasi kegiatan setiap seksi dalam organisasi.

6.2.2.2.2 Sekretaris

Sekretaris PW-GKI mempunyai beberapa hak antara lain : (1) membuat undangan apabila ada rapat (2) mengadakan daftar inventrisasi tentang barang-barang milik PW-GKI.

Di samping ada hak, sekretaris juga mempunyai beberapa kewajiban seperti: (1) mencatat semua hasil rapat (2) menyusun program kerja yang akan dilaksanakan oleh seksi (3) ikut melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan.

6.2.2.2.3 Bendahara

Hak-hak dan Bendahara PWGKI adalah sebagai berikut : (1) menerima uang yang masuk, baik dari sumbangan maupun dari hasil usaha dana dan (2) menyimpang uan uang organisasi.

Kewajiban Bendahara PWGKI adalah untuk (1) mencatat semua uang baik yang masuk maupun yang keluar (2) menyusun laporan keuangan (3) mempertanggung jawabkan keuangan kepada ketua dalam rapat anggota.

6.2.2.3 Persekutuan Angkatan Muda Gereja Kristen Injili (PAM-GKI)

6.2.2.3.1 Ketua PAM

Ketua PAM-GKI mempunyai beberapa hak antara lain : (1) memimpin rapat (2) mengikuti semua kegiatan dalam jemaat maupun kegiatan yang dilakukan oleh klasis, terutama yang menyangkut hal pemuda (3) memberi nasehat kepada para anggota pemuda dan (4) memberi sanksi kepada anggota yang benar-benar melanggar tata tertib organisasi.

Kewajiban Ketua PAMGKI adalah untuk : (1) membina para anggota (2) mengadakan pengawasan dalam organisasi dan (3) mengadakan pengendalian.

6.2.2.3.2 Sekretaris PAM

Hak sekretaris PAM adalah : (1) menyimpang serta mengatur segala dokumen milik organisasi (2) memimpin rapat jika ketua berhalangan dan (3) mengeluarkan pendapat.

Kewajiban Sekretaris adalah untuk : (1) ikut membina para pemu-

da/pemudi melalui wadah PAM (2) ikut mengawasi kegiatan yang dilakukan dan (3) menyusun program kerja PAM.

6.2.2.3.3 Bendahara PAM

Hak Bendahara PAM antara lain : (1) menerima uang (derma) setiap kebaktian (2) mengeluarkan uang dari kas dengan persetujuan ketua (3) ikut mengawasi harta milik PAM dan (4) menyimpan alat-alat milik PAM.

Kewajiban Bendahara PAM adalah untuk : (1) bertanggung jawab atas keuangan PAM (2) menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan pemuda dan (3) melaporkan posisi keuangan dalam rapat anggota.

6.2.2.4 Sekolah Minggu

6.2.2.4.1 Ketua Sekolah Minggu

Hak ketua Sekolah Minggu antara lain : (1) memimpin rapat (2) mengadakan pembagian tugas dan (3) menasehati para pengasuh.

Sedangkan kewajiban dari ketua sekolah Minggu adalah : (1) mengadakan pendekatan dengan orang tua murid dan anak (2) menyampaikan laporan kerja sekolah minggu kepada Majelis Jemaat, dan (3) mengadakan rapat.

6.2.2.4.2 Sekretaris Sekolah Minggu

Hak Sekretaris adalah berupa : (1) mengadakan surat menyurat dengan Majelis Jemaat dan unsur-unsur lain yang ada dalam Jemaat (2) memimpin rapat bila Ketua berhalangan, dan (3) menginventarisir semua alat-alat milik Sekolah Minggu.

Kewajiban Sekretaris adalah untuk : (1) menyimpan dan mengawasi surat/dokumen Sekolah Minggu (2) membuat undangan untuk rapat, dan (3) menyusun jadwal kegiatan pelayanan Sekolah Minggu.

6.2.2.4.3 Bendahara Sekolah Minggu

Hak Bendahara antara lain : (1) menerima, menyimpan serta mengeluarkan uang.

Kewajiban Bendahara adalah untuk : (1) menyampaikan laporan pertanggung jawaban baik mengenai uang masuk maupun uang keluar (2) menyetor uang kepada bendahara Jemaat.

6.2.2.4.4 Pengasuh

Hak Pengasuh antara lain : *1) mengajar/memberi pelayanan pada hari Minggu dan (2) memberi dorongan pada anak-anak Sekolah Minggu bila mereka kurang aktif dalam sekolah minggu.

Kewajiban Pengasuh adalah untuk : (1) menerima murid dan mengasuhnya (2) membuat laporan kepada ketua, dan (3) mengadakan kebaktian pada anak Sekolah Minggu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

6.2.3 Atribut/Symbol

6.2.3.1 Majelis Jemaat

Majelis Jemaat adalah suatu badan pelayan Jemaat, yang terdiri dari seorang Ketua dan anggota-anggota. Ketua disebut Ketua Majelis Jemaat sedangkan anggotanya disebut Penatua, Syamas dan Syamaset (wanita).

Untuk menjabat jabatan dalam gereja dikenal atribut/tanda kebesaran seperti tanda salib, Alkitab (Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru). Sedangkan untuk keperluan pelayanan Firman pada saat kebaktian di gereja, pelayan memakai pakaian khusus hitam putih ditambah dasi (pelayan biasa). Sedangkan untuk Pendeta memakai pakaian kebesaran gerejani/*toha* dengan dasi putih.

6.2.3.2 PWGKI

PWGKI terdiri dari semua Ibu-Ibu Kristen yang ada dalam Jemaat, yang dipimpin oleh seorang Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

Sesuai data lapangan maka tidak terdapat gelar lain untuk pengurus PWGKI. Begitu pula mengenai tanda kebesaran PWGKI, baik di lokasi I maupun lokasi II tidak memiliki atribut/tanda kebesaran tertentu secara khusus. Namun sebagai unsur jemaat maka tanda salib, Alkitab, Gambar Tuhan Yesus, merupakan tanda kebesaran dalam organisasi PWGKI.

6.2.3.3 PAMGKI

PAMGKI terdiri dari seluruh pemuda dan pemudi Kristen yang ada dalam Jemaat, PAM GKI dikordinir oleh suatu badan yang disebut Badan Pengurus, di mana Badan Pengurus ini terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris, Bendahara dan sejumlah Seksi yang diperlukan.

Organisasi Pemuda dalam lingkungan Jemaat di lokasi I dan II pada umumnya sama sehingga tanda kebesaran atau atribut yang adapun sama sepertinya Alkitab dan tanda salib sedang dalam pelayanan PAMGKI tidak ada pakaian dalam upacara gerejani. Tanda-tanda kebesaran ini merupakan tanda kebesaran dalam Gereja Kristen, sehingga dapat dikatakan bahwa tanda kebesaran khusus untuk organisasi ini tidak ada.

6.2.3.4 Sekolah Minggu

Sesuai data lapangan seperti halnya Majelis Jemaat, PWGKI, dan PAMGKI maka pada pengurus Sekolah Minggu pun tak ada sebutan/gelar lain. Begitu pula mengenai tanda kebesaran di masing-masing lokasi penelitian tidak memiliki atribut atau simbol tertentu secara khusus. Sekolah Minggu sebagai unsur organisasi gereja memiliki atribut yang umum sebagai tanda berupa Alkitab, salib Yesus Kristus, gambar Yesus Kristus, gambar nabi-nabi seperti nabi Musa, nabi Elia dan sebagainya yang diceritakan dalam Alkitab dan juga kalender gereja.

6.2.4 Cara Pengangkatan dan Upacara

6.3.4.1 Majelis Jemaat

Seseorang yang dipercayakan untuk menjabat jabatan gerejani, sebelum menjabat harus melalui suatu proses pemilihan calon yang dipilih melalui rapat anggota jemaat, calon terpilih dilantik oleh seorang pendeta dari klasis, dalam gereja dikenal dengan istilah "*penenguhan*" dalam jabatan gerejani sebagai Penatua, Syamas dan Syamaset/sebutan untuk wanita. Sedangkan untuk jabatan ketua, sekretaris maupun bendahara majelis jemaat dipilih dari anggota majelis itu sendiri, dan dipercayakan untuk melaksanakan tugas Pelayanan.

6.2.4.2 Persekutuan Wanita – GKI.

Dalam prosedur pengangkatan ketua, sekretaris dan bendahara adalah sebagai berikut; masing-masing wilayah pelayanan mengajukan calon pada hari Minggu selesai kebaktian dan setelah itu diadakan rapat anggota persekutuan wanita-GKI dengan mengambil tempat di gedung gereja. Para calon diajukan setelah diadakan pemilihan. Calon terpilih dengan suara terbanyak diangkat menjadi ketua, dan sekretaris adalah calon yang mendapat suara terbanyak setelah ketua, dan bendahara adalah calon yang mendapat suara terbanyak setelah sekretaris. Hasil pencalonan ini dilaporkan kepada majelis jemaat untuk dikukuhkan pada hari Minggu pada acara kebaktian.

Setelah laporan hasil pemilihan disampaikan, akan ditentukan waktu pelantikan atau peneguhan yang biasanya dilakukan di gedung gereja sesuai dengan tata cara pelantikan yang sudah diatur, antara lain (1) acara kebaktian (2) pembacaan pengakuan untuk melaksanakan tugas secara baik yang disaksikan oleh anggota jemaat yang hadir (3) pemberkatan yang dilakukan oleh pelayan firman. Dengan demikian kepengurusan tersebut dapat menjalankan tugas serta tanggungjawabnya dalam pelayanan khususnya kepada wanita kristen di dalam jemaat tersebut.

6.2.4.3 PAM GKI

Untuk menjalankan suatu tugas serta dipercayakan untuk mengurus atau memimpin organisasi gereja (pemuda/i) diadakan pemilihan melalui rapat anggota dimana calon terpilih diteguhkan oleh ketua majelis jemaat dalam suatu acara kebaktian, dimana dalam tata gereja dikenal dengan istilah "peneguhan atau diteguhkan" untuk menjabat suatu jabatan tertentu dalam lingkungan jemaat. Setelah dilantik atau diteguhkan maka para pelayan ini dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan beban tugas yang dipegangnya.

6.2.4.4 Sekolah Minggu

Data lapangan menunjukkan bahwa di lokasi yahim prosedur pengangkatan ketua, sekretaris, bendahara dilakukan sebagai berikut : tiap-tiap wilayah pelayanan (wik) mengajukan calon pada hari Minggu yaitu setelah kebaktian diadakan. Jadi saat itu

diadakan rapat anggota untuk memilih calon-calon yang sudah diajukan dengan cara yang sangat rahasia. Tiap anggota menuliskan nama calon sesuai pilihannya, kemudian petugas mengumpulkan suara-suara itu dan mengadakan perhitungan. Suara terbanyak adalah sebagai ketua, berikutnya sebagai sekretaris dan bendahara. Setelah itu, hasil pemilihan dilaporkan kepada majelis jemaat untuk diketahui dan dikukuhkan.

Sesudah hasil pemilihan itu dilaporkan kepada Majelis Jemaat, tugas majelis jemaat selanjutnya menentukan waktu pelantikan (bersamaan dengan waktu kebaktian/gereja). Dan di saat kebaktian itu; baik ketua, sekretaris maupun bendahara berjanji untuk melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

6.3 Fungsi dan Pengaruh Kepemimpinan Bidang Agama Dalam Masyarakat

Dibandingkan dengan Kepemimpinan Bidang Sosial, Ekonomi dan Pendidikan, pengaruh Kepemimpinan bidang agama jauh lebih menonjol di kalangan masyarakat. Dikatakan demikian, karena pemimpin bidang agama ini merupakan sasaran tempat bertanya dan meminta pedoman hidup dan kehidupan bagi anggota masyarakat tidak saja dalam hal-hal keduniawian tetapi juga tentang kehidupan di akhirat atau di alam baka sesuai dengan ajaran agama Kristen.

Barangkali ada catatan lepas yang perlu diangkat ke dalam laporan ini, bahwa kepemimpinan justeru mempunyai suatu hal yang menonjol bila dibanding dengan bidang lain. Selain itu keberadaan di mata masyarakat Sentani justeru lebih lama diterima di sana (1928). Sedangkan kepemimpinan Sosial dan Ekonomi mulai berperan di kedua lokasi penelitian diperkirakan berkisar antara tahun 1970.

Pembentukan mental (untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus yang saleh) di awal tahun 1928, merupakan perjuangan yang cukup berat. Hal ini dikarenakan para misionaris harus bekerja ekstra keras, berhadapan dengan pemeluk-pemeluk black-magic yang masih "kolot". Akan tetapi atas usaha yang — manusiawi — ini, pemilik pemilik *hobat-hobatan* itu (*warobo*) membakarnya, dan bersumpah untuk menjadi laskar Kristus yang setia.

Bertolak dari kenyataan yang demikian, kepemimpinan di bidang agama ini, untuk ukuran anggota masyarakat di kedua lokasi penelitian, sangat di hormati dan disegani. Sebagai konsekwensi logisnya, dengan mudah pemimpin di bidang ini diterima anjuran-anjuran termasuk larangan-larangan yang disampaikan.

Mengingat pengaruh yang demikian pemanfaatan pemimpin bidang agama untuk ikut serta mengembangkan idee-idee pembaharuan dan menggerakkan pembangunan di pedesaan, perlu kiranya lebih ditingkatkan dan diberi tanggung jawab. Kepemimpinan di bidang agama pada dasarnya adalah panutan, sehingga seyogianya mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

- a) Pembina dan pembimbing masyarakat ke arah memahami dan melaksanakan ajaran-ajaran secara sungguh-sungguh, termasuk peningkatan pemahaman dan sikap masyarakat dalam pentingnya kerukunan beragama.
- b) Sebagai tokoh identifikasi dan keteladanan bagi masyarakat dalam berbuat, bertingkah laku dan bertanggung jawab.
- c) Pendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan ke duniawian dan akhirat secara seimbang.

BAB VII
POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN
DI BIDANG PENDIDIKAN

7.1. Organisasi Dalam Bidang Pendidikan.

7.1.1. Sekolah Dasar.

Data lapangan menunjukan bahwa di Kelurahan Dabonsolo (lokasi I) terdapat dua sekolah, masing-masing SD Inpres Yahim dan SD Inpres Komba. Sedangkan di RW II Puai (lokasi II) terdapat satu SD dengan status Negeri.

7.1.1.2 Susunan Kepengurusan.

Untuk kepengurusan SD Inpres Yahim sebagai kepala Sekolah dipimpin oleh C.B. Pakondo. Sedangkan SD Inpres Komba, sebagai kepala sekolah adalah Eddy Yoku. Untuk jumlah guru, baik SD Inpres Yahim dan SD Inpres Komba dapat dilihat pada berikut :

TABEL 6
Keadaan Guru pada SD Inpres Yahim dan sd Inpres
Komba Tahun Ajaran 1983/1984.

SD Inpres Yahim				SD Inpres Komba			
Nama Guru	L/P	Lulusan	Tahun Tugas	Nama Guru	L/P	Lulusan Tugas	Tahun
C.B. Pakondo *	L	SPG	1982	Eddy Yoku *	L	SPG	1981
A. Suebu	L	KPG	1982	Yoel Felle	L	KPG	1974
J. Yerisitow	L	KPG	1983	M. Rumansara	L	KPG	1984
M. L. Tokoro	L	SGB	1981	Y. Ohee	L	SPG	1981
K. Depondai	L	KPG	1984	Marfit Ohee	P	KPG	1984
P. Toam	L	ODO	1981	M. Hokoyoku	P	SPG	1984
J. Dodop	L	KPG	1981	H. Degey **	L	SD	1984
O. Malowali **	L	SD	1984				

Sumber : Kantor SD Inpres Yahim dan kantor SD Inpres Komba.

* Kepala sekolah

** Penjaga sekolah.

Sedangkan untuk SD Negeri Puai sebagai kepala sekolah N. Yoku. Untuk keadaan jumla guru, dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 7
Keadaan Guru SD Negeri Puai Tahun Ajaran
1983 / 1984

No.	Nama guru	Jenis kelamin.	Pendidikan	Tahun bertugas.
1.	N. Yoku *	L	SPG	1978
2.	S. Awaitouw	L	SPG	1977
3.	G. Deda	L	KPG	1982
4.	S. Olua	P	SGB	1982.

Sumber : Kantor SD Negeri Puai tahun 1983.

* Kepala Sekolah.

7.1.2. Tempat dan Kegiatan.

7.1.2.1. Pusat Kegiatan.

Adapun kegiatan proses belajar mengajar baik di SD Inpres Yahim maupun di SD Impres Komba dipusatkan di sekolah. Disamping itu ada kegiatan-kegiatan tertentu seperti laporan bulanan yang dikerjakan di rumah kepala sekolah.

7.1.2.2. Kegiatan.

Sudah merupakan ketentuan yang wajib diikuti di sekolah yaitu sekolah dimulai pukul 07.30 WIT dan berakhir pukul 13.00 WIT. Hasil dilapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan sepenuhnya dari masing-masing SD Inpres Yahim, SD Inpres Komba dan SD Negeri Puai dimulai pukul 07.30 WIT sampai dengan pukul 12.00. Waktu pelaksanaan sekolah di atas dimasing-masing SD terbagi dua fase yaitu untuk murid kelas I, II dan III proses belajar mengajar berlangsung dari pukul 08.00 sampai pukul 11.00 WIT. Untuk kelas IV, V dan VI proses belajar mengajar dimulai pukul 08.00 WIT dan berakhir pukul 12.45 WIT.

Kegiatan masing-masing sekolah dikelompokkan ke dalam :

- (1) proses belajar mengajar dalam kelas (sebagai kegiatan utama).
- (2) Kegiatan administrasi kantor, kegiatan ekstra kurikuler, (rapat guru dan rapat orangtua murid).

7.1.3. BP3

Untuk menunjang kelancaran sekolah di kelurahan Dobonsolo (lokasi I) pada SD Inpres Yahim dan SD Inpres Komba masing-masing mempunyai Badan penyelenggaraan Pembinaan Pendidikan. Pada lokasi II (desa Itakiwa, kampung puai) SD Negerinya juga mempunyai satu Badan Penyelenggaraan Pembinaan Pendidikan (BP3). BP3 pada dasarnya berfungsi sebagai penunjang terhadap kegiatan belajar di masing-masing SD yang ada. Selain itu sebagai wadah untuk menghimpun orang tua murid (wali) yang bertugas merencanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang pelaksanaan pendidikan tersebut.

BP3 SD Inpres komba diketuai oleh I. Maloali, sebagai sekretaris serta bendahara masing-masing adalah Y. Pangkali dan Y. Felle.

BP3 SD Negeri Puai dijabat oleh Yance Mebri, Theo Awaitauw, Zet Yoku, Ishak Mimitauw dan M. Yoku masing-masing sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris I, sekretaris II serta bendahaa. Kepengurusan tersebut dilengkapi dengan dua seksi yaitu usaha dana dan pengangkutan yang diketuai Yunus Doyopo serta Thimo Awaitauw.

Keanggotaan pada SD Inpres Yahim, SD Inpres Komba dan SD Negeri Puai, seluruhnya terdiri dari orangtua murid serta dewan guru. Dua komponen ini sangat diperlukan dan harus ada pada organisasi tersebut.

7.1.4. Tempat Kegiatan.

7.1.4.1. Pusat Kegiatan.

BP3 dibentuk bersamaan oleh sekolah dan orangtua murid sehingga sekolah merupakan tempat kegiatan, di mana kegiatan BP3 di masing-masing SD, baik di SD Inpres Yahim, SD Inpres Komba dan SD Negeri Puai terpusat di tiga tempat yaitu di kantor sekolah, rumah kepala sekolah dan rumah ketua BP3.

7.1.4.2 Kegiatan.

Pada hakekatnya BP3 dibentuk untuk menunjang kegiatan sekolah, namun sesuai dengan data dilapangan maka BP3 SD Inpres Yahim dan SD Inpres Komba belum mengadakan kegiatan-kegiatan walaupun sudah terbentuk. Hal ini dimaklumi karena BP3 pada kedua SD tersebut baru terbentuk pada tahun 1983.

Sedangkan BP3 SD Negeri Puai telah melakukan beberapa kegiatan antara lain : mengadakan rapat, mengarahkan orang tua murid untuk ikut berpartisipasi dala kegiatan BP3, mengumpulkan dana untuk membangun gedung SD yang baru, membantu kepala sekolah di luar urusan sekolah.

7.1.5. Kepramukaan.

Di Luar Organisasi sekolah terdapat pula suatu organisasi kepramukaan. Kepramukaan yang ada di kelurahan Dobonsolo (lokasi I) dan di RW II Puai (lokasi II) diselenggarakan oleh sekolah. Sedangkan pramuka yang diselenggarakan oleh kelurahan dan desa belum ada, disebabkan karena pelatih dan fasilitas yang

belum memungkinkan. Gudep SD Inpres Yahim didirikan pada bulan desember 1984.

4.1.5.1. Kepengurusan.

Pramuka di SD Yahim Sebagai Ketua majelis pembimbing Gugus Depan, guru C. B. Pakondo, sekretaris dan bendahara masing-masing; A. Swebu dan P. Toam. Sedangkan pembina Gugus Depan dipercayakan kepada ML. Tokoro dengan dibantu oleh guru-guru SD Inpres Yahim.

Keanggotaan gugus depan SD Inpres Yahim dilengkapi dengan seluruh murid-murid sekolah yang dibagi sesuai dengan tingkatan usia. Anggota Gudep tersebut berjumlah 86 orang ini dikelompokkan menjadi : (1) tingkatan siaga 24 orang yang terdiri dari putra 10 orang dan putri 14 orang. Tingkatan ini berada pada usia 7 sampai 11 tahun, (2) tingkat penggalang berjumlah 62 orang yang terdiri dari 19 putra dan 43 orang putri. Tingkatan ini berada pada usia 11 sampai 16 tahun.

7.1.6. Tempat Kegiatan.

7.1.6. 1. Pusat Kegiatan.

Gudep SD Inpres Yahim melaksanakan kegiatan terpusat pada dua tempat : (1) sekolah (dalam halaman sekolah) dan (2) di luar sekolah.

7.1.6.2. Kegiatan.

Data dan pengamatan mengungkapkan bahwa beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain (a) patriotisme yang meliputi upacara bendera dan baris berbaris yang dilakukan pada setiap hari jum'at yaitu jam 11.00 – 12.00 WIT, (b) teknik-teknik kepramukaan dioperasikan dalam wujud talitemali, smapore, morse dan sandi, (c) ketrampilan yang diadakan yaitu : menyanyi, membaca puisi, deklamasi dan hasta karya.

7.2. Sistem Kepemimpinan.

7.2.1. Syarat-Syarat Dan Faktor Pendukung.

7.2.1.1. Sekolah Dasar.

7.2.1.1.1. Kepala Sekolah.

Untuk mengangkat seorang Kepala Sekolah (SD Inpres Yahim SD Inpres Komba dan SD Negeri Puai) perlu memenuhi beberapa persyaratan : (1) kepangkatan, (2) pengalaman, (3) masa kerja (4) berwibawa dan (5) umur dll.

7.2.1.1.2. Guru Kelas.

Persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang guru kelas (kelas I sampai kelas III) yaitu : (1) pengalaman, (2) sabar, (3) mudah mengetahui keinginan murid, (4) mempunyai kreativitas dalam menguasai bidang studi.

7.2.1.1.3. Guru Bidang Studi.

Persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang guru bidang studi yang memiliki keahlian khusus di bidang studi yang diasuhnya.

7.2.1.2. BP3

7.2.1.2.1. Ketua BP3

Untuk mengangkat seorang menjadi Ketua BP3 (SD Inpres Yahim, SD Inpres Komba dan SD Negeri Puai) dilandasi beberapa persyaratan tertentu : (1) pengalaman, (2) berpengaruh, (3) pendidikan dan (4) umur.

7.2.1.2.2. Sekretaris BP3

Untuk menjadi seorang Sekretaris BP3 juga memenuhi beberapa syarat tertentu : (1) pendidikan, (2) pengalaman, (3) mempunyai pengetahuan dasar di bidang surat menyurat dan (4) umur.

7.2.1.2.3. Bendahara.

Menjadi seorang Bendahara BP3 juga memenuhi beberapa syarat tertentu : (1) pendidikan, (2) pengalaman, (3) mempunyai pengetahuan dasar di bidang menyimpan serta mengurus keuangan, (4) dapat dipercayai dan (5) umur.

7.2.1.3. Pramuka.

Untuk menjadi seorang pemimpin Pramuka apakah Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Pembina gudep dituntut memiliki syarat-syarat tertentu.

7.2.1.3.1. Ketua

Untuk menjadi ketua pramuka harus ada syarat-syarat seperti : (1) sesuai jabatannya sebagai kepala sekolah, (2) pengalaman, (3) mempunyai pengaruh.

7.2.1.3.2. Sekretaris.

Untuk menjadi Sekretaris pramuka harus mempunyai syarat-syarat yakni : (1) memiliki kemampuan dalam bidang administrasi, (2) dapat dipercayai dan bertanggung jawab.

7.2.1.3.3. Bendahara.

Untuk menjadi bendahara pramuka harus memiliki syarat-syarat seperti : (1) dapat mengatur keduangan, (2) hemat, (3) dapat dipercayai.

7.2.1.3.4 Pembina Gudep.

Untuk pembina Gudep, Seseorang harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut : (1) mempunyai bakat di bidang kepramukaan, (2) mempunyia pendidikan khusus (kursus Mahir Dasar dan Mahir Lengkap) dan (3) berani dan bertanggung jawab.

7.2.2. Hak dan Kewajiban.

7.2.2.1. Kepala Sekolah.

Kepala Sekolah berhak atas : (1) memberikan BP3 kepada staf pengajar dan pengajar sekolah, (2) mengadakan koordinasi antara kepala Sekolah dan guru-guru, (3) memimpin rapat-rapat,

(4) kenaikan pangkat dan berkala. Sedangkan kewajiban kepala Sekolah adalah : (1) mengajar, (2) membuat program kerja dan laporan bulanan, tahunan, (3) menyelesaikan konflik yang terjadi antara guru dan orang tua murid, (4) mengusul kenaikan pangkat dan berkala, (5) mengurus dan membayar gaji, (6) mengadakan evaluasi EBTA dan ujian kenaikan kelas, (7) menerima murid baru.

7.2.2.2. Guru-Guru (Staf Pengajar).

Hak-hak guru atau staf mengajar adalah : (1) menerima gaji, (2) kenaikan pangkat, berkala dan tunjangan-tunjangan lain, (3) memberikan penilaian kepada murid, (4) cuti, (5) mendapatkan pendidikan lanjutan. Sedangkan kewajibannya : (1) mengajar, (2) menyelenggarakan EBTA dan ujian kenaikan kelas, (3) membuat laporan mingguan, bulanan, kepada Kepala Sekolah, (4) mendatangi orang tua murid, (5) mengadakan konsultasi dengan Kepala Sekolah.

7.2.2.3. Ketua BP3

Ketua BP3 berhak : (1) memimpin rapat-rapat, (2) mengeluarkan pendapat, (3) menasihati dan menegur anggota pengurus maupun dewan guru. Kewajiban-kewajibannya yang harus dilaksanakan oleh ketua BP3 adalah : (1) menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam BP3, (2) menyelesaikan masalah-masalah yang timbul antara guru, murid dan kepala sekolah, (3) mengadakan pengawasan, (4) menilai semua kegiatan BP3 dan (4) membuat laporan kepada atasan.

7.2.2.4. Sekretaris BP3.

Sekretaris BP3 berhak atas : (2) memimpin rapat apabila ketua berhalangan, (2) mengeluarkan pendapat, (3) membuat konsep surat menyurat. Kewajiban-kewajibannya adalah (1) mengelola kegiatan surat menyurat, (2) menyusun dan menghimpun program/kegiatan, (3) membuat laporan bulanan dan tahunan.

7.2.2.5. Bendahara BP3.

Bendahara BP3 berhak : (1) mengeluarkan pendapat, (2) mengeluarkan uang dengan persetujuan Ketua, (3) menyimpan uang milik BP3. Sedangkan kewajibannya adalah : (1) me-

ngelola keuangan, (2) mempertanggung jawabkan keuangan dalam rapat-rapat, (3) membuat laporan rutin tentang penggunaan uang dan (4) mencatat semua kekayaan organisasi.

7.2.2.6. Ketua Pramuka.

Hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh ketua pramuka adalah : (1) memimpin rapat-rapat Mabigus, (2) mengadakan konsultasi, (3) menunjuk seorang pembina mengikuti Kursus Mahir Dasar, (4) mengangkat dan melantik pembina Gudep dan pembina-pembina, (5) bertanggung jawab kepada pejabat instansi tertentu.

7.2.2.7 Sekretaris Pramuka

Hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh sekretaris pramuka adalah : (1) menjalankan tugas harian dari Ketua baik keluar maupun ke dalam, (2) menyimpan dan merahasiakan dokumen-dokumen tertentu, (3) bertanggung jawab kepada Ketua.

7.2.2.8 Bendahara

Hak dan kewajiban seorang bendahara adalah : (1) menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang, (2) membuat laporan rutin terhadap penggunaan uang, (3) mencatat semua kekayaan organisasi.

7.2.3 Atribut / Simbol

7.2.3.1 Kepala Sekolah dan Staf Pengajar

Bagi Kepala Sekolah dan Staf Pengajar tidak ada gelar khusus yang dimiliki tetapi istilah yang lazim disebut adalah Guru. Untuk Kepala Sekolah disebut Guru Kepala Sekolah. Sedangkan Staf Pengajar disebut Guru Pembantu.

Untuk tanda kebesaran bagi Kepala Sekolah dan Staf Pengajar terbatas pada : (1) pakaian seragam sekolah (warna coklat untuk celana dan kuning untuk kemeja), (2) pakaian KORPRI, (3) lambang KORPRI, (4) lambang kabupaten Jayapura dan (5) lambang PGRI.

7.2.3.2 BP³

Gelar khusus untuk pengurus BP³ tidak ada. Istilah yang lazim disebut : Ketua BP³, Sekretaris BP³ dan Bendahara BP³.

Bagi pengurus BP³ (Ketua, Sekretaris, Bendahara) belum memiliki tanda kebesaran khusus.

7.2.3.3 Pramuka

Dalam organisasi kepramukaan terdapat sebutan nama seperti : Ketua Mabigus disebut Ka Mabigus, Pembina Gudep. Pembina-pembina Gudep untuk putra dan putri disebut Ka Kanda. Pembina Siaga : (1) Pembina Putra disebut Yanda, (2) Pembina Putri disebut Bunda, (3) Ketua Dewan Penggalang disebut Pratama.

Sebagai tanda kebesaran dalam kepramukaan, untuk Ketua (Ketua Mabigus) harus mempunyai : (1) pakaian seragam (celana panjang warna coklat tua, kemeja warna coklat muda), (2) pici warna coklat, (3) hasduk warna merah dan putih, (4) tunas kelapa, (5) boyscot untuk laki-laki, (6) weighs untuk wanita.

Untuk pembina-pembina diharuskan pula memakai : (1) pakaian seragam (celana panjang warna coklat tua, kemeja warna coklat muda), (2) pici warna coklat, (3) hasduk warna merah dan putih, (4) tunas kelapa, (5) boyscot untuk laki-laki, (6) weighs untuk wanita.

7.2.4 Cara Pengangkatan dan Upacara

7.2.4.1 Kepala Sekolah

Proses pengangkatan kepala sekolah pada umumnya sama dengan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan proses pengusulan diajukan oleh Bupati KDH Tingkat II Jayapura kepada Gubernur KDH Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya.

Proses selanjutnya diajukan ke BAKN di Jakarta. Setelah diangkat disalurkan melalui Gubernur KDH c.q. Dinas P dan K dan diteruskan kepada Bupati KDH Tingkat II Jayapura. Sedangkan penunjukkan Kepala Sekolah dilakukan oleh Bupati KDH atas usul Kepala Dinas P dan K Kabupaten Jayapura.

Upacara pengangkatan Kepala Sekolah dilakukan secara kolektif di Kantor Kecamatan Sentani dan disaksikan oleh Ka Kandep P dan K Sentani, Penilik Sekolah, Lurah.

7.2.4.2 Staf Pengajar

Proses pengangkatan Staf Pengajar pada umumnya sama dengan pengangkatan pegawai Negeri Sipil lainnya.

7.2.4.3 BP³

Proses pengangkatan BP³ masing-masing SD Inpres Yahim, SD Inpres Komba dan SD Negeri Puai melalui suatu rapat yang dihadiri orang tua murid dan para guru. Pemilihan calon ketua, sekretaris dan bendahara berdasarkan hasil suara terbanyak. Calon-calon ini diusulkan ke Kandep P dan K Kecamatan Sentani melalui Kepala Sekolah masing-masing.

Pengurus BP³ setelah terpilih sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara, dikukuhkan (dilantik) oleh Kepala Sekolah dan disaksikan oleh orang tua murid.

7.2.4.3 Pramuka

Ketua Mabigus, Sekretaris dan Bendahara diangkat berdasarkan suara terbanyak. Bagi Kepala Sekolah, sesuai jabatannya ditunjuk sebagai Ketua Mabigus. Sedangkan Pembina Gudep diangkat berdasarkan usul rapat pembina.

Kepengurusan tersebut dilaporkan kepada Kwartir Ranting Sentani dan Ka Mabiran (Camat Sentani).

Ketua Mabigus, Sekretaris dan Bendahara dilantik dalam suatu upacara oleh Ka Mabiran (Camat) dan disaksikan Ka Kwartir serta para pembina. Pembina Gudep dilantik oleh Ka Mabinus (Kepala Sekolah) disaksikan oleh Ka Mabiran, Ka Kwartir, Pembina dan adik-adik Siaga dan Penggalang.

7.3 Fungsi Dan Pengaruh Kepemimpinan Bidang Pendidikan Dalam Masyarakat

Sebelum menguraikan lebih lanjut tentang fungsi dan pengaruh kepemimpinan bidang pendidikan ini dalam masyarakat di Kelurahan Dobonsolo dan RW II Puai, perlu dikemukakan bahwa kepemimpinan di kedua lokasi ini maupun di kecamatan Sentani, tidak seluruhnya dicerminkan oleh kepemimpinan organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pendidikan baik pendidikan umum maupun pendidikan agama, tetapi lebih banyak di-

tentukan peranannya oleh aparaturnya pendidikan atau tegasnya Kepala Sekolah dan guru-guru yang bertugas di lingkungan pendidikan baik umum maupun agama.

Dikatakan demikian, karena organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan di daerah pedesaan masih relatif terbatas, dan organisasi yang adapun masih terbatas pula jangkauannya terhadap jenis-jenis sekolah tertentu, lagi pula sekolah-sekolah yang di daerah pedesaan umumnya berstatus Negeri. Demikian halnya dengan organisasi BP3 yang ditemui di sana, masih terbatas pada meningkatkan pembangunan fisik sekolah-sekolah bersangkutan. Sama halnya dengan organisasi keperamukaan, masih terbatas pada latihan ketrampilan melalui tingkatan-tingkatan tertentu.

Dalam rangka pemanfaatan sumber-sumber tenaga penggerak pembangunan di pedesaan kiranya pemimpin di bidang pendidikan ini perlu dimanfaatkan terutama dalam menghimpun potensi masyarakat dan membawa suara pembaharuan dalam menunjang pembangunan pada umumnya. Seiring dengan fungsi dan pengaruh kepemimpinan bidang pendidikan yang berdedikasi kepada organisasi kemasyarakatan seperti disinggung di atas, maka fungsi dan pengaruh kepemimpinan pendidikan yang terdiri dari tenaga kependidikan (kepala sekolah dan tenaga pengajar) yang bertugas di daerah pedesaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Sebagai agen pembaharuan dan pembangunan di daerah pedesaan.
- b) Sebagai sumber aspirasi masyarakat dalam bidang pendidikan.
- c) Sebagai penggali dan penggerak swadaya gotong royong masyarakat terutama untuk pembangunan bidang pendidikan dan pembangunan sektor-sektor kehidupan lainnya.
- d) Sebagai tokoh identifikasi dalam memberikan suri teladan, kedisiplinan, ketertiban dan kerapian dalam kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat.
- e) Sebagai pelopor penyebaran dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat terutama generasi muda.

Sama halnya dengan pengaruh dengan pengaruh kepemimpinan di bidang pendidikan yang berdedikasi kepada organisasi

kemasyarakatan di bidang pendidikan, maka pengaruh kepemimpinan aparatur pendidikan ini juga sangat besar di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan kepercayaan dan harapan masyarakat untuk mendidik, dan melatih anak-anaknya agar kelak menjadi anggota masyarakat yang mengabdikan berbakti kepada keluarga, lingkungan dan masyarakat.

Di samping itu tenaga kependidikan ini sangat berpengaruh dalam membentuk pola berpikir dan bertindak masyarakat tidak saja melalui pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan di sekolah tetapi juga melalui interaksi sehari-hari dengan anggota masyarakat baik resmi maupun tidak resmi. Pengaruh kepemimpinan ini juga dirasakan dalam membina dan menggembleng generasi muda dalam kegiatan-kegiatan sosial budaya masyarakat terutama di kalangan generasi muda. Dalam kenyataan sehari-hari sebagian besar tenaga kependidikan di kedua lokasi penelitian ini aktif melakukan kegiatan-kegiatan di bidang olah raga, kesenian, kepramukaan dan kegiatan sosial lainnya.

Mengingat fungsi dan pengaruh kepemimpinan tenaga kependidikan ini maka sewajarnya yang bersangkutan dimanfaatkan untuk tenaga penggerak dan pelopor pembangunan di berbagai bidang kegiatan di pedesaan. Pemanfaatan tenaga kependidikan ini tentu saja dengan mempertimbangkan persyaratan-persyaratan ini yang mendatangkan kegairahan dan tidak menimbulkan pengaruh-pengaruh yang negatif dalam pelaksanaan tugas pokoknya sebagai tenaga kependidikan di daerah pedesaan.

BAB VIII

BEBERAPA ANALISA

Didasarkan kenyataan-kenyataan yang ditemui di lapangan sebagaimana diuraikan dalam bahasan-bahasan laporan ini. Terutama yang terkait dengan sistem kepemimpinan baik di bidang Sosial, Ekonomi, Agama dan Pendidikan. Di akhir dari penulisan ini akan dikemukakan hubungan antara Sistem Kepemimpinan di pedesaan dengan pengaruh kebudayaan, sistem administrasi politik Nasional dan kaitannya dengan pembangunan Nasional.

Diharapkan dengan analisa ini akan dapat terungkap masalah dan aspek-aspek kepemimpinan yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya di daerah pedesaan yang kiranya dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan landasan penyusunan kebijaksanaan Nasional di bidang kebudayaan yang meliputi pembinaan kebudayaan, pembinaan kesatuan bangsa dan peningkatan ketahanan nasional.

Untuk lebih jelasnya analisa dimaksud akan diuraikan secara berurutan di bawah ini sehingga kaitan antara sistem kepemimpinan di pedesaan dengan pengaruh kebudayaan, dengan sistem administrasi politik nasional serta pembangunan Nasional dapat dilihat secara terpisah walaupun seluruhnya bermuara kepada peningkatan ketahanan nasional.

8.1. Pengaruh Kebudayaan Terhadap Sistem Kepemimpinan Di Pedesaan.

Sudah umum dimaklumi bahwa isi dari semua kebudayaan adalah religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, dan sistem teknologi dan peralatan. Di samping itu sudah sama-sama diketahui pula bahwa kebudayaan itu paling sedikit mempunyai tiga wujud yakni : pertama, sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya; kedua, sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat dan yang ketiga, sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Bertolak atas pokok-pokok pikiran yang demikian, jelas bahwa sistem kepemimpinan yang terdapat di daerah pedesaan sedikit banyaknya dipengaruhi dan malah ditentukan oleh unsur-unsur kebudayaan dimaksud.

Data di lapangan menunjukkan bahwa, kalau berbicara tentang sistem kepemimpinan yang ada di sana idealnya terdapat tiga sistem kepemimpinan yakni sistem kepemimpinan formal, sistem kepemimpinan informal dan sistem kepemimpinan non formal. Namun dilihat dari ruang lingkup permasalahan serta bobot penekanan, pada hakekatnya terdapat dua sistem kepemimpinan, yakni sistem kepemimpinan formal dan sistem kepemimpinan informal. Sebagai pendukung dari kenyataan dimaksud, berdasarkan informasi atas hasil yang dilakukan oleh Prof. Selo Soemardjan (Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1979), khusus untuk desa-desa di daerah Irian Jaya, selain dua kekuatan sosial yang ada, masing-masing kepemimpinan asal pemerintah (resmi/formal) dan kepemimpinan asal adat (informal). Juga berhasil diangkat kekuatan sosial lain yang tidak kalah pentingnya bila dibandingkan dengan kekuatan sosial sebelumnya, yang dikenal dengan kepemimpinan di bidang kerohanian (agama).

Jika diperhatikan syarat-syarat dan faktor pendukung dari kedua jenis kepemimpinan ini, terdapat suatu prinsip umum yang perlu dipenuhi atau diindahkan oleh kedua sistem yang ada, yakni ide, gagasan, nilai-nilai norma-norma, peraturan dan sebagainya yang berlaku di daerah pedesaan yang bersangkutan. Wujud kebudayaan yang disebut terakhir ini menentukan dan mempengaruhi aktivitas kelakuan berpola dari anggota masyarakat tersebut.

Berkenaan dengan itu kedua wujud kebudayaan dimaksud merupakan refleksi dari tujuh unsur kebudayaan yang telah disinggung sebelumnya.

Jika diperhatikan makna yang terkandung dalam kebudayaan masyarakat di kedua lokasi penelitian dan umumnya masyarakat Sentani, dasar pokoknya adalah kekeluargaan yang bermuara pada prinsip bersama. Hal ini bisa terlihat dalam bentuk keputusan, di mana hasil keputusan itu tidak didaarkan atas suara terbanyak, tetapi atas dasar prinsip musyawarah untuk mufakat. Selain itu bisa terlihat dalam bentuk bagi hasil (sistem ekonomi) di mana fitrah kanipugha merupakan pandangan nilai yang manusiawi, mengungkapkan bahwa kekayaan alam yang ada, digunakan semaksimal mungkin untuk memberi kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian kesan umum untuk apa yang dikenal dengan miskin, terlantar, pengemis barangkali untuk sementara gejala ini belum ada.

Dihubungkan dengan sistem kepemimpinan; baik formal maupun informal di lokasi penelitian, wujud kebudayaan yang berbentuk gagasan vital dan pola kelakuan ini sangat mempengaruhi dan menentukan sistem kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan ini. Sehubungan dengan itu maka pengaruh dimaksud tentu saja meliputi seluruh aspek kehidupan atau bidang-bidang kepemimpinan, seperti bidang politik/pemerintahan, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang agama dan bidang pendidikan.

Untuk jelasnya dapat dikatakan bahwa tidaklah ada tempat bagi sistem kepemimpinan berdasarkan atas kekuasaan dan paksaan belaka. Seorang yang akan dijadikan sebagai pemimpin haruslah berjiwa besar. Hal ini disebabkan karena sebagai pemimpin adalah merupakan tempat atau pusat penyelesaian masalah-masalah yang terjadi/timbul. Dan sebagai konsekwensi logis dari pemangku jabatan seperti itu untuk menyelesaikan secara tuntas masalah-masalah yang terjadi.

Sebagai kesimpulan dapat dikemukakan bahwa dalam sistem kepemimpinan formal, seperti kepemimpinan di bidang pemerintahan dan badan-badan lain, di angkat secara resmi dengan suatu surat keputusan. Kemudian, untuk sistem kepemimpinan informal, prinsip-prinsip ajaran kebudayaan yang bersifat kekeluargaan dan bersama itu perlu diindahkan dan dipedomani oleh pemimpin bersangkutan. Apabila tidak demikian, maka sistem kepemimpinan yang ada, besar kemungkinan kurang berhasil akibat

syarat-syarat yang diperlukan untuk mendukung kepemimpinan tidak dipenuhi walaupun untuk kepemimpinan formal syarat-syarat yang diperlukan untuk mendukung kepemimpinan tidak dipenuhi walaupun untuk kepemimpinan formal syarat-syarat teknis, administratif dan politis sudah terpenuhi seluruhnya.

Sebaliknya, jika semua persyaratan kepemimpinan di daerah pedesaan nilai terpenuhi, maka tokoh yang bersangkutan akan jadi panutan/ikutan bagi anggota masyarakat banyak, sehingga masyarakat tersebut mudah digerakan dan diarahkan kepada aktivitas-aktivitas yang lebih produktif sesuai dengan tujuan pembangunan Nasional.

Pengalaman selalu menunjukkan bahwa umumnya kepemimpinan informal, apabila prinsip kekeluargaan dan asas bersama relatif lebih terpenuhi. Dengan demikian diharapkan potensi efektifi milik kepala adat/ondoafi, dan juga para cerdik pandai, tokoh masyarakat dan pihak rohaniawan yang ada, kiranya dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan dan mendorong gagasan-gagasan pembangunan yang sangat diperlukan dalam pembangunan daerah dan pembangunan Nasional.

Sebagai pelengkap dari analisa pengaruh kebudayaan terhadap sistem kepemimpinan di daerah pedesaan, dapat pula dijelaskan bahwa benda-benda hasil karya masyarakat di kedua lokasi penelitian sesuai dengan sistem pengetahuan dan sistem teknologi dan peralatan yang dimiliki oleh masyarakat di daerah pedesaan yang bersangkutan pada umumnya bersifat agraris atau dalam bentuk hasil-hasil pertanian. Dengan demikian implikasinya terhadap sistem kepemimpinan tidaklah terlalu kompleks. Maksudnya adalah hasil-hasil pertanian yang ada masih bersifat umum dan berbentuk bahan mentah sehingga sistem kepemimpinan dalam arti syarat-syarat dan faktor pendukung, hak dan kewajiban pimpinan yang bersangkutan masih dalam bentuk yang sangat sederhana atau belum dituntut sistem keorganisasian, pengetahuan dan ketatalaksanaan yang cukup tinggi dan komplit.

8.2. Sistem Kepemimpinan Pedesaan Sehubungan Dengan Sistem Administrasi Politik nasional.

Seperti sama di maklumi bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah adalah meru-

pakan landasan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah yang mewujudkan kepelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab bersama-sama dengan dekonsentrasi yang memantapkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam rangka menjamin kelangsungan pembangunan.

Berkaitan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 ini telah pula ditetapkan Undang-Undang tentang Pemerintahan desa dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1979. Undang-Undang yang disebut terakhir ini landasan penyusunannya antara lain adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 88 Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa : "Pengaturan tentang Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Undang-Undang".

Sepanjang pengamatan team peneliti, sebagai realisasi dari pasal 88 Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, untuk segera membentuk Pemerintahan Desa (Administratif) oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya telah ditetapkan dalam Surat Keputusan No. 21/GIJ/1974 kemudian dimodofisir lagi ke dalam Surat Keputusan No. 178/GIJ/1975. Realisasi dari surat keputusan itu terlihat dalam bentuk pembentukkan Pemerintahan Desa, unit pemerintahan terendah di bawah Kecamatan. Kesan umum yang terlihat akibat pembentukan ini adalah lebih banyak bersifat penggabungan administratif. Kendala yang muncul di sini bahwa masing-masing kampung yang ada secara teritorial mempunyai batas wilayah hukum (ulayat) yang tegas, dan sulit sekali untuk dipaksakan untuk menjadi penggabungan fisik, Akibatnya kalau berbicara tentang bagaimana itu wujud partisipasi, rasanya agak sulit sekali.

Sepanjang pengamatan team peneliti, adalah Surat Keputusan Gubernur No. 21/GIJ/1974 kemudian dimodifikasi ke No. 178/GIJ/1975 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, sebetulnya mempunyai jiwa yang sejalan. Hal ini dikarenakan tetap adanya semacam pengakuan tentang kesatuan masyarakat hukum, termasuk di dalamnya masyarakat hukum, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang masih hidup, sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan Nasional.

Berdasarkan acuan pikir yang demikian, berikut ini dikemukakan hubungan antara sistem kepemimpinan pedesaan dengan sistem politik Nasional. Pada prinsipnya sistem kepemimpinan di

pedesaan baik formal maupun informal dalam seluruh aspek kehidupan seperti di bidang politik/pemerintahan, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang agama dan bidang pendidikan dapat menunjang dan malah dalam sistem kepemimpinan formal mempedomani ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam sistem administrasi politik Nasional.

Dikatakan demikian, karena dalam sistem kepemimpinan formal di daerah pedesaan, khususnya di kelurahan Dobonsolo dan RW II Puisi, ketentuan-ketentuan dan mekanisme yang harus dipenuhi dan dipedomani sesuai dengan aturan dan penggarisan yang berlaku serta hakekat yang terkandung dalam sistem administrasi yang berlaku serta hakekat yang terkandung dalam sistem administrasi politik Nasional.

Demikian halnya dalam sistem kepemimpinan informal yang ada, pada umumnya berlandaskan pada ajaran adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang masih hidup di daerah pedesaan, sangat relevan dan dapat menunjang hakekat yang terkandung dalam sistem politik Nasional.

Barangkali ada semacam catatan lepas yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pedesaan dalam pembangunan. Berdasarkan pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, dikatakan bahwa keanggotaan Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan dan pemuka-pemuka masyarakat di desa bersangkutan. Pimpinan dimaksud pada hakekatnya adalah pemimpin informal. Demikian halnya dalam mempartisipasikan pemimpin informal dalam sistem administrasi politik Nasional di daerah pedesaan adalah berkenaan dengan anggota pengurus LKMD, antara lain terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat seperti : pemimpin adat, agama, pendidikan, pemuda, wanita serta pimpinan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di desa yang bersangkutan.

Nampaknya kondisi seperti ini, barangkali untuk daerah pedesaan di Irian Jaya perlu mendapat catatan khusus. Hal ini dikarenakan kalau berbicara tentang kepemimpinan di pedesaan dan kaitannya dengan – konsep struktur sapu lidi –, apalagi kalau sudah ke persoalan ”mengartikulasikan partisipasi politik”, rasanya konsep seperti ini agak sulit untuk sekedar menentukan dengan menggunakan jalur ”itu punya saya”. Seperti pada penjelasan sebelum, di pedesaan Irian Jaya, kalau sudah berbicara tentang – wibawa dan pengaruh –, justru lebih banyak pandangan

di arahkan ke jalur sistem kepemimpinan informal (Ondoafi). Adanya "kebijaksanaan" penempatan Ondoafi sebagai – anggota LMD/LKMD – barangkali perlu ditinjau kembali. Kalau penempatan pada jabatan elit itu dengan asumsi untuk "mengurangi pengaruh adat istiadat barangkali secara logika belum bisa diterima secara utuh. Alasannya secara adat, Ondoafi ini adalah penguasa tertinggi, *fitrah kanipughla* ada di dalam kewenangannya. Secara logika sophisticated penempatannya sebagai anggota dalam jabatan elit, justru mengurangi ruang gerak, dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ditemui di pangan seperti diuraikan di atas, jelas bahwa sistem kepemimpinan pedesaan sehubungan dengan sistem administrasi politik Nasional yang berlaku pada saat ini saling tunjang menunjang, isi mengisi dan tidak terdapat perbedaan konsepsional, sehingga tidak ditemui hambatan-hambatan yang berarti dalam menerapkan mekanisme kedua sistem ini. Sebagai kunci dari keserasian ini adalah karena kedua sistem dimaksud berdasarkan pada kenyataan-kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat pedesaan.

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa sistem Kepemimpinan Tradisional dengan Kepemimpinan yang berasal dari Sistem Administrasi Politik Nasional sama-sama kuat atau seimbang sehingga sama-sama mengatur tata-tata kehidupan masyarakat di daerah bersangkutan.

8.3. Kepemimpinan Pedesaan Dalam Pembangunan Nasional.

Dalam GBHN sudah ditetapkan bahwa Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tetib, dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Di samping itu juga dijelaskan bahwa landasan pelaksanaan pembangunan Nasional tersebut adalah Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan azas-azas pembangunan Nasional itu adalah azas manfaat, azas usaha bersama dan kekeluargaan, azas demokrasi, azas kesadaran hukum dan azas kepercayaan pada diri sendiri.

Sudah dimaklumi bahwa semua program-program dan proyek-proyek pembangunan yang dirancang secara Nasional, dan kedaerahan akhirnya bermuara atau dilaksanakan di daerah pedesaan. Sebagai pelaksana pembangunan tersebut selain dari aparat-aparat Pemerintah juga dilakukan oleh warga masyarakat daerah pedesaan.

Justru karena itu potensi dan keikutsertaan masyarakat pedesaan dalam melaksanakan pembangunan Nasional itu sangat menentukan keberhasilan pembangunan tersebut. Pendaan guna potensi masyarakat ini akan lebih memadai jika dikoordinir dan diarahkan secara efektif dan efisien oleh pemimpin-pemimpin atau agen-agen pembangunan yang berada di pedesaan.

Berkaitan dengan ini penemuan di lapangan penelitian ini pada khususnya satu daerah Irian Jaya pada umumnya tentang sistem kepemimpinan pedesaan dalam pembangunan Nasional adalah saling tunjang menunjang dan serasi satu sama lain.

Dikatakan demikian karena sistem kepemimpinan di daerah pedesaan sebagaimana diungkapkan terdahulu mengandung azas kekeluargaan, azas demokrasi, azas kepercayaan pada diri sendiri, azas adil dan merata, dan berazas kesadaran hukum. Justru karena itu tidak ada pertentangan malah sama halnya dengan pembangunan Nasional Indonesia.

Di samping itu khusus dalam kepemimpinan formal secara lebih tegas dinyatakan bahwa syarat kepemimpinan yang harus dipenuhi antara lain adalah setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian berarti antara pelaksanaan pelaksanaan pembangunan dan landasan pembangunan itu sendiri saling tolak atas prinsip dan dasar yang sama. Hal ini tentu saja akhirnya diharapkan sasaran dan manfaat pembangunan tersebut sesuai dengan yang telah digariskan dan disetujui bersama.

Berkenaan dengan syarat-syarat dan faktor pendukung kepemimpinan informal di segala bidang kehidupan yang ada di pedesaan antara lain adalah besarnya minat dan pemahaman pemimpin bersangkutan dari bidang yang dikelolanya serta yang bersangkutan mendapat kepercayaan dari masyarakat pendukungnya maka pemimpin informal ini dapat diharapkan sebagai pelopor menciptakan kondisi yang dinamis di kalangan masyarakat pedesaan guna menggerakkan tenaga kegotong royongan masyarakat dalam ikut-serta mendorong dan melaksanakan pembangunan di daerah pedesaan.

Kunci permasalahan sekarang adalah sejauh mana penanggungjawab pembangunan Nasional dapat memanfaatkan pemimpin informal ini yang sistem keberadaannya sesuai dengan wujud dan isi kebudayaan yang berlaku secara luas di kalangan masyarakat.

Jika ditinjau sasaran pembangunan Nasional Indonesia ini secara dalam jelas terlihat pembangunan tersebut tidak saja diarahkan kepada hal-hal yang bersifat ekonomis dalam peningkatan taraf hidup masyarakat tetapi juga diarahkan kepada pembinaan dan menumbuhkan manusia-manusia pembangunan termasuk pembinaan kader-kader bangsa dan pimpinan yang beilmu pengetahuan luas, cerdas dan trampil. Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan berbagai program seperti program pembinaan generasi muda, pendidikan masyarakat dan peningkatan peranan wanita.

Mengenai konsepsi yang demikian maka sistem kepemimpinan masyarakat pedesaan dengan sendirinya tetap dibina dan dikembangkan melalui usaha-usaha dan program-program yang tercakup dalam pembangunan Nasional. Pembinaan ini tentu saja akan memberikan umpan balik yang positif terhadap pembangunan Nasional itu sendiri karena memanfaatkan konsep-konsep yang ideal dalam sistem kepemimpinan masyarakat pedesaan itu sendiri.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem kepemimpinan pedesaan selaras dan serasi dengan sistem dan tujuan pembangunan Nasional dan untuk itu kepemimpinan pedesaan itu perlu dibina dan ditingkatkan mekamenya serta gagasan-gagasan vital yang terkandung dalam sistem dan ide-ide para pendukungnya.

Terakhir dalam analisa hubungan kebudayaan, sistem administrasi politik Nasional dan pembangunan Nasional ini dengan sistem kepemimpinan pedesaan adalah saling tunjang menunjang, isi mengisi dan didasarkan atas wujud dan isi kebudayaan itu sendiri secara universal.

BIBLIOGRAFI

- Buddy Prasadja 1974 *Pembangunan Desa Dan Masalah Kepemimpinan*. Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta.
- Yumika M. Prijonan 1983 *Demokrasi Di Pedesaan Jawa*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Kartono Sartono 1981 *Elite Dalam Perspektif Sejarah*, LP3S Jakarta.
- 1984 *Kepemimpinan Dalam Dimensi Sosial*, LP3S, Jakarta.
- Koentjaraningrat 19 *Keragaman Dan Aneka-Warna Masyarakat Irian Barat*, LIPI, Djakarta.
- 197 *Beberapa Pokok Antrapologi Sosial*, Dian Rakyat, Jakarta.
- 1977 *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Lazarus Revassy 1977 *Pemerintahan Desa Nafri*, Fakultas Hukum, Ketatanegaraan dan Ketataniagaan Universitas Cenderawasih, Jayapura, Irian Jaya.
- 1983 *Sistem Ekonomi Tradisional Daerah Irian Jaya*, Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jayapura, Irian Jaya.

- 1984 *Kepemimpinan Di Pedesaan, Studi Tentang Perkembangan Kepemimpinan DI Desa Benteng Alla', Kecamatan Alla', Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan, PLPIIS Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.*
- 1985 *Masyarakat Ayapo, Studi Tentang Organisasi Sosial Dan Kepemimpinan Di Desa Itakiwa, Kecamatan Sentani, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Cenderawasih, Jayapura Irian Jaya.*
- 1985 *Masyarakat Kwadeware, Suatu Lukisan Analisis Antropologi Politik Orang Yonokhong, Kecamatan Sentani, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih, Jayapura, Irian Jaya.*
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, 1982 LP3ES, Jakarta.
- Machdar Somadisastra, "Kepemimpinan Dalam Masyarakat Pedesaan Montasik", *Segi-Segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh*, Alfian (ed.) LP3ES, Jakarta.
- Saparin Soember *Tata Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa*, Ghalia Indoneia, Jakarta.
1977
- Suzana Keller, *Penguasa Dan Kelompok Elit*, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta.
1983
- Soemarno, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979", *Tata Pemerintahan Desa Dan Proses Kelahirannya*, Sari Gaya Baru, Jakarta.
1980
- Thamrin Hamdan, *Beberapa Pendekatan Dalam Pengkajian Kepemimpinan Di Pedesaan*, Makalah Penataran, Proyek IDKD, Cisarua, Bogor.
1983
- Biro Bina Pemerintahan Desa, Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Irian Jaya, *Himpunan Peraturan Tentang Pemerintahan Desa*, Jayapura.
1980

- 1980 *Himpunan Peraturan Teknis Pembinaan
 Pemerintah Wilayah Kecamatan Dan Peme-
 rintahan Desa/Kelurahan, Jayapura.*
- Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 19 Tahun 1973, *Pe-
 1973 doman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
 Pemerintahan Wilayah Kecamatan Di Pro-
 pinsi Irian Jaya, Jakarta.*
- Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 1 Tahun 1981, *Struk-
 1981 tur Organisasi Pemerintahan Desa, Jakarta.*

INDEKS

A

Abu afa

Abu agkho

Abu agkho kahbam

Abu agkho khandin

Ana

Arai

Aranggae

Atai

Ateai

Ayafa norofa

Bargaining of position

Bilateral

Controleur

Dewan adat

Fa-kending

Fitrah kanipughla

Gaba

Hobat – hobatan

Jaifuri

Kanipughla

Kelu–fa

Kemba

Kena U Embay

Keret

Knali

Kolot

Korano

Kotelo

Majelis jemaat paniel

Makha

Mandor

Meaghban norofa

Mengge-fa

Nai

Nunggu

Onei

Ondoafi

Ondoafi sentris

Ondofolo

Ondoforo

Patrimonial

Patron-client relationship

Penatua

Penenguhan

Rahe

Romie

Sabeta

San

Shifting cultivation

Siakha

Sidi
Survival
Syamas
Syamaset

Teratokharare-akharong
Toha

Ulat sagu
Ulayat

Varimo

Warobo
Week

Yo ondopolo

Lampiran

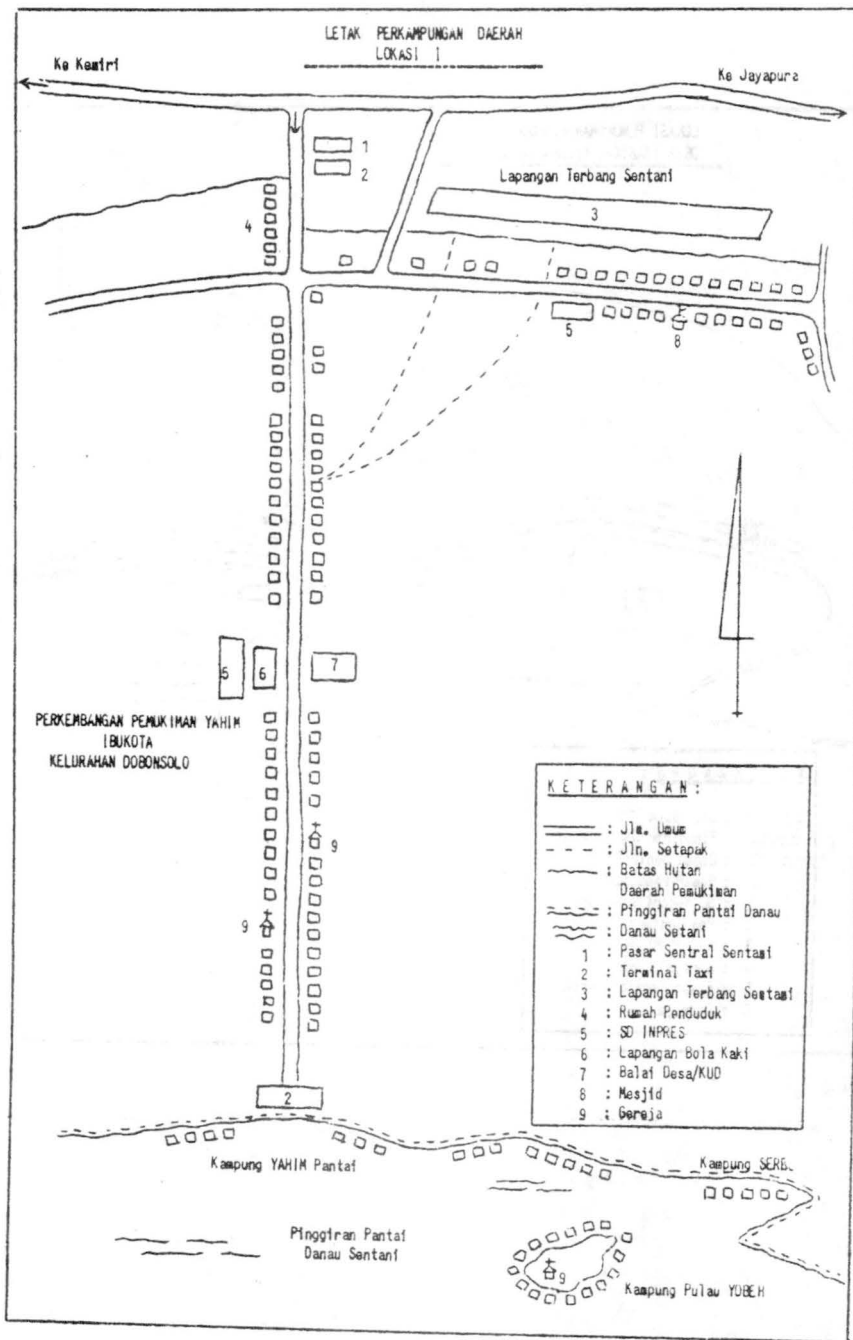
DAFTAR : NAMA-NAMA INFORMAN

A. Rukun Wilayah II Puai

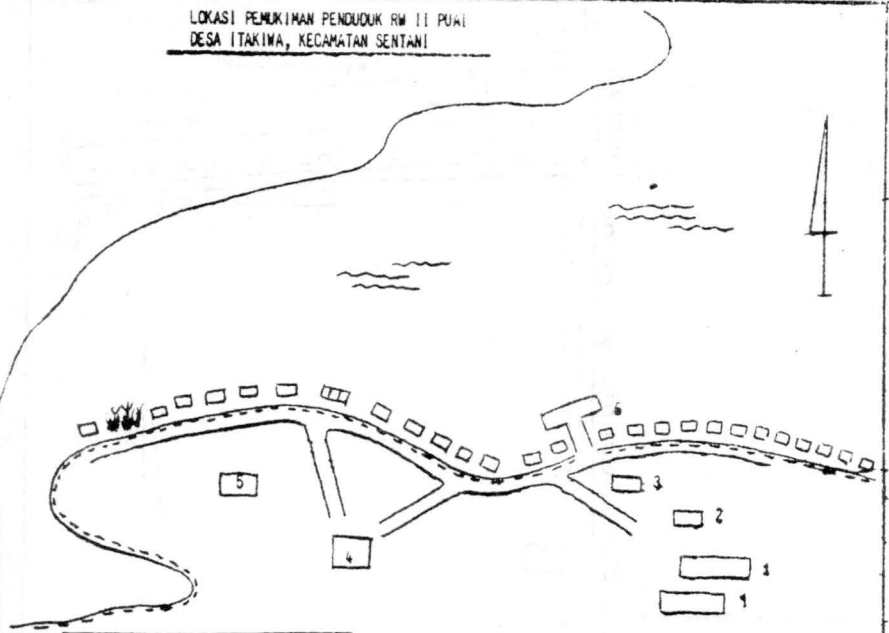
No.	N a m a	Pendidikan	Pekerjaan	Ket.
1.	Ismail Awaitauw	SD	Petani	Puai
2.	Lambert Puhili	SD	Petani	Puai
3.	Zeth Deda	SD	Petani	Puai
4.	Gerson Deda	SGA	Guru	Puai
5.	Yunus Doyapo	SD	Petani	Puai
6.	Isak Mimitauw	SD	Petani	Puai
7.	Elia Fiobetauw	SD	Petani	Puai
8.	Ruben Kabey	SD	Petani	Puai
9.	Lukas Awaitauw	SD	Petani	Puai
10.	Frans Eballoy	SMP	Petani	Puai
11.	Andreas Dade	SD	Petani	Puai
12.	Aser Kabey	SD	Petani	Puai
13.	Enos Deda	SD	Petani	Puai
14.	George Tokoro	SD	Petani	Puai
15.	Elisa Fiobetauw	SD	Petani	Puai
16.	Debora Ibo	SD	Petani	Puai
17.	Mina Tokaro	SMP	Petani	Puai
18.	Oktobina Fiobetauw	SD	Petani	Puai
19.	Sipora Puhili	SGB	Guru	Puai

B. Kelurahan Dobonsolo.

No.	N a m a	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat
1.	Decky Felle	SD	Lurah	Yahim
2.	David Felle	SD	Wiraswasta	Yahim
3.	Joas Ondi	SD	Wiraswasta	Yahim
4.	Demi Felle	SD	Peg. Negeri	Yahim
5.	Jason Felle	SMP	Peg. Negeri	Yahim
6.	Salmon Sokoy	SD	Peg. Negeri	Yahim
7.	Yahya Felle	SD	Petani	Komba
8.	Johan Felle	SD	Wiraswasta	Komba
9.	Susana Mebri	SD	Petani	Yahim
10.	Permenas Felle	SD	Petani	Yahim
11.	Ricky Maloali	SMA	Peg. Negeri	Komba
12.	Joel Felle	SGB	Peg. Negeri	Yahim
13.	Marthen Tokoro	SGB	Peg. Negeri	Yahim
14.	Levinus Suebu	KPG	Peg. Negeri	Yahim
15.	Edison Yoku	PGSIP	Peg. Negeri	Komba
16.	Yosmina Hokoyoku	SPG	Peg. Negeri	Komba
17.	Maria Sokoy	Susteran	Petani	Komba
18.	Lewi Sokoy	JVVS	Petani	Komba
19.	Josafat Pangkali	SD	Peg. Negeri	Komba
20.	Demianus Taime	SMA	Siswa	Komba
21.	Dominggus Felle	SMA	Siswa	Yohim
22.	Bernadus Sokoy	ST	Peg. Negeri	Yahim
23.	Margaret Pallo	SPG	Peg. Negeri	Yobeh
24.	Oktov Pangkali	SD	Petani	Yobeh
25.	Jan Sokoy	SD	Petani	Yobeh
26.	Rehabyam Pangkali	SPG	Peg. Negeri	Yobeh
27.	Christian Wally	SD	Petani	Yobeh
28.	Obeth Wally	SD	Petani	Yobeh
29.	Pdt. Matias Wally	SMTA	Pelayan Jemaat	Yobeh
30.	Paulus Felle	SGB	Petani	Yobeh
31.	Naftali Yoku	YVVS	Petani	Yobeh

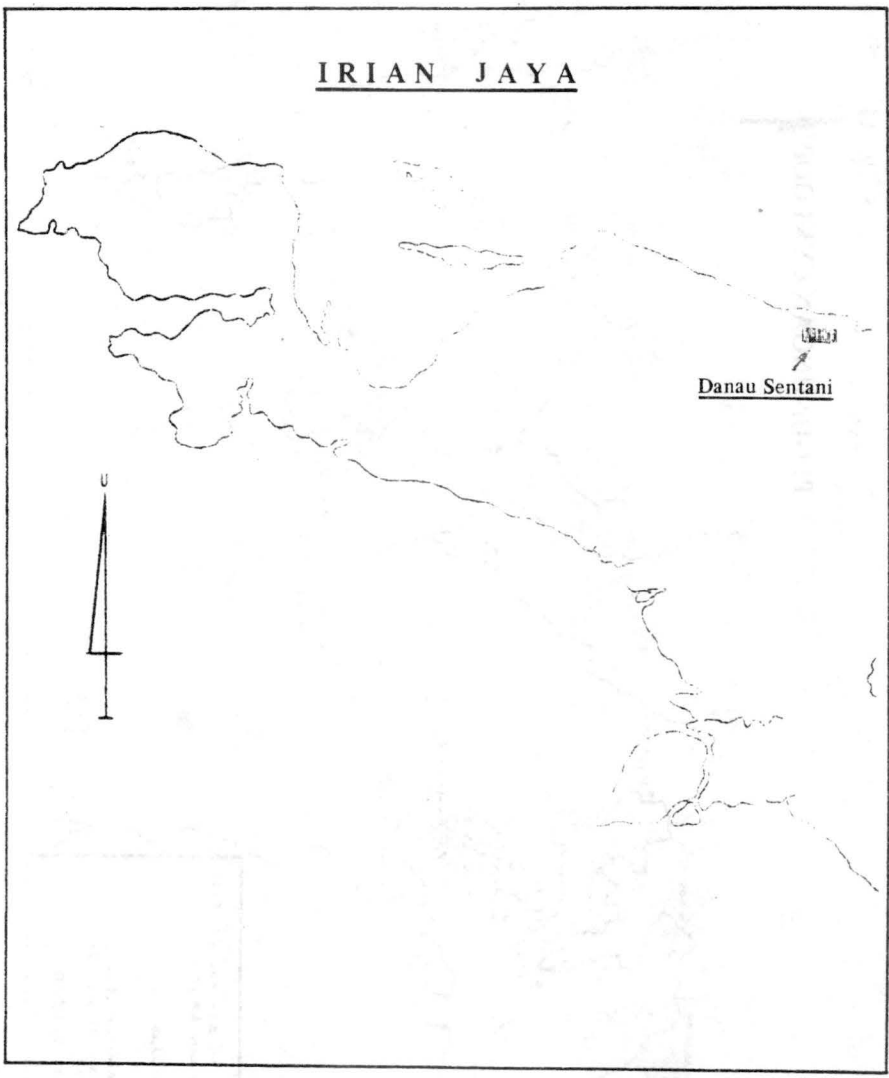


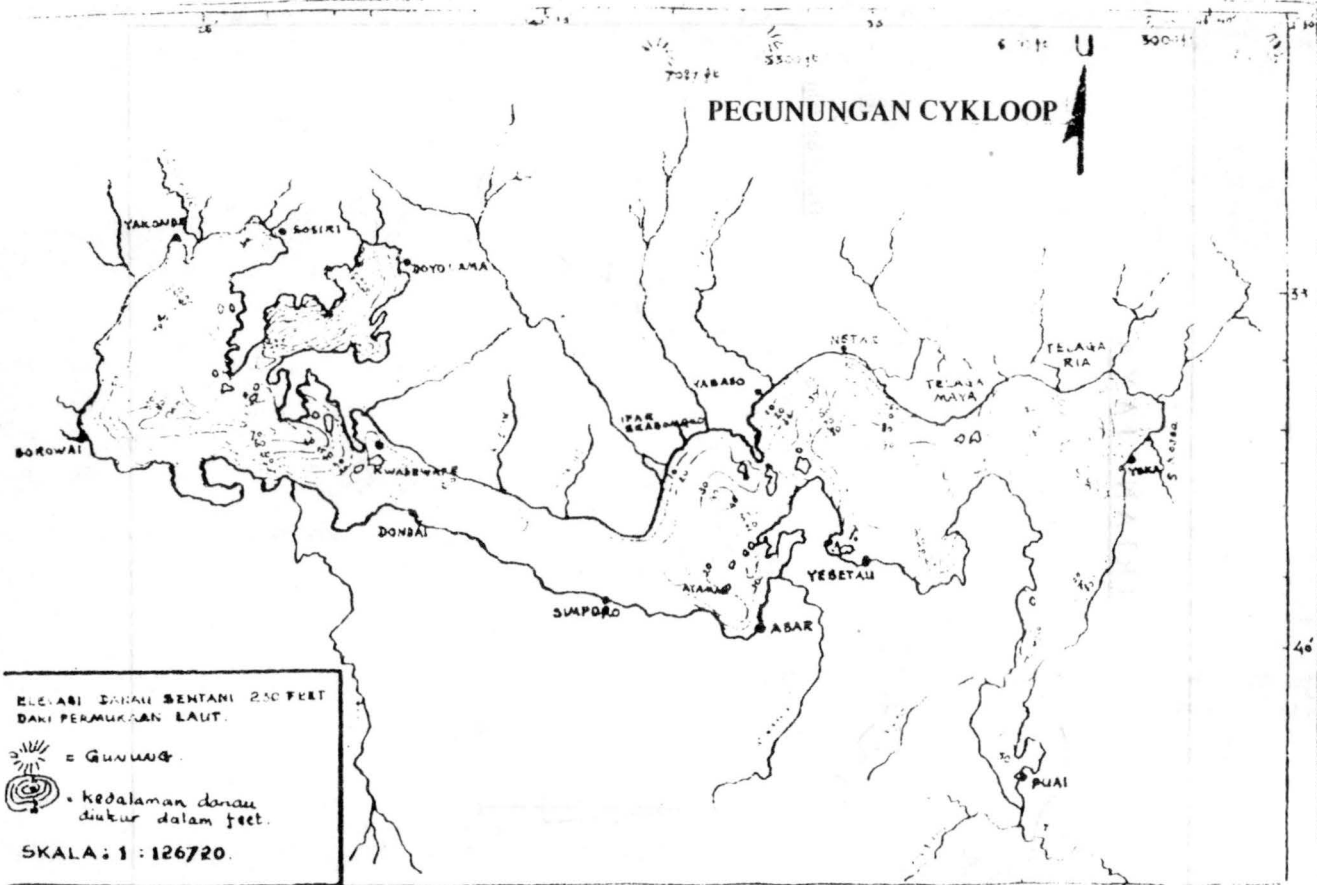
LOKASI PEMUKIMAN PENDUDUK RW II PUALI
DESA ITAKIWA, KECAMATAN SENTANI



- KETERANGAN :**
- ==== : Jln. Uluw
 - ~~~~ : Pinggiran Danau Sentani
 - ~~~~ : Danau Sentani
 - : Rumah Penduduk
 - 1 : SD Negeri
 - 2 : Pos Tentara
 - 3 : KUD
 - 4 : Gereja
 - 5 : Rumah Kepala Sekeloa
 - 6 : Dermaga

IRIAN JAYA

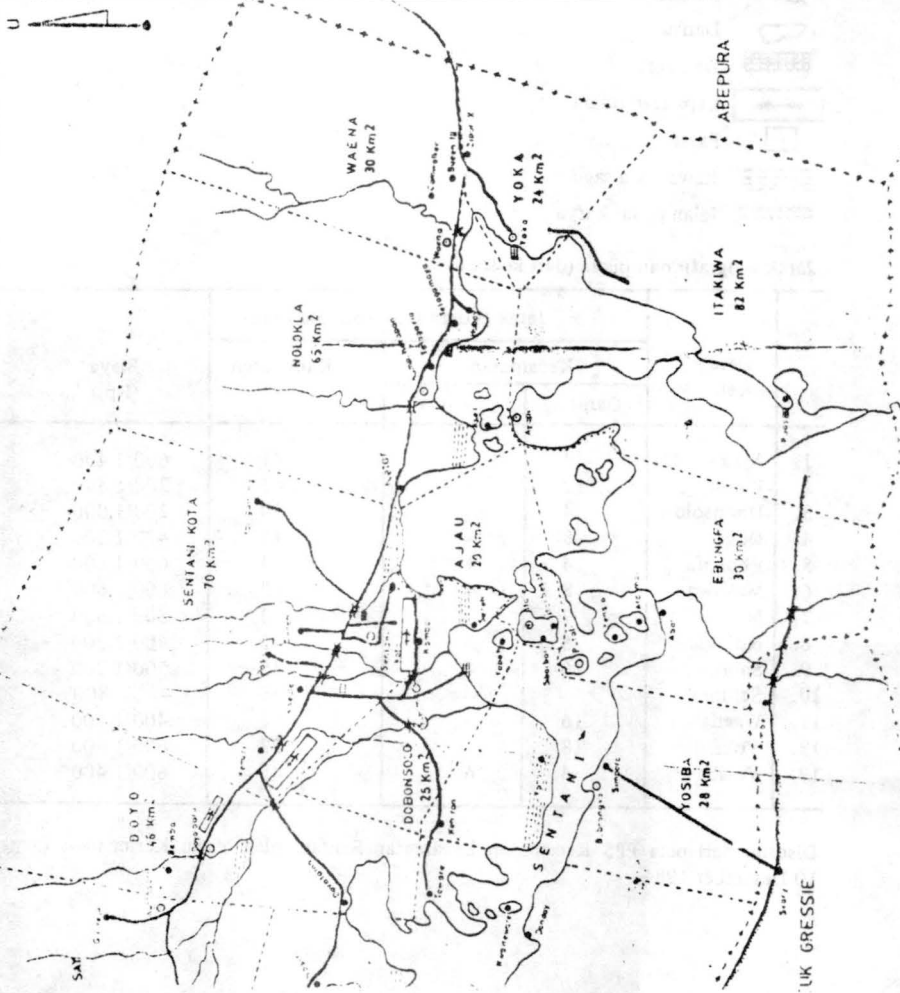




PETA KECAMATAN SENTANI 1:380 000

KETERANGAN

- Titik Kecamatan
- Kecamatan Basis Data/Reservasi
- Pemukiman Persegi Panjang
- Basis Kecamatan
- Basis Data/Reservasi
- Jalan
- Perbatasan
- Sungai
- Danau
- Perikanan
- Lapangan
- Waduk
- Perkebunan
- Perikanan

















REKAM DISTRIBUSI PERSEKUTUAN (1984)

No.	Desa	Luas (Ha)	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Perempuan	Jumlah Anak	Jumlah Perempuan	Jumlah Anak	Jumlah Perempuan	Jumlah Anak	Jumlah Perempuan	Jumlah Anak
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Direktorat Jendral Survei dan Pemetaan
 Departemen Pertahanan dan Keamanan
 Jakarta, 10 Desember 1984

KETERANGAN :

-  Ibukota Kecamatan
-  Kedudukan Kantor Desa/Kelurahan
-  Pemukiman penduduk
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa/Kelurahan
-  Jalan raya
-  Jembatan
-  Sungai
-  Danau
-  Dermaga
-  Lapangan udara
-  Pasar
-  Rawa rawa sagu
-  Jalan padat karya

Jarak geografis dan biaya (dari kedudukan desa)

	Desa / Kel.	Jarak geografis ke Ibukota (Km)			Biaya (Rp.)
		Kecamatan		Kabupaten	
		Darat	Banda		
1.	Ajau	4	2	41	600/1.400
2.	Burau	12	-	47	1.200/1.800
3.	Dbonsolo	4	-	39	200/1.000
4.	Doyo	8	-	43	400/1.200
5.	Ebungfa	4	4	43	600/1.400
6.	Makawa	8	4	47	600/1.600
7.	Maribu	7	-	52	800/1.600
8.	Nolokla	8	-	43	400/1.200
9.	Sabron	10	-	45	500/1.300
10.	Sentani	-	-	35	- 800
11.	Waena	16	-	51	400/1.200
12.	Yoka	18	-	53	600/1.400
13.	Yosiba	4	6	45	600/1.400

Disusun dari peta PPS Kecamatan Kecamatan Sentani oleh Yasin Karim pada tanggal 10 Desember 1984.

Perpustakaan
Jenderal

30